

# **Partai Politik, Pemilihan Umum, Dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi Di Indonesia:**

---

LAPORAN HASIL PENELITIAN

## **Partai Politik, Pemilihan Umum, Dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi Di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian**

xii + 130 halaman, 17 x 24 cm  
Agustus 2014, © INFID dan LIPI  
ISBN: 978-602-8384-88-9

Penyusun: Tim Peneliti INFID dan LIPI  
Desain Isi dan Sampul: Dwi Fajar & Markaban-Narto  
Foto Sampul: @idealita Ismanto 2009, repro Pustaka Sempu  
Diterbitkan Pustaka Sempu (Grup INSISTPress) kerjasama INFID & LIPI

Disusun sebagai Studi Kerjasama antara International NGO Forum on  
Indonesian Development (INFID) dan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI



## **Kata Pengantar**

INDONESIA akhirnya mengalami fase gelombang demokratisasi seperti dialami berbagai negara lain di Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Momentum emas itu terjadi persis sesudah runtuhnya era rejim otoriter Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 1998. Pemilu demokratis dan multipartai pertama pascarejim otoriter pada 1999 menandai momentum berkelanjutan dari transisi demokrasi yang dialami Indonesia.

Setelah reformasi politik dan demokratisasi berlangsung lebih dari 15 tahun, dan pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung, muncul berbagai kritik dan gugatan terhadap peran dan kontribusi partai politik.

Di satu pihak, parpol adalah salah satu agen utama sistem demokrasi, sehingga sangat diharapkan kontribusi dan solusinya. Tidak hanya dalam meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih substansial dan terkonsolidasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tata-kelola pemerintahan.

Namun di pihak lain, parpol juga dianggap sebagai salah satu sumber problem itu sendiri. Betapa tidak, kasus-kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak pasca Soeharto, ternyata melibatkan semua parpol dan unsur pimpinan parpol, baik di jajaran pemerintahan maupun lembaga-lembaga legislatif, di tingkat pusat hingga daerah.

Terkait realitas politik tersebut, kritik dan gugatan publik juga ditujukan terhadap komitmen dan visi parpol mengenai arah penataan Indonesia ke depan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Apakah parpol-parpol yang tumbuh subur mewarnai demokrasi kita hari ini sungguh-sungguh memiliki proposal yang genuine mengenai arah Indonesia ke depan? Atau sebaliknya, parpol hanya berisi para pemburu rente yang memanfaatkan momentum kebebasan dan demokrasi untuk kepentingan jangka pendek mereka sendiri?

Dalam kaitan itu, naskah yang berada di tangan pembaca ini adalah laporan penelitian terkait platform politik atau haluan politik 12 parpol peserta Pemilu 2014 tentang isu ketimpangan.

Pertanyaannya, apakah parpol yang berkompetisi dalam pemilu di Indonesia dewasa ini memiliki haluan politik dan komitmen terkait isu ketimpangan sosial-ekonomi? Jika komitmen itu ada, sejauh mana hal itu tercermin dalam program, kebijakan, tindakan, dan perilaku partai, baik di tingkat pusat maupun daerah?

Pertanyaan-pertanyaan di atas dan upaya mencari jawaban serta penjelasannya melalui riset, jelas merupakan kebutuhan yang signifikan bagi bangsa kita. Pertanyaan-pertanyaan di atas penting tidak hanya dalam rangka peningkatan kualitas pelebagaan parpol, melainkan juga kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu ke pemilu di negeri ini. Dalam bahasa lain, kajian semacam ini diperlukan agar partai politik kembali ke “jalan lurus dan benar”, serta terhindar dari perangkat “benalu” bagi pemerintahan dan demokrasi Indonesia.

Sehubungan dengan itu, atas nama Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan INFID atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan untuk melakukan kajian yang penting ini.

Semoga kerjasama serupa dapat dilanjutkan ke depan, terutama dalam rangka mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih substansial dan terkonsolidasi. Selaku Kepala P2P LIPI saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti yang dipimpin oleh Irine Hiraswari Gayatri dan Pandu Yubsina Adaba yang dapat menyelesaikan studi ini sesuai jadwal serta dalam waktu yang relatif pendek. Semoga naskah laporan ini

menjadi bagian dari komitmen dan kontribusi kecil P2P LIPI dalam turut memajukan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa Indonesia ke depan.

Jakarta, Maret 2014.

**Syamsuddin Haris**  
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

## Kata Pengantar

KETIMPANGAN sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/1998 cenderung stabil dan membaik, tetapi ketimpangan yang ada belum dapat diselesaikan. Sebagai contoh kesenjangan wilayah antara Jawa dengan luar Jawa: tahun 1985 sebesar 54,4%-45,6%, sementara data tahun 2012 sebesar 57,6%-42,4%. Tidak ada perubahan yang berarti dari dua wilayah tersebut. Demikian juga jika kita melihat pada pembagian kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, hampir tidak mengalami perubahan dalam 12 tahun terakhir, yaitu sekitar 83%-17%.

Dari segi pendapatan, ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia yang diukur dari gini ratio juga mengalami kenaikan dari 0,38 di tahun 2010 menjadi 0,41 pada tahun 2011. Artinya, jurang pendapatan tertinggi dan terendah semakin lebar. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di Indonesia, tetapi yang utama adalah tidak adanya strategi utuh yang sudah mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, terjaminnya hak-hak asasi manusia serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, ketimpangan juga belum mendapat perhatian dari aktor-aktor utama penyelenggara negara, seperti partai politik dan parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka masih melihat ketimpangan sebagai isu nomor dua dibandingkan dengan korupsi, pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, INFID sebagai salah satu lembaga yang berkonsentrasi terhadap isu-isu ketimpangan memandang perlunya mengidentifikasi partai politik dalam melihat persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan di Indonesia. Mengapa partai politik?

Sebab, melalui partai politiklah, aspirasi pemilih bisa diagregasi dalam bentuk kebijakan ketika mereka terpilih sebagai anggota parlemen. Proses identifikasi ini dilakukan melalui riset yang dikerjakan INFID bersama Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Riset dilakukan sejak bulan November, dilakukan terhadap dua belas partai politik peserta Pemilihan Legislatif 2014 di sepuluh daerah. Secara umum riset ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai partai politik dan ketimpangan: Apa persepsi parpol mengenai Isu ketimpangan? Apa bentuk-bentuk kebijakan parpol peserta Pemilu 2014 untuk isu ketimpangan sosial dan ekonomi? Dan bagaimana strategi parpol dalam melaksanakan program kebijakan dan ketimpangan?

Riset ini juga dimaksudkan untuk melihat partai politik mana yang bisa bekerja sama untuk menangani isu-isu ketimpangan di Indonesia. Harapannya, hasil riset ini dapat digunakan oleh partai politik untuk menyusun ulang manifesto, strategi maupun program politik terkait dengan ketimpangan yang ada. Ke depan, diharapkan pula semakin banyak pihak yang memiliki konsentrasi terhadap isu tersebut.

Akhirnya, INFID berterima kasih kepada rekan-rekan di P2P LIPI terutama Irine H Gayatri, dan Pandu Y. Adaba yang sudah bekerja keras mengerjakan riset ini sekaligus mengorganisir kerja teman-teman peneliti di sepuluh daerah penelitian.

Semoga hasil riset ini berguna bagi perbaikan Indonesia.

Jakarta, 26 Maret 2014

**Beka Ulung Hapsara**  
Program Manager INFID

## Daftar Singkatan

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BHP	: Badan Hukum Pendidikan
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BMT	: Baitul Mal wat Tamal atau Bank Kredit Mikro
Bodebek	: Bogor, Depok, Bekasi
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Caleg	: Calon anggota legislatif
DCT	: Daftar Calon Tetap
Depnaker	: Departemen Tenaga Kerja
Diknas	: Pendidikan Nasional
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPN	: Dewan Pimpinan Nasional
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
FK Unmul	: Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
GNP	: Gross National Product
Golkar	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hanura	: Hati Nurani Rakyat
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Jabar	: Jawa Barat
Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
Jasmas :	Jaring Aspirasi Masyarakat
Jateng	: Jawa Tengah
Jatim	: Jawa Timur
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Kaltim	: Kalimantan Timur
KB	: Keluarga Berencana
Kemendagri	: Kementrian Dalam Negeri
KK	: Kepala Keluarga
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUR	: Kredit Untuk Rakyat
Letjen.	: Letnan Jenderal.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Malut	: Maluku Utara
MARA	: Majelis Amanat Rakyat
Mayjen	: Mayor Jenderal.
MP3EI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Munas	: Musyawarah Nasional

Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
Narsum	: Narasumber
Nasdem	: Nasional Demokrat
NGO	: Non-Government Organization
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
Orba	: Orde Baru
Ornop	: Organisasi non-Pemerintah
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parpol	: partai politik
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah daerah
Pemilu	: Pemilihan umum
Pemilukada	: Pemilihan umum kepala daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Perindo	: Persatuan Indonesia
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PK	: Partai Keadilan
PKS	: Partai Keadilan dan Kesejahteraan
PMI	: Palang Merah Indonesia
PMS	: Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PPKB	: Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPSK	: Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia

PT	: Perguruan Tinggi
Purn.	: Purnawirwan
RA	: Reforma Agraria
Rakernas	: Rapat Kerja Nasional
Raskin	: Beras untuk Rumah Tangga Miskin
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RS/RSUD	: Rumah Sakit/ Rumah Sakit Umum Daerah
SAW	: Shallallahu “Alaihi Wassalam
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA/SMU	: Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Umum
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
Sulsel	: Sulawesi Selatan
Sumbar	: Sumatera Barat
Sumut	: Sumatera Utara
TK	: Taman Kanak-Kanak
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UI	: Universitas Indonesia
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNILA	: Universitas Lampung
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii-vii
Daftar Singkatan	viii-xi
Ringkasasan Temuan	1-35
Metode	36-39
Analisis dan Pembahasan	40-66
Kesimpulan	67-68
Daftar Pustaka	69-70
Lampiran-Lampiran	71-130

# Ringkasan Temuan<sup>1</sup>

## 2.1. PENGANTAR

Studi kolaboratif pertama oleh P2P dan INFID ini mengambil fokus pada posisi dua belas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 terhadap isu ketimpangan. Diletakkan dalam latar pasca reformasi di Indonesia 1998, maka fokus pada posisi dua belas parpol ditelaah dari bagaimana isu ketimpangan direpresentasikan dalam platform partai politik. Dalam studi ini partai politik dilihat memiliki dua sisi: sebagai bagian dari persoalan dan juga bagian dari solusi.

Dalam dimensi parpol sebagai persoalan, sudah marak dikaji bagaimana parpol tidak lain menjadi arena kompetisi kepentingan pribadi dari elite-elitenya. Selain kecenderungan oligarkis, parpol kerap disoroti karena tidak mencerminkan kehendak politik dan ekonomi rakyat. Mereka banyak dinilai hanya mewakili sekelompok kecil di ajang legislatif. Parpol juga kerap dilihat tidak sensitif pada penderitaan rakyat terkait dengan dampak ekonomi dari keputusan politik yang dihasilkan oleh eksekutif pada isu-isu strategis yang berkenaan dengan kesejahteraan.

<sup>1</sup> Tim peneliti berterimakasih pada INFID khususnya Direktur, Bpk. Sugeng Bahagijo, Manager Program, BekaHapsara, dan P2P LIPI khususnya Kepala Puslit Prof. Dr. Syamsuddin Haris, atas kelancaran riset yang dilakukan oleh peneliti yaitu Irine H Gayatri, M.A., dan Pandu Yuhsina Adaba, S.Ip.,(koordinator), anggota tim peneliti yaitu Sarah Siregar,M.Si., Luky Sandra Amalia, S.Ip., Ibnu Nadzir, S.Ant.,Amin Mudzakkir, S.S., Saiful Hakam, M.Hum., Wahyudi Akmaliah, M.A., Triyono, S.Ip., Galih Andreanto, S.T.P., dan asisten peneliti, M. Ikhsan Rizal Assalam. Terimakasih pada Dini Rahmiati (P2P) dan Cici (INFID) atas bantuan administrasinya. Penghargaan pada semua narsum di DPP maupun DPW/DPD dari 12 parpol atas kesediaan diwawancara dan berbagi dokumen.

Partai politik dipahami sebagai suatu tipe organisasi politik yang berupaya untuk memengaruhi, atau secara keseluruhan berfungsi sebagai pemerintah yang mengerjakan kebijakan politik; biasanya dengan cara menominasikan kandidat-kandidat mereka sendiri dan mendudukkan mereka pada posisi tertentu, baik di pemerintahan, lembaga pemerintahan, bahkan ranah yudikatif. Parpol berpartisipasi dalam kampanye pemilu, melakukan sosialisasi dengan publik atau konstituen, dan mengkritik tindakan atau keputusan pemerintah. Parpol seringkali mendukung satu posisi ideologis, atau visi, yang diwujudkan dalam program partai, serta dipertegas oleh suatu platform tertulis dengan tujuan-tujuan khusus, membentuk koalisi di antara kepentingan-kepentingan politik yang berbeda.<sup>2</sup>

Berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu pasca Orde Baru tahun 1999, 2004, 2009 kita melihat bahwa partai politik, selain menjadi sumber rekrutmen posisi dalam birokrasi, dapat menjadi mitra kerja pemerintah dan pengawas pemerintah ketika mereka nantinya terpilih sebagai wakil rakyat di DPR, DPRD dan juga di berbagai lembaga pemerintahan (eksekutif). Secara jelas, partai politik dan wakilnya di DPR berwenang dalam hal:

1. UU APBN yang mengesahkan rencana belanja dan alokasi anggaran;
2. Menilai jalan atau tidak kebijakan dan program pemerintah;
3. Mengusulkan cara baru atau ukuran baru dalam menilai berhasil tidaknya pembangunan;
4. Wakil-wakil partai politik menjadi kepala daerah dan dengan demikian berkesempatan untuk mengubah atau memperbaiki praktik pelayanan publik di pemerintah.

Dalam dimensi solusi, kita melihat bahwa posisi wakil-wakil parpol di berbagai lembaga eksekutif (kementerian) memiliki peluang untuk mendorong rencana pembangunan yang lebih inklusif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang semakin riil dirasakan rakyat Indonesia, baik ketimpangan ekonomi (pendapatan) maupun ketimpangan non ekonomi (akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap fasilitas pendidikan, gender, dan lainnya).

<sup>2</sup> Lihat, P.H. Collin, *Dictionary of Politics and Government*, London: Bloomsbury Publishing, 2004.

Posisi parpol dalam studi ini diletakkan dalam konteks dinamika ekopol di Indonesia, di mana ada ketimpangan ekonomi dan non ekonomi (atau seringkali disebut ketimpangan sosial). Ketimpangan ini berlangsung dalam konteks nasional di mana liberalisasi ekonomi pasca 1998 menyebabkan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada modal asing.<sup>3</sup> Situasi tersebut mendorong arus sumber daya mengalir keluar. Dalam konteks desentralisasi, yang berlangsung sejak 1999, semakin jelas bahwa penguasaan sumber daya (alam khususnya) lebih berada di tangan aktor-aktor atau korporat nasional dan lokal selain global, sehingga perspektif untuk mengedepankan keuntungan lebih diutamakan daripada untuk agenda memakmurkan rakyat. Di manakah posisi parpol dalam hal ini?

Saat ini posisi (dan peran) parpol memiliki potensi untuk menjadi lebih kritis dan sensitif, pada isu ketimpangan. Hal ini dimungkinkan sebab telah melampaui periode pemilu multipartai pasca Orde Baru yang berlangsung pada 1999, 2004, dan 2009. Pemilu-pemilu tersebut memperlihatkan bertambahnya jumlah parpol yang di satu sisi merupakan indikasi baik dari terlembaganya aspirasi rakyat ke dalam organisasi politik. Di sisi lain, parpol-parpol dihadapkan pada agenda besar pemilu dan pasca pemilu 2014. Untuk Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan ada dua belas parpol nasional dan tiga parpol lokal sebagai peserta.

Maka idealnya, dengan pengalaman pada pemilu-pemilu yang lalu, terutama dalam posisi dan peran mereka di legislatif maupun eksekutif, parpol-parpol kontestan pemilu 2014 seharusnya berkontribusi pada diskursus mengenai berbagai persoalan ketimpangan ekonomi dan non-ekonomi yang berlangsung.

Hal itu sesuai dengan perspektif teoretik bahwa salah satu kinerja partai politik modern adalah juga diukur dari sejauh mana partai politik menyiapkan diri dan kadernya untuk menjadi *policy makers* yang siap

<sup>3</sup> Ketimpangan dalam studi ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana terjadi perbedaan kondisi yang terjadi pada waktu tertentu. Ketimpangan dalam studi ini dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan ekonomi dan non ekonomi. Ketimpangan ekonomi meliputi ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah (desa-kota, Jawa-luar Jawa), ketimpangan sektoral (formal/informal). Ketimpangan non ekonomi meliputi ketimpangan: akses dan kualitas di sektor kesehatan dan pendidikan; ketimpangan gender (di luar aspek kuota 30% di parlemen), serta ketimpangan dalam hal mobilitas sosial (migrasi, status sosial).

dengan usulan kebijakan termasuk kebijakan mengatasi ketimpangan untuk mendorong dan memajukan kebijakan.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, selain berkuat dengan kesibukan mengurus persiapan teknis, seperti persiapan calon legislatif, kampanye, alat peraga, dan penguatan basis konstituen, parpol juga harus mengedepankan platform politiknya. Yang disebut terakhir juga harus dianggap prioritas selain menyiapkan dan mensosialisasikan program-program keadilan sosial dan ekonomi untuk Indonesia pasca pemilu legislatif dan presiden 2014.

Parpol memang bukanlah asosiasi politik atau ekonomi yang tugasnya menawarkan *panacea* atau obat untuk mengatasi ketimpangan. Justru tugas parpol adalah menyampaikan pada pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya berbicara dalam isu ketimpangan. Di titik ini, kami menemukan, meskipun terdapat platform parpol yang cukup detail dan lengkap mengenai ketimpangan, atau bahkan mengangkat kebijakan dan/atau program terkait ketimpangan, namun hal ini lebih pada aspek relasi parpol tersebut dengan konstituennya dan bukan mencerminkan “posisi utama” parpol itu sendiri.

Dengan ini, maka penting untuk melihat bagaimana di level nasional, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) parpol memaknai masalah ketimpangan itu dari sudut pandang platform mereka. Sedangkan di tingkat lokal (provinsi, kabupaten, kota) bagaimana DPD (Dewan Pimpinan Daerah) maupun DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dari dua belas parpol mempersepsikan isu ketimpangan, apakah merujuk pada platform atau sekedar menguraikan sesuai dinamika konteks lokal? Upaya melihat bagaimana partai politik berbicara tentang ketimpangan menemukan konteks waktunya, karena tahun 2014 merupakan tahun politik yang akan menentukan arah masa depan Indonesia.

Permasalahan studi ini adalah bagaimana partai politik memahami masalah ketimpangan melalui platform partai politik di level nasional? Apakah setiap parpol di daerah provinsi (DPW/DPD) dapat menerjemahkan isi platform mengenai ketimpangan dalam pemahaman yang sama? Atau mereka sekedar merujuk pada situasi yang kontekstual? Apakah parpol memahami platform dan menurunkannya menjadi visi, misi atau kebijakan dan program yang mencerminkan posisinya mengenai ketimpangan?

<sup>4</sup> Lihat IDEA International

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif yang berbasiskan pada wawancara mendalam dengan dua belas parpol di tingkat DPP di Jakarta, dua belas parpol di tingkat DPW di 10 daerah penelitian. Fokus dari analisa dokumen<sup>5</sup> adalah platform parpol di tingkat DPP khususnya tentang isu ketimpangan ekonomi (pendapatan) dan nonekonomi (keadilan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, gender dan lainnya termasuk isu difabilitas).

Sedangkan dari wawancara mendalam dengan pengurus dua belas parpol peserta pemilu di DPD/DPW diperoleh tentang persepsi mereka mengenai platform parpol pada isu ketimpangan, pemaknaan mereka mengenai kondisi ketimpangan sesuai konteks lokal, serta bagaimana mereka melihat posisi dan peran parpol dalam isu ketimpangan di daerah masing-masing.

Ringkasan dari temuan-temuan penelitian di bawah ini menunjukkan dua hal. Pertama, bagaimana dokumen resmi partai --mulai visi-misi di AD/ART, platform atau manifesto, hingga program kerja-- berbicara mengenai isu ketimpangan dan seberapa besar kongruensi persepsi politisi yang diwawancarai dengan dokumen partai tersebut.

Kedua, ringkasan dari pembahasan hasil wawancara di daerah bukan hanya fokus mengenai kondisi ketimpangan yang ada di daerah, tetapi juga mengenai bagaimana pengetahuan dan pemahaman politisi dan kesebangunan kebijakan serta program partai di daerah dengan posisi partai di tingkat nasional dalam isu ketimpangan. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa temuan penelitian.

## **2.2. TEMUAN PENELITIAN**

### **A. Persepsi parpol mengenai ketimpangan**

Di bagian ini akan kita lihat persepsi partai mengenai ketimpangan yang ditelaah dari platform parpol. Apakah parpol melihat bahwa ada ketimpangan ekonomi dan non ekonomi (sosial) di masyarakat kita? Apa bentuknya? Seberapa mendalam ketimpangan tersebut? Faktor apa yang dianggap partai sebab sebagai hulu atau penyebab dari ketimpangan-ketimpangan tersebut? Seberapa tegas dan jelas partai menyatakan hal tersebut?

<sup>5</sup> Dokumen juga mencakup pemaparan di situs (website) resmi parpol.

Platform parpol merupakan dasar utama atas rujukan mengenai makna ketimpangan, bentuknya, serta metode mengatasinya. Sebagaimana telah disinggung di bagian pengantar laporan ringkasan ini, platform parpol umumnya memuat prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh parpol, umumnya berdasarkan afinitas ideologi serta memuat atau diterjemahkan ke dalam visi dan misi serta diwujudkan dalam program atau kegiatan. Namun tidak semua parpol dalam dokumen resminya memuat platform dilengkapi dengan visi dan misi serta bentuk kegiatannya.

Terdapat variasi persepsi parpol dalam platform mengenai ketimpangan. Namun secara garis besar, parpol merujuk pada kondisi ketimpangan ekonomi (pendapatan atau pekerjaan) dan nonekonomi (akses terhadap pendidikan, kesehatan, demografis, gender, hanya sedikit mengemukakan tentang hal ini).

Secara umum, semua partai politik yang menjadi fokus kajian ini: Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKPI, Hanura, PPP, PKB, PAN, PBB dan PKS memiliki platform<sup>6</sup> atau minimal, visi dan misi yang tertera dalam dokumen partai baik cetak maupun yang dapat diakses secara langsung pada website masing-masing parpol.

Umumnya, para pengurus parpol maupun anggota legislatif dari parpol yang terkait menjawab secara beragam. Platform parpol digunakan sebagai dasar utama atas rujukan untuk menjelaskan seperti apa dinamika spesifik yang melatari ketimpangan di daerah, serta apa saja bentuk-bentuk ketimpangan yang ada serta metode mengatasinya. Terdapat variasi persepsi mengenai ketimpangan, namun secara garis besar parpol merujuk pada kondisi ketimpangan ekonomi (pendapatan atau pekerjaan) dan non ekonomi (akses terhadap pendidikan, kesehatan, demografis, gender, hanya sedikit mengemukakan tentang hal ini).

### 1) Partai Nasdem

Visi Partai Nasdem secara tegas menyatakan “mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dengan visi tersebut, maka misi partai ini menegaskan langkahnya dalam menggalang kesadaran

<sup>6</sup> Platform parpol dalam studi ini berarti dokumen yang menyatakan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dari suatu parpol. Lihat juga, Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, NJ: 1999.

dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia.

Jargon politik yang kerap diusung oleh partai ini adalah “Restorasi Indonesia”. Bagi Partai Nasdem, Restorasi Indonesia diartikan sebagai gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari pengertian ini, Partai Nasdem kemudian mengolah empat kata kerja sebagai kata kunci dari konsep “restorasi” yang diusungnya, yaitu: (a) Memperbaiki; (b) Mengembalikan; (c) Memulihkan; dan (d) Mencerahkan.

Kata ketimpangan memang tidak ditemukan secara eksplisit, namun program restorasi di kedua kata kerja ini yang relevan. Pada akhirnya, jargon Restorasi ini bukanlah jalan pintas. Bagi Partai Nasdem, syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh, dan terpadu, melibatkan populasi besar dengan penerahan energi berpikir yang kuat dan terarah dalam jangka waktu panjang.

Dari hasil temuan empirik, isu ketimpangan dikemukakan secara lugas oleh narasumber-narasumber di beberapa daerah. Seperti misalnya di Kalimantan Timur. Di daerah tersebut, narasumber partai ini menyatakan bahwa visi maupun platform Partai Nasdem terkait dengan isu ketimpangan adalah mengacu kepada konsep restorasi itu sendiri. Artinya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia memang harus diubah melalui konsep restorasi secara keseluruhan, meliputi semua aspek, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pernyataan yang sama juga ditemukan di Jawa Tengah. Platform Nasdem di Jateng lebih mengacu kepada restorasi pembangunan Indonesia demi kesejahteraan umum masyarakat.

Di Nusa Tenggara Timur juga memiliki persepsi yang hampir sama. Bagi partai Nasdem di NTT, visinya lebih luas, yaitu menjadikan Indonesia yang merdeka, sebagai negara bangsa yang berdaulat secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Dari sini bisa dilihat bahwa jargon restorasi yang telah diusung oleh Partai Nasdem sejak awal memang mengakar hingga ke daerah.

Contoh lainnya dapat dilihat di Jawa Timur. Platform Partai Nasdem di bidang ekonomi terutama yang berkepentingan dengan rakyat.

Artinya partai Nasdem di Jawa Timur lebih mengedepankan bagaimana memberdayakan petani, nelayan, buruh, dan sebagainya, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya import dari luar negeri.

## 2) PKB

Dari penelusuran mengenai platform PKB, dokumen yang relevan dengan studi ini adalah AD/ART dan *Mabda' Syiasi*. Kedua dokumen memuat landasan keorganisasian partai. Dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan ekonomi dan sosial, pada pasal 7 Anggaran Dasar partai disebutkan tiga poin tujuan partai, dan yang berkaitan dengan konteks tulisan ini adalah tujuan “mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual”.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PKB melakukan usaha di bidang ekonomi, yaitu “menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis”.<sup>8</sup> Pada konteks ketimpangan sosial, PKB melakukan usaha di bidang pendidikan. Usaha tersebut dilakukan dengan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.<sup>9</sup>

Sementara pada bidang sosial dan budaya, PKB berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat. Selain itu, di dalam isi AD/ART tidak ada penjelasan pandangan partai mengenai pemberdayaan perempuan. Untuk konteks pemberdayaan, yang tercantum di dalam isi AD/ART hanya sebatas adanya suatu badan otonom untuk kaum perempuan, yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB).

Pada *Mabda' Syiasi* sebagai landasan ideologis partai, dijelaskan bahwa PKB bercirikan humanisme religius yang berarti peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis.<sup>10</sup> Dokumen *Mabda' Syiasi* hanya memuat pandangan umum PKB mengenai masyarakat yang ideal.

<sup>7</sup> Lihat pasal 7 poin (c) Anggaran Dasar PKB.

<sup>8</sup> Lihat pasal 8 Anggaran Dasar PKB.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Anonim. *Mabda Syiasi*. Diakses dari <http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syasi> pada tanggal 17 Maret 2014.

Sementara itu, bentuk turunan ataupun penjelasan dari ekonomi kerakyatan atau bentuk pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan tersebut tidak ditemui disepanjang isi AD/ART. Penjabaran mengenai ekonomi kerakyatan baru ditemui pada buku “*Seminar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Legislatif-Eksekutif Kader Partai Kebangkitan Bangsa*”.<sup>11</sup> Dalam buku tersebut, beberapa persoalan ekonomi yang disoroti adalah masalah anggaran (*Pro-Poor Budget*). Pemetaan masalah yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa APBD cenderung disusun atas dasar kepentingan politik dan bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan daerah setempat.<sup>12</sup>

Pada persoalan ketimpangan sosial, PKB lebih menyoroti persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan mengerucut pada masalah liberalisasi pendidikan. Masalah ini seperti mahalnya biaya pendidikan, anggaran pendidikan yang belum memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas dan infrastruktur pendidikan. Di lain soal, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD belum ikut dinikmati oleh sekolah dan perguruan swasta.<sup>13</sup>

Dalam konteks kesehatan, permasalahan yang dipetakan adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah, harga obat, dan infrastruktur. Strategi penyelesaian dalam hal ini adalah, seperti, desakan terhadap pemerintah untuk memberikan standar pelayanan kesehatan minimum bagi masyarakat menengah ke bawah dan mendorong anggaran kesehatan dan jaminan sosial yang bersifat permanen dan advokasi kesehatan.

### 3) PKS

Platform pembangunan PKS menyatakan “mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera”. Berdasarkan platform yang dikeluarkan pada tahun 2008, PKS dengan cukup jelas menunjukkan aspek-aspek apa yang harus menjadi prioritas pembangunan. Dalam bidang ekonomi dan

<sup>11</sup> Syamsuddin Haris et al., eds. 2011. *Seminar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Legislatif-Eksekutif Kader Partai Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: P2P LIPI dan DPP PKB). Buku tersebut merupakan bentuk dokumentasi hasil seminar dan pelatihan kader PKB, terutama anggota legislatif PKB di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan yang duduk di birokrasi pemerintahan daerah, serta anggota Dewan Pengurus Pusat PKB.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 33

sosial budaya, PKS mendorong reformasi agar pembangunan terhindar dari rente. Ekonomi syariah juga menjadi salah satu sektor yang perlu dikembangkan terutama dalam rangka mendorong munculnya para wirausahawan handal.

Pandangan PKS terhadap industrialisasi dan peranan ekonomi pasar cukup positif. Pemerintah diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam bidang kesehatan, PKS mendukung sistem kesehatan nasional yang terintegrasi. Sementara dalam bidang pendidikan PKS menyetujui anggaran pembangunan 20% agar pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas bisa digratiskan.<sup>14</sup> Bagaimana platform nasional ini dipersepsikan di daerah?

Mengenai visi dalam mengatasi ketimpangan sosial, pengurus PKS Sumut<sup>15</sup> berpendapat bahwa partainya mempertimbangkan lima hal ini: *character building*, *social building*, *institutional building*, *nation building*, dan *political building*. Pengurus PKS di daerah lain, umumnya berpendapat bahwa partai seharusnya memang bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun tidak mengartikulasikannya dalam bahasa yang seragam, mereka menyadari bahwa ketimpangan sosial memang berada di daerah mereka dan, oleh karena itu, partai harus berusaha mengatasinya.

Pada akhirnya, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang dibayangkan oleh PKS berujung pada terbentuknya “masyarakat madani”, sebuah konsep yang secara historis mengacu pada masyarakat Madinah yang dibangun dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para peneliti, terungkap bahwa ketimpangan antar-wilayah juga menjadi bahan perhatian kader PKS, seperti dikemukakan oleh pengurus PKS Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Di Jawa Barat, daerah selatan tertinggal dari daerah lainnya. Infrastruktur di sana masih sangat terbatas. Selain itu, posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta membawa persoalan tersendiri. Daerah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) adalah daerah Jawa Barat yang perkembangannya sangat berkaitan dengan DKI Jakarta. Oleh karena itu kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah DKI sangat

<sup>14</sup> Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (Jakarta, MPP PKS: 2008)

<sup>15</sup> Wawancara dengan Satria Yudha Wibowo, Medan, 4 Februari 2014.

diperlukan. Selain itu, perbedaan fasilitas infrastruktur pembangunan antara daerah selatan dan tengah serta utara juga perlu diatasi. Daerah selatan lebih tertinggal daripada daerah lainnya.

Di Sulawesi Selatan, pembangunan terpusat di Makassar. Ketimpangan infrastruktur antara Makassar dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan sangat terasa. Persoalan ketimpangan wilayah ini sangat terkait dengan ketimpangan ekonomi. Di daerah-daerah yang tertinggal, pengurus PKS mengusulkan agar ditumbuhkan investasi sehingga ada penyerapan tenaga kerja.

Ketimpangan regional juga terjadi di Jawa Timur, seperti antara daerah tapal kuda dan dan Madura dan nontapal kuda dan Madura. Probolinggo dan Sampang termasuk kabupaten termiskin di Indonesia. Kader PKS di kedua daerah tersebut berusaha mengadvokasi kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang sangat rendah. Kader PKS juga membuka komunikasi dengan Gubernur Sukarwo baik secara formal maupun informal.

#### 4) PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki salah satu misinya dijabarkan ke dalam Dasa Prasetiya. Lima dari sepuluh arah umum program partai, atau yang lebih dikenal dengan Dasa Prasetiya, berkaitan langsung dengan isu ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebagai partai yang mengklaim partainya *wong cilik*, lima hal di bawah ini merupakan misi yang patut dicermati:

1. **Pertama**, memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan.
2. **Kedua**, menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat.
3. **Ketiga**, membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat.
4. **Keempat**, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah.
5. **Kelima**, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> "Dasa Prasetiya", dalam <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12>,

Selain itu, Rakernas III PDI Perjuangan yang diselenggarakan tahun 2013 juga merekomendasikan beberapa hal untuk mengatasi persoalan ketimpangan.<sup>17</sup> Platform PDI Perjuangan terkait isu ketimpangan sebenarnya telah tercantum dalam AD-ART partai yang mengacu pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Partai yang memiliki semboyan “Bekerja Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” ini, berharap jangan sampai ketimpangan terlalu tajam sebab semua warga negara mempunyai hak yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh Sudarno, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, “... sebenarnya tugas partai membuat dikotomi miskin-kaya menjadi tipis, bukan tidak ada. Sebenarnya kita lebih *concern* kepada soal kemiskinan, bukan mengurus yang kaya-kaya karena tugas partai menjamin bagaimana orang Indonesia tidak ada yang miskin.”

Menurut PDI Perjuangan, seharusnya Indonesia ini hebat. Sebab memiliki sumber daya alam yang besar, hanya saja terjadi salah urus negara. Visi dan misi PDI Perjuangan, bertolak pada Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Pembahasan mengenai Trisakti disebut dalam dokumen “Jalan Menuju Kemenangan” yang diterbitkan DPP. Salah satunya adalah program ekonomi kerakyatan yakni seluruh sumber daya alam ini dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, dan diatur oleh negara lewat pemerintah. Apakah Wawancara dengan narasumber dari DPD PDI-P di daerah-daerah memperlihatkan pemahaman yang cukup komprehensif tentang memahami platform nasional ini?

Sudarno, menyoroti masalah secara khusus bahwa ketimpangan pendapatan yang dialami oleh petani bersumber dari ketimpangan infrastruktur. Di Jawa Timur Timur, rendahnya indeks pendapatan petani, hanya 17 persen disebabkan sektor pertanian bukan sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Sementara sektor penunjang utama adalah sektor jasa dan perdagangan.

Kondisi ini juga terjadi di Lampung, di mana infrastruktur termasuk jalan yang rusak, misalnya berimbas pada mahalnya harga pupuk. Para petani melakukan siasat agar tidak ada pembengkakan biaya, dengan

<sup>17</sup> “Ini 17 Butir Rekomendasi Hasil Rakernas III PDIP 2013”, dalam <http://www.merdeka.com/politik/ini-17-butir-rekomendasi-hasil-rakernas-iii-pdip-2013/rekomendasi-butir-1-6.html>,

cara melakukan pengoplosan pupuk, seperti yang terjadi di Lampung. Akhirnya, hasil pertanian tidak bagus, dan berujung pada pendapatan. Sementara di lain pihak, persoalan buruknya infrastruktur disinyalir sebagai akibat dari korupsi.

Ketimpangan pembangunan fisik dan infrastruktur antar wilayah Kabupaten/Kota juga terjadi di Maluku Utara. Akibatnya, distribusi APBD tersedot dalam pemulihan infrastruktur. Ketimpangan tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, melainkan juga terjadi di bidang kesehatan, antara lain pemegang kartu jamkesda dan jamkesmas di rumah sakit maupun di puskesmas masih belum memperoleh pelayanan maksimal. Penyebabnya, antara lain, rumah sakit maupun puskesmas masih memandang bahwa mereka sebagai orang miskin yang berobat secara gratis.

Sementara itu, ketimpangan di bidang pendidikan juga terjadi antara perkotaan dengan pedesaan. Fasilitas pendidikan di desa yang tidak memadai, ruang kelas reyot, jalan rusak, kualitas gurun rendah, dan lain-lain. Terkait dengan kualitas guru, sebenarnya pemerintah telah melakukan program sertifikasi untuk meningkatkan kualitasnya, akan tetapi kenyataannya di beberapa wilayah sertifikasi guru tidak berkorelasi dengan kualitas anak didik. Di Kaltim, misalnya, menurut pandangan Sudarno, sertifikat guru ditengarai hanya meningkatkan kesejahteraan guru.

Dari wawancara dengan DPD PDI-P, kebijakan atau program partai yang dikeluarkan oleh DPP, biasanya diadopsi oleh daerah dengan disesuaikan kebutuhan atau persoalan yang ada di tingkat lokal. Meskipun secara teknis ada perbedaan implementasi program antara satu DPD dengan DPD yang lain, tetapi dapat dilihat benang merahnya. Sebagai partai politik, ketika mengimplementasikan program bukan berarti tidak ada kendala. Kendala seperti keterbatasan finansial juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, apalagi selama 10 tahun terakhir PDI-P mengklaim sebagai partai oposisi atau penyeimbang pemerintah.

## 5) GOLKAR

Bagaimana dengan Partai Golkar? Doktrin Golkar, “Karya Siaga Gatra Praja” sebagai pedoman dasar karya dan kekaryaan menegaskan *weltanschauung* Golkar sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.<sup>18</sup>

18 Bab V, Doktrin, Ikrar, Paradigma, Bagian Kesatu Doktrin Ps. (10) dalam Hasil Munas... .hlm.11.

Golkar di masa Reformasi menyebut diri sebagai partai reformis, dengan mengubah paradigma dan menegaskan diri sebagai parpol pada Rapim Golkar 19 Oktober 1998 di Jakarta, “Sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas dan demokratis.”<sup>19</sup> Hasil Munas Golkar VIII tahun 2009 menyebutkan bahwa “Suara Golkar Suara Rakyat”.<sup>20</sup> Golkar menyebut cita-cita perjuangannya adalah “tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuai dengan Ikrar Partai Golkar yaitu “Panca Bhakti” butir (4): “Kami warga Partai Golkar bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat, untuk membangun masyarakat adil, tertib, makmur dan sentausa”.<sup>21</sup> Dengan paradigma tersebut salah satu fungsi Partai Golkar adalah “menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.<sup>22</sup>

Di bidang ekonomi, visi Partai Golkar adalah ekonomi kerakyatan sebagai potensi untuk memperkuat basis ekonomi, dan menjamin perwujudan kesejahteraan. Dalam dokumen “Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan” Golkar memberi penekanan prioritas pembangunan pada sektor: Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Pertanaian, Kelautan, Infrastruktur, UMKM dan Koperasi. Golkar tidak menyetujui ekonomi konglomerasi yang justru menyebabkan krisis ekonomi.<sup>23</sup> Oleh sebab itu Golkar mendukung dan mengembangkan UKM dan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional, sekaligus alat pemberdayaan rakyat.<sup>24</sup>

Di bidang nonekonomi atau sosial budaya, cita-cita Golkar adalah penguatan budaya yang dapat menghasilkan bangsa yang beriman, bertakwa, menguasai iptek dan ketrampilan, memiliki etos kerja tinggi,

<sup>19</sup> Anggaran Dasar (AD) Bagian Kesatu, Pembukaan, dalam “*Hasil Munas Partai Golkar Tahun 2009*” (Jakarta: Sekjen DPP Partai Golkar, 2009), hlm. 7.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.1.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. X.

<sup>22</sup> Bab IV, tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Bagian Ketiga, Fungsi, Psl.(9). Hasil Munas..., hlm. 11.

<sup>23</sup> Paradigma Baru Partai Golkar, III. Visi Perjuangan, Hasil Munas..hlm., 90-91.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 91. Lihat juga tentang koperasi dalam <http://partaigolkar.or.id>

disiplin. Pluralitas, toleransi, dan kerukunan adalah basis integrasi bangsa.<sup>25</sup> Golkar mencantumkan agenda penting “terwujudnya kehidupan sosbud yang berkeadilan serta terjembatannya kesenjangan sosial antara Jawa dengan luar Jawa, antara pusat dengan daerah”.<sup>26</sup>

Secara umum, di semua wilayah riset DPW Golkar memahami “negara kesejahteraan” sebagai rujukan parpol ketika berbicara masalah penanganan ketimpangan ekonomi dan sosial. Narasumber dari DPW Golkar baik di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara dan NTT dengan tegas mengutip visi Golkar mengenai negara sejahtera 2045 untuk Indonesia.

Pengurus DPW Golkar NTT menyampaikan bahwa Golkar mengatasi ketimpangan berlandaskan *blueprint* Menuju Negara Sejahtera tahun 2045 yang diturunkan menjadi program oleh kader-kader di DPR RI, provinsi, dan kabupaten.

Bagi Golkar, prinsip pertumbuhan wajib diwujudkan guna meningkatkan kapasitas ekonomi. Namun, pertumbuhan itu harus simultan dengan aspek pemerataan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Kunci untuk mencapainya adalah stabilitas politik. Selain itu, Golkar juga menekankan “Nasionalisme Baru”: kepribadian Indonesia di tengah globalisasi. Artinya, menurut narsum DPW Golkar NTT, “Kita tidak boleh terhanyut pada tren globalisasi, lalu tercabut dari akar keindonesiaan kita.” Selain itu, Golkar juga berjuang untuk mengembalikan GBHN sebagai haluan dalam memajukan pertumbuhan Indonesia.

Menurut narsum DPW NTT, GBHN adalah acuan utama untuk terhindar dari *conflict of interest* karena disusun secara netral. Narsum dari DPW Golkar Makassar menyebutkan visi partai Golkar adalah, “Berjuang mempertahankan bangsa ini utuh sebagai NKRI dengan berupaya mensejahterakan rakyat. Ini dijabarkan dalam pelbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.”<sup>27</sup>

Sedangkan DPW Golkar dari Maluku Utara (Malut) berkesimpulan visi Golkar mengakomodir pluralisme sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Selain itu, menurutnya, sesuai visi sebagai Negara Kesejahteraan Golkar menjembatani ketimpangan kawasan Indonesia timur menjadi

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mohammad Roem, Wakil Ketua 1 Golkar Sulawesi Selatan 10 Februari, 2014, DPRD Kota Makassar

beranda depan bangsa menuju pasar bebas khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dua narsum dari DPW Golkar di Jatim<sup>28</sup> menyebutkan bahwa perwujudan visi Golkar tentang kesenjangan tidak lepas dari pada masalah pendidikan. Kedua narsum dari DPW Golkar Jatim menganggap ada ketimpangan di Indonesia maupun di daerahnya. Meskipun Jawa Timur termasuk provinsi yang surplus, di sektor ekonomi dan pangan; selain merupakan satu-satunya propinsi yang punya peta tentang data kemiskinan. Penyebab ketimpangan menurut DPW Jatim adalah masalah ego sektoral.

Senada dengan itu, DPW Jabar melihat di daerahnya masih ada ketimpangan ekonomi dari sisi pendapatan dan ketimpangan akses pendidikan, akses kesehatan. Ketua DPW Golkar Sumut Ajib Shah memahami visi ataupun platform parpol mengenai ketimpangan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup> Ajib Shah melihat di Sumut terjadi ketimpangan. Dan ketimpangan di Sumut merupakan isu kompleks yang tidak terlepas dari persoalan nasional. Hampir semua sektor merata mengalami ketimpangan: tingkat pengangguran yang tinggi dan akses ke sumber daya energi listrik.

Di NTT narsum juga melihat terjadi ketimpangan ekonomi di mana pendapatan antara rakyat jelata dan kelompok menengah ke atas semakin besar. Hal ini berimplikasi pada disparitas yang semakin lebar. Menurutnya, ketimpangan non ekonomi masih tampak pada sektor kesehatan, pendidikan dan lainnya sebagaimana di seluruh daerah di Indonesia.

“Pada umumnya, kesenjangan di bidang kesehatan ada di seluruh kabupaten/kota di NTT. Golkar mengapresiasi kebijakan JKN yang dicanangkan pemerintah. Namun, pada tataran implementasi, kecenderungan pihak swasta (Rumah Sakit) masih enggan untuk bergabung. Itu artinya, pada dimensi pelaksanaan dari program JKN harus dibenahi secara baik”.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Zainuddin Amali dan Freddy Purnomo, DPW Golkar Jatim, wawancara 5 Februari 2014.

<sup>29</sup> Ajib Shah, Ketua DPW Golkar Sumatera Utara wawancara 4 Februari 2014. Menurutnya tujuan partai adalah merebut kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<sup>30</sup> Wawancara dengan DPW Golkar NTT.

## 6) GERINDRA

Partai Gerindra memiliki platform ekonomi kerakyatan yang dimuat dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra.<sup>31</sup> Dalam deklarasinya, Partai Gerindra menyatakan visi dan misi serta manifesto perjuangan partai adalah terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia merdeka, berdaulat, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sesuai dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Partai Gerindra memiliki visi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan visi tersebut maka dalam operasionalnya Partai Gerindra merumuskan misi partai yang terdiri dari lima poin.<sup>32</sup>

Secara nasional kebijakan visi partai Gerindra tersebut untuk mengurangi ketimpangan khususnya perekonomian, seperti yang diungkapkan oleh DPP Gerindra Jakarta.<sup>33</sup> Upaya mereka untuk mengurangi ketimpangan adalah memmanifestasikan enam program aksi terutama melaksanakan ekonomi kerakyatan. Program partai yang diwujudkan dalam enam program yang telah diuraikan di atas juga diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi (DPP Gerindra Lampung).<sup>34</sup> Lebih lanjut dalam visi tersebut merupakan program untuk mengatasi ketimpangan yang ada, dan untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu adanya disusun skema perekonomian.

<sup>31</sup> Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. <http://partaiGerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-Gerindra>. Diakses pada 30 Januari 2014.

<sup>32</sup> Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya. <http://partaiGerindra.or.id/deklarasi-partai-gerakan-indonesia-roya>. Diakses pada 30 Januari 2014. Kelima poin tersebut:

- (1) Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- (2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing;
- (3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat;
- (4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum;
- (5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 106

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pattimura Ketua DPP Gerindra Propinsi Lampung

Adapun skema perekonomian tersebut adalah melalui pembentukan koperasi. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh DPP Gerindra Jatim.<sup>35</sup> Pembentukan koperasi ini akan memperkuat kemandirian dan kedaulatan nelayan dan petani. Hal ini sangat beralasan karena hingga saat ini bangsa Indonesia belum berdaulat pangan. Partai Gerindra telah memiliki program yang dijalankan di masyarakat, namun juga masih dalam tahap wacana. Namun, program yang dijalankan oleh Partai Gerindra sebagian besar masih bertumpu pada program dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Oleh karena itu diperlukan kreativitas program di tingkat provinsi.

Di DPP Maluku Utara, peneliti tidak bisa mengakses dokumen program yang telah dilaksanakan, padahal dokumen program tersebut sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dan program apa saja yang telah dilaksanakan.

## 7) Demokrat

Partai Demokrat mempunyai dokumen umum dan dokumen yang secara spesifik membahas isu kemiskinan. Beberapa dokumen yang dapat digunakan untuk melihat konsep partai mengenai isu ini, yaitu: Anggaran Dasar Partai Demokrat, termuat beberapa poin yang berkaitan dengan isu ketimpangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam dokumen tersebut, Partai Demokrat menyebutkan mengenai kewajiban warga negara untuk memperjuangkan usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dokumen ini juga beberapa kali menyebutkan tiga konsep yaitu, nasionalisme, humanisme, dan pluralisme. Tiga konsep ini disampaikan dalam paparan umum sekaligus sebagai tiga wawasan partai yang tercantum dalam “Doktrin Demokrat”, yakni “Tri Pakca Gatra Praja”.

Dalam dokumen Kode Etik Partai Demokrat, partai yang telah berkuasa sepuluh tahun ini memuat poin-poin yang dapat dijadikan referensi untuk membaca konsep partai ini mengenai isu ketimpangan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Wawancara dengan Faf Adisiswo, DPP Gerindra Jawa Timur, pada hari Rabu 5 Februari 2014.

<sup>36</sup> Kode etik PD secara umum banyak mengemukakan konsep partai yang menolak diskriminasi baik untuk anggota partai atau masyarakat. Dalam “standar minimal prinsip anti-diskriminasi” misalnya, partai menekankan soal kesetaraan gender, penempatan posisi, pemberian bantuan, penerapan reward and punishment, dan akses sumber daya.

Pada dokumen visi dan misi, tercantum harapan agar Indonesia mencapai kedaulatan yang adil dan makmur.<sup>37</sup> Dalam dokumen Strategi Besar 2005-2010 dikemukakan soal perjuangan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat yang sama Strategi Besar tersebut juga menyebutkan upaya mengikis angka pengangguran lewat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspor nonmigas.

Dalam buku saku program PD, penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh DPP Demokrat secara spesifik membahas program-program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan Partai Demokrat dalam program-program pemerintah. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional. Oleh karenanya, pemerintah membuat program-program pro-rakyat yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.

Beberapa program yang dimasukkan ke dalam kategori itu adalah: PNPM, Jamkesmas, Raskin, BOS dan KUR. Bahasan tentang platform dari beberapa dokumen di atas tercermin dari persepsi narsum wawancara di daerah penelitian.

Jika dicermati, ada satu dokumen yang dapat memberikan gambaran rinci konsep Partai Demokrat merespon isu ketimpangan. Buku saku Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan DPP Demokrat tersebut dapat dengan jelas merujuk program-program pemerintah yang diklaim pro rakyat. Namun, temuan lapangan menunjukkan sedikitnya kader (atau malah tidak ada) yang merujuk dokumen tersebut ketika menjawab isu ketimpangan. Jawaban lebih banyak berasal dari penalaran yang bersifat individual. Sehingga sulit untuk dapat menarik benang merah jawaban-jawaban tersebut apalagi untuk mencari kerangka berpikir tertentu yang merefleksikan organisasi. DPW Demokrat Jawa Barat melihat bahwa visi Partai Demokrat untuk mengatasi masalah ketimpangan adalah sinergi antara eksekutif dengan sektor privat.

<sup>37</sup> Lebih lanjut, misi partai mengemukakan upaya perwujudan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan. Misi partai juga kembali membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks Jawa Barat, DPW melihat ketimpangan pendidikan, kesehatan, dan regional sebagai masalah yang utama. Persoalan itu dapat ditangani jika kader Partai Demokrat turut aktif mengawasi program pengentasan ketimpangan.

Di Sumatera Utara, DPW Demokrat mengajukan konsep yang berbeda. Visi Partai Demokrat dalam menjawab masalah ketimpangan adalah pemerataan.<sup>38</sup> Di wilayah ini, ketimpangan regional adalah isu yang paling krusial. Infrastruktur di Pantai Barat tertinggal dibandingkan dengan Pantai Timur. Kondisi ini memiliki implikasi lebih lanjut pada pembangunan ekonomi yang juga timpang di kedua wilayah tersebut. Untuk memecahkan persoalan tersebut, DPW Demokrat Sumatera Utara melihat peran aktif anggota DPRD partai menjadi solusi yang utama.

Masalah pemerataan juga dikemukakan oleh DPW Demokrat Jawa Tengah. Meskipun tidak dapat mengemukakan visi dengan jelas, ketiadaan pemerataan ekonomi merupakan isu yang paling disoroti Partai Demokrat di wilayah ini. Kondisi ini diperburuk politisasi yang terjadi pada program-program pemerataan.

Di Nusa Tenggara Timur, DPW Demokrat merujuk pada pelaksanaan program pro-rakyat sebagai bukti keseriusan Partai Demokrat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Meskipun demikian, menurut DPW tersebut tidak ada ketimpangan pendapatan serius di NTT. Kalaupun ada, yang jelas terlihat secara nyata hanyalah ketimpangan di wilayah kota dan pedesaan. Solusi untuk masalah-masalah ini dapat dilihat program-program partai di tingkat nasional. Program-program tersebut mencakup empat bagian yang mencakup pertumbuhan ekonomi, lingkungan, penanggulangan kemiskinan, dan pro rakyat.

DPW Demokrat Jawa Timur memiliki pemahaman yang paling baik mengenai isu ketimpangan. DPW Demokrat Jawa Timur mengemukakan bahwa pada dasarnya ketimpangan merupakan konsekuensi orientasi pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angka koefisien *gini*-nya masih lebih rendah dari provinsi lain seperti Banten, DIY, dan DKI Jakarta<sup>39</sup>. Lebih lanjut, DPW Demokrat Jawa Timur juga mengemukakan

<sup>38</sup> Penggunaan konsep pemerataan juga dapat ditemukan dalam Strategi Besar 2005-2010 yang telah dsampaikan di bagian awal tulisan ini.

<sup>39</sup> Data akurat dan sudah dikonfirmasi pada booklet keluaran BPS pada November 2012

pentingnya peran *civil society* selain intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan.

## 8) PAN

Asas PAN adalah “akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”. Dalam situs resminya, PAN menyebut diri sebagai partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara, yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.<sup>40</sup>

PAN lahir berbasiskan pada nilai agama. Namun demikian, PAN mendeklarasikan sebagai partai terbuka bagi warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dengan beragam latar belakang pemukiman, etnis, agama dan mandiri. Dalam visi politiknya, PAN memosisikan diri sebagai *an avant garde of political party* untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara demokratis berdaulat. Untuk mewujudkannya PAN mempunyai misi sama dengan partai-partai politik reformis di mana dalam hal ekonomi dan sosial mencantumkan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Partai ini mendasarkan perjuangannya pada partai dan kemenangan pemilu, pengkaderan, dicintai rakyat serta membangun organisasi partai modern. PAN tidak secara tegas menyebutkan metode untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial itu. Meskipun, PAN mengklaim mengedepankan keadilan dalam mengelola sumber daya untuk rakyat Indonesia. Inilah tampaknya alasan PAN mendorong Reforma Agraria (RA). Dalam AD/ART PAN menyebutkan bahwa manusia diberi amanat oleh Allah Tuhan YME untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran.<sup>41</sup> Namun “disebabkan oleh pandangan manusia yang hanya melihat aspek materi dalam peradaban, maka lahirlah ketimpangan ‘moral’, yang menjadikan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat diperoleh dari kesusahan yang lainnya.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> [www.pan.or.id](http://www.pan.or.id)

<sup>41</sup> AD/ART PAN 1881, Mukaddimah, hlm. 1.

<sup>42</sup> Ibid.

## 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Penelusuran terhadap dokumen AD-ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperlihatkan bahwa PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan budaya.<sup>43</sup> Program pembangunan kesejahteraan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan merata.<sup>44</sup>

PPP mencita-citakan demokrasi ekonomi seperti tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Pembangunan didorong merata dengan mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran golongan tertentu. Kader didorong untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya membiayai kepentingan umum lewat skema wakaf, zakat, infak dan sedekah.

PPP mengklaim berpihak pada ekonomi kerakyatan. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus ada dalam penguasaan negara. Peran BUMD dan BUMN harus dimaksimalkan demi terwujudnya kemandirian perekonomian nasional.

PPP juga memperjuangkan penghapusan marjinalisasi dan kolonialisasi budaya lokal baik atas nama agama apapun.<sup>45</sup> Kenyataannya transfer nilai-nilai seperti tercantum dalam program perjuangan partai ini belum sepenuhnya efektif. Terlihat dari beragamnya pemaknaan yang muncul dari sepuluh wilayah yang dijadikan objek penelitian.

Di lampung misalnya, narasumber menyebutkan bahwa partainya tidak mempunyai pandangan khusus mengenai ketimpangan sosial. Menurutnya, pemahaman itu sudah inheren dalam benak masing-masing kader. Program aksi yang dilakukan juga merupakan program inisiatif kader. Sayang sekali sepertinya narasumber sulit membedakan antara program perjuangan partai dengan kegiatan kampanye caleg.

Temuan wawancara di Jawa Timur memperlihatkan partai lebih banyak mengklaim bahwa usaha-usaha partai mereka dalam menanggulangi ketimpangan sosial itu dilakukan kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan strategis (legislator). Fokusnya adalah memperjuangkan Perda atau Anggaran yang pro kesetaraan. Pandangan ini senafas dengan yang disebutkan oleh pengurus partai di Makassar.

<sup>43</sup> AD-ART PPP (2013), Bab III Tujuan dan Usaha, Pasal 6 (e).

<sup>44</sup> Butir D/Visi Partai. Alenia 7. Ibid hal 90.

<sup>45</sup> <http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/>

Di Jawa Tengah, narasumber justru menyebutkan bahwa PPP tidak siap berbicara mengenai isu ketimpangan sosial karena dalam posisi tidak siap menghadapi isu ketimpangan. PPP lebih banyak fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan agama, misalnya tentang UU Perkawinan.

Keberhasilan yang dibanggakan adalah mengenai kuota 39% caleg perempuan yang dimaknai sebagai kesetaraan gender. Seringkali dalam prakteknya di lapangan, pandangan kader PPP mengenai ketimpangan masih bersifat sangat normatif. Seperti terjadi di Maluku Utara. Di Malut, narasumber menyebutkan bahwa pandangan partai mengenai ketimpangan sosial adalah pemahaman historis mengenai hasil-hasil pembangunan yang harus bermanfaat serta tidak disalahgunakan.

Di Jawa Barat, jawaban yang didapat tak kalah aneh. Menurut narasumber, cara mengatasi kendala ketimpangan sosial adalah dengan cara kembali ke akhlak. Program mengatasi ketimpangan sosial adalah program memperbaiki akhlak.

Di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, narasumber mengalami kesulitan menterjemahkan nilai-nilai dalam program perjuangan partai ke tindak operasional. Mereka hanya sebatas memaknai bahwa PPP harus bersungguh-sungguh menumbuhkan nilai-nilai keagamaan, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Hanya di NTT narasumber menyebutkan bahwa pandangan PPP mengenai ketimpangan itu sudah tertuang di AD/ART partai. Meskipun begitu, ada sesuatu yang rancu ketika narasumber pengurus partai di NTT menyebut bahwa perbedaan pandangan politik di masyarakat NTT merupakan bagian dari ketimpangan sosial.

## 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

Partai Hanura memiliki visi dan misi sebagai basis perjuangan.<sup>46</sup> Di antara visi tersebut antara lain, adanya kemandirian bangsa di tengah tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Sementara misi yang dibangun oleh Hanura berkaitan dengan isu ketimpangan antara lain menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik

<sup>46</sup> Visi dan Misi Partai Hanura, dikuti dari [www.hanura.com/pages/display/visimisi](http://www.hanura.com/pages/display/visimisi) diakses pada 13 Maret 2014.

yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa; membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Sejauh mana pengurus DPW di daerah memahami platform nasional Hanura? Ditegaskan oleh DPW Hanura di Sumatera Utara, Abdul Muluk Siregar, Wakil Ketua DPW Sumatera Utara. Visi Hanura adalah merepresentasikan suara rakyat, dengan tidak mengkhianati mereka. Sebagai representasi rakyat, misi yang diemban pun memiliki sifat bersih, peduli, dan tegas. Salah satu bukti bahwa Hanura menjadi representasi suara rakyat dan memiliki sikap “bersih” adalah dengan tidak adanya kader-kader Hanura di legislatif, baik daerah maupun pusat yang terjerat korupsi.<sup>48</sup> Selain itu, ekonomi kerakyatan sebagai bentuk realisasi platform Hanura untuk menyejahterakan rakyat juga coba dikedepankan. Maksud menyejahterakan masyarakat tidak hanya terbatas persoalan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan dan akses terhadap kesehatan.<sup>49</sup>

Di sisi sisi lain, ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan di sini adalah gerakan ekonomi yang dikhususkan kepada masyarakat lapis bawah, seperti ibu-ibu rumah tangga dan komunitas-komunitas yang membutuhkan.<sup>50</sup> Mengapa kesejahteraan ekonomi? Hal ini didasarkan oleh asumsi DPW Hanura di beberapa daerah, yang menganggap bahwa masih terjadi ketimpangan di pelbagai aspek.

Bagi DPW Hanura Sumatera Utara, misalnya, persoalan utama ketimpangan sosial dan ekonomi tersebut adalah pelayanan kesehatan.<sup>51</sup> Di Jawa Timur, DPW Hanura melihat justru ketimpangan sosial itu terjadi karena adanya disparitas wilayah antara kota dan desa, dan tingkat

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Abdul Muluk Siregar, wakil ketua DPW Sumatera Utara, Senin 3 Februari 2014.

<sup>49</sup> Wawancara, Wulan Sari Perbawati, DPW Hanura Jawa Timur, Rabu, 5 Februari 2014.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Sanusi Ramadhan, calon legislatif DPR RI Hanura DAPIL II, Rabu, 12 Februari 2014.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Abdul Muluk Siregar, wakil ketua DPW Sumatera Utara, Senin 3 Februari 2014.

kesuburan tanah di beberapa daerah di Jawa Timur turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>52</sup>

Sementara itu, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah ekonomi masyarakatnya relatif masih di bawah. Meskipun ada BPJS untuk akses kesehatan, misalnya, tetapi masih ada bayaran tiap bulan yang mesti dibebankan oleh masyarakat. Dalam tingkat pendidikan, walaupun sudah gratis tapi pada tingkat perguruan tinggi, tidak banyak masyarakat Sulawesi Selatan dapat mengakses pendidikan gratis. Karena itu, perlu adanya keseriusan pemerintah provinsi untuk merealisasikan anggaran 20 persen untuk anggaran pendidikan.<sup>53</sup>

Di Maluku Utara, menurut DPW Hanura Maluku Utara, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi disebabkan kerusakan lingkungan pasca tambang dan kurangnya manfaat kehadiran tambang bagi masyarakat sekitar lokasi tambang. Di sisi lain, bahan makanan masih mahal, karena hampir semua impor dari luar Ternate. Kondisi ini diperparah dengan adanya ketimpangan infrastruktur.<sup>54</sup>

Terlalu banyak kepentingan, kendala dalam mengatasi tersebut adalah pemerintah tidak konsisten terhadap pengembangan potensi lokal, lemahnya koordinasi antar instansi, kabupaten/kota dengan provinsi dan antara kabupaten/kota, dan adanya konflik yang terjadi antara gubernur dengan bupati dan walikota.<sup>55</sup>

Dalam aspek jender, partai ini masih mengemukakan hal normatif 30% untuk pemenuhan perempuan di legislatif. Sekedar pemenuhan persyaratan formal atas caleg perempuan yang diusulkan. Belum terlihat adanya program-program yang berpihak kepada perempuan.

## 11) PKPI

Visi PKP INDONESIA adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

<sup>52</sup> Wawancara, Wulan Sari Perbawati, DPW Hanura Jawa Timur, 5 Februari 2014.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sanusi Ramadhan, calon legislatif DPR RI Hanura DAPIL II, Rabu, 12 Februari 2014.

<sup>54</sup> Misalnya ketiadaan infrastruktur jembatan dan kesediaan listrik, di mana di desa-desa kepulauan, listrik menyala 6-12 jam, dan mereka harus membayar Rp.75.000,-.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Gamaria Iskandar Alam, DPW Hanura Maluku Utara, Senin 3 Februari 2014

Dalam salah satu pokok perjuangannya, pada poin pemulihan ekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan, PKPI melihat bahwa yang paling menderita akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang, serta penduduk di bawah garis kemiskinan.<sup>56</sup> Oleh sebab itu, upaya pemulihan ekonomi haruslah pada tempat-tempat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Artinya, mengutamakan kelompok masyarakat yang tergolong penduduk di bawah garis kemiskinan yang masih hidup tidak layak, dan terpinggirkan.

Ada tiga hal yang didasari dari pokok perjuangan tersebut. Pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan memberi perhatian besar kepada pembangunan peningkatan produksi pertanian, nilai tukar hasil pertanian dan pendapatan petani, industri yang berbasis sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mempunyai semangat dan ketrampilan wirausaha, mengatasi persaingan ekonomi yang kurang sehat sehingga meningkatkan daya saing nasional, regional dan global.

Kedua, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas kerja, melalui berbagai program khusus. Contoh, program pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, pemberdayaan hutan-hutan produksi dan lahan rawa untuk pertanian, serta program-program sejenis yang bermakna keberpihakan pada rakyat di bawah garis kemiskinan harus dilaksanakan dengan benar diawasi secara sungguh-sungguh, serius dan konsisten agar tidak terancam oleh penyalahgunaannya demi kepentingan kelompok kecil tertentu.

Ketiga, pengembangan usaha besar yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan ramah lingkungan, berorientasi ekspor, barang modal, menjunjung industri pertanian dan kelautan dalam arti luas,

<sup>56</sup> Haluan Perjuangan PKP Indonesia antara lain: idiologi; konstitusi; Sifat dan Motto Partai; Ketuhanan yang Maha Esa; Kedaulatan Rakyat; Negara Kebangsaan; Penyelenggara Negara; Otonomi Daerah; Pembangunan Berkelanjutan; Hubungan dan Kerjasama Internasional; Matra Darat, Laut dan Udara. Sedangkan pokok-pokok perjuangan PKP Indonesia antara lain: Perwujudan kedaulatan rakyat yang nyata atas negara; Pancasila Dan UUD 1945 Sebagai Kenyataan Yang Hidup. Pemerintahan yang Mampu Menghadapi Tantangan Berat ke Masa Depan; Mencegah Disintegrasi Bangsa; Perwujudan Otonomi Daerah Secara Nyata; Pemberdayaan Masyarakat; Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; Kualitas Manusia Indonesia; Penegakan Hukum Yang Berintikan Keadilan dan Kebenaran; Pelayanan Umum yang Layak dan Adil; Pemulihan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat; Beban Hutang yang Ditanggung Negara dan Rakyat; Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

perlu tetap diberi kesempatan, dukungan sepanjang struktur pembiayaan, produksi dan pemasarannya tidak menekan peluang dan kesempatan berkembang dari pihak koperasi usaha kecil dan menengah.

Sebagian besar pengurus DPP PKPI dapat menjelaskan visi dan misi partai yang beririsan dengan persoalan ketimpangan. Secara nasional hingga daerah dapat dinilai bahwa PKPI memiliki kepekaan terhadap persoalan ketimpangan, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang sebagian besar berisi rute jalan mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan yang dijabarkan dengan visi dan misi partai. Bentuk ketimpangan menurut pengurus PKPI berbeda-beda, DPN PKPI menilai para petani, peternak, dan nelayan masih miskin dan belum sejahtera. Pemerintah membiarkan dan tidak membantu petani, peternak, dan nelayan serta adanya rakyat miskin mengalami kesulitan ketika sakit dan berobat ke rumah sakit.<sup>57</sup>

Platform PKPI di atas secara konseptual diterjemahkan oleh DPP PKPI Lampung, Anton Alvis, Sekretaris DPP PKPI Lampung, yang melihat kenyataan Indonesia sebagai negara maritim agraris yang menyandarkan diri pada sektor pertanian.<sup>58</sup> Hal senada diungkapkan oleh DPN PKPI, Jimmy Jambak, bahwa platform ekonomi PKPI adalah pasal 33 UUD 1945, yaitu “memanfaatkan semua aset-aset ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jika melihat di ayat 123 bahwa perekonomian kita didasarkan satu oleh secara kebersamaan, kedua oleh koperasi, dan yang ketiga itu adalah BUMN, dan yang keempat baru oleh swasta. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi dikuasai oleh ketiga komponen ekonomi tadi, baru boleh kita serahkan kepada swasta.”<sup>59</sup>

Ketua DPP PKPI Malut, Masrul H. Ibrahim mengatakan, “Negara ini bisa dipersatukan dengan keadilan. Tanpa keadilan maka susa. Kalau jauh dari faktor keadilan yakin bangsa ini tidak bisa dipersatukan,<sup>60</sup> dan bahwa platform PKPI sebenarnya, keadilan dan persatuan.”<sup>61</sup>

<sup>57</sup> Wawancara dengan Jimmy Jambak, Ketua DPN PKPI, 10 Februari 2014.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Anton Alvis, Sekretaris Ketua DPP PKPI Lampung, 15 Februari 2014. Untuk itu PKPI mendorong pelaksanaan Reforma Agraria untuk kesejahteraan petani. Sasarannya adalah ketersediaan pupuk, ketersediaan benih yang baik, serta redistribusi lahan, namun konsep inipun belum sampai pada taraf dokumen tertulis.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Jimmy Jambak, Ketua DPN PKPI, 10 Februari 2014.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Masrul H. Ibrahim, Ketua DPP PKPI Malut, 2 Februari 2014

<sup>61</sup> Wawancara dengan M Husni, Sekretaris DPP PKPI Jatim, 8 Februari 2014

PKPI Sumut berpendapat bahwa isu ketimpangan yang paling riil adalah ketimpangan social, di mana masyarakat hidupnya di bawah garis kemiskinan serta maraknya suap menyuap untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>62</sup> DPP PKPI Jabar menyoroti isu diskriminasi pendidikan dimana ada ketimpangan akses antara sekolah negeri dan swasta.<sup>63</sup>

Sementara DPP PKPI Jatim secara lebih detil menjelaskan bentuk-bentuk ketimpangan di wilayahnya. Contoh, petani garam, tembakau dan nelayan tidak mendapatkan perhatian serius dan tidak ada kebijakan melindungi petani dari perlakuan para pembeli, tengkulak atau pengusaha. Bentuk ketimpangan lain di Jawa Timur adalah dalam masuknya pasar modern hingga ke desa-desa. Mereka banyak menggerus produksi lokal dan tidak mengakomodir kearifan lokal. Di bidang pendidikan, di mana ada kesenjangan antara sekolah favorit yang diisi orang-orang kaya dan pendistribusian dana BOS yang tidak tepat sasaran. DPP PKPI Jatim juga mengungkapkan ketimpangan di bidang kesehatan, di mana masyarakat miskin dilayani dengan berbelit-belit di rumah sakit.<sup>64</sup>

PKPI Kaltim menganggap ketimpangan yang nyata di wilayahnya adalah kekayaan minyak tak membuat mudahnya mengakses bahan bakar di Kaltim, sehingga lebih banyak membeli dari Malaysia, selain ketimpangan di daerah perbatasan. PKPI Kaltim menganggap walikota memberikan ijin penambangan tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

## 12) PBB

Platform PBB dalam Pemilu 2014 adalah program 14 Indonesia Bersih dan Makmur.<sup>65</sup> Arti bersih sebagai satu gerakan menyelamatkan kekayaan negara dari praktik korupsi, oligarkhi, dan konspirasi kekuasaan. Gagasan disampaikan PBB untuk mencapai Indonesia Bersih adalah antara lain: menegakkan keadilan dan kepastian hukum, merealisasikan komitmen untuk memberantas korupsi secara sistemik dengan memberlakukan tuntutan maksimal hukuman mati, mewujudkan pemerintahan yang bersih, amanah, dan berpihak pada rakyat serta mengutamakan kepentingan nasional, mewujudkan sistem pemerintahan otonomi yang

<sup>62</sup> Wawancara dengan Adla Hasibuan, Sekretaris DPP PKPI Sumut, 5 Februari 2014.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pengurus DPP PKPI Jawa Barat, 15 Februari 2014

<sup>64</sup> Wawancara dengan M Husni, Sekretaris DPP PKPI Jatim, 8 Februari 2014

<sup>65</sup> <http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/> Diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

efektif yang mampu mengembangkan potensi-potensi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi seluruh warga negara Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri terutama perlindungan terhadap TKI, dengan rasa nyaman dan aman karena kehadiran negara dalam setiap sendi kehidupannya, mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif, produktif, dan bersih dari korupsi, menciptakan sistem pemilu yang demokratis dan menghindari politik biaya tinggi dengan mengembalikan pemilu kepala daerah kabupaten/kota kepada DPRD, merealisasikan dan mengefisienkan penggunaan anggaran 20% pendidikan dalam APBN/APBD untuk menciptakan biaya pendidikan murah dan prioritas peningkatan kesejahteraan guru, mengembalikan Indonesia sebagai “Macan Asia” dengan kemampuan membuat dan memiliki kapal induk dan modernisasi sistem pertahanan negara, meningkatkan investasi Sumber Daya Manusia dengan memperbanyak program beasiswa S2 dan S3 ke perguruan tinggi unggul di dunia dan penugasan dan penempatan SDM pemuda yang handal guna pengembangan pembangunan di daerah, mendorong Industri pers yang nasionalis dan mengedepankan promosi kekayaan alam, sumber daya insani, dan memacu kreatifitas putra bangsa dan menjadi jendela pertama untuk dunia dapat mengapresiasi bangsa Indonesia.

Ketua Umum PBB, MS Kaban, menjelaskan bahwa platform “Indonesia Makmur” merupakan usaha bersama menciptakan prioritas untuk memakmurkan rakyat dan memajukan perekonomian nasional.<sup>66</sup>

Platform ini terdiri dari empat hal. Pertama, mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja. Kedua, memperkuat modal pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat melalui sekuritisasi sumber daya alam, kemandian pangan dan energi. Ketiga, membangun infrastruktur (jalan, air, listrik, bendungan) secara merata di seluruh Indonesia. Keempat melaksanakan redistribusi lahan produktif dengan menerapkan Undang-Undang Agraria khususnya *landreform* untuk petani miskin, pembatasan *outsourcing* di kalangan buruh, mensejahterakan kaum buruh, meningkatkan jaminan sosial bagi orang lanjut usia dan tuna karya.

Jika melihat platform terkait masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, PBB menjelaskan bahwa kemiskinan masih terjadi kalangan petani, buruh tani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil. Mereka belum sejahtera dan masalah-masalah tersebut harus segera diselesaikan oleh negara. Jika melihat platform terkait masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, maka PBB menjelaskan bahwa kemiskinan masih terjadi kalangan petani, buruh tani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil.

Mereka belum sejahtera dan masalah-masalah tersebut harus segera diselesaikan oleh negara. Namun demikian di beberapa daerah, pengurus wilayah PBB lebih memahami masalah-masalah ketimpangan sosial dan ekonomi dalam konteks lokal atau daerah dan bukan semata-mata pada platform yang dibuat oleh elit partai di tingkat pusat. Seperti apa DPW-DPW PBB menerjemahkan platform DPP PBB?

Di Sumatera Utara. DPW PBB di daerah ini menekankan fokus ketimpangan ekonomi pada masalah agraria. Masalah agraria begitu terabaikan karena tidak menjadi bagian penting dalam pembangunan.<sup>67</sup> Ini berakibat pada tidak tergarapnya potensi pertanian di Sumatera Utara dan banyaknya alih fungsi lahan. Pemodal besar mengambil alih lahan secara ekspansif. Karena itu, PBB Sumut ingin memperkuat ekonomi berdasarkan potensi pertanian, perkebunan, dan kelautan serta membangun industri dengan bahan dasar dari daerah. Selain itu, diperlukan kepastian hukum untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kendala dalam mengatasi masalah ini, selain karena hukum masih multitafsir, aparat penegak hukum juga belum bersungguh-sungguh menegakkan keadilan.

Di Provinsi Lampung, DPW PBB menghubungkan masalah ketimpangan sosial ekonomi dengan wawasan keagamaan. Mereka berpendapat bahwa terdapat penafsiran salah atas agama bahwa nasib orang miskin merupakan takdir Allah sehingga menghasilkan sikap *nrimo* dan pasrah.<sup>68</sup> Menurut DPW Lampung sekitar 40% masyarakat Lampung hidup di bawah garis kemiskinan. Kualitas SDM rencana, minimnya tingkat pendidikan dan kreativitas usaha menjadi penyebab kemiskinan.

Sementara itu di Jawa Barat, PBB menekankan dengan tegas platform politik distribusi kesejahteraan dan penegakan hukum.<sup>69</sup> Di daerah Jawa

<sup>67</sup> Masri Sitanggang, Ketua DPW PBB Sumatera Utara, Selasa, 4 Februari 2014

<sup>68</sup> Amruzi Setyagama, Sekretaris MPW PBB Prov Lampung

<sup>69</sup> Pengurus DPW PBB Jawa Barat

Barat masih terdapat ketimpangan pendapatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain karena kondisi ekonomi nasional belum membaik, ketimpangan-ketimpangan ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat khususnya petani. Liberalisasi dan privatisasi ekonomi, demokrasi yang tidak matang, pragmatisme dan politik uang juga menjadi kendala berat dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut. PBB Jabar mendesak Pemerintah dan DPRD Provinsi untuk membuat kebijakan mendukung rakyat kecil dan mengimplementasikan secara nyata.

Di Sulawesi Selatan, DPW PBB Sulawesi Selatan mengambil langkah-langkah berbeda dan sangat menarik yakni membela, memperjuangkan, dan mengawal hak-hak kaum difabel.<sup>70</sup> PBB Sulawesi Selatan memang berpikir kritis dan progresif dalam mendefinisikan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memilih memperjuangkan, melakukan pembelaan hukum dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat difabel. Kaum difabel belum mendapatkan hak-hak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Pihak pemerintah masih menutup akses masyarakat difabel di dua bidang penting tersebut. Mereka tidak diterima di sekolah-sekolah tertentu dan tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan sosial jamkesmas, jamkesda, dan BPJS.

Ketimpangan pendapatan daerah masih terjadi di Kalimantan Timur.<sup>71</sup> Demikian disampaikan oleh pengurus DPW PBB Kalimantan Timur. Menurut DPW PBB, undang-undang desentralisasi telah mengakomodasi ketimpangan pendapatan daerah namun peraturan ini malah dicabut kembali sehingga dana perimbangan dari pemerintah pusat yang kembali ke Kalimantan Timur hanya 15%. Selain itu, ketimpangan ekonomi terjadi sangat mencolok di daerah perbatasan karena itu untuk menembus daerah tersebut orang-orang harus menggunakan pesawat kecil. Harga sembako di daerah tersebut melonjak hingga Rp 500-700 ribu.

Di Maluku Utara, selain ingin mewujudkan kehidupan masyarakat “Indonesia Islami”. Untuk mewujudkan masyarakat maju berdasarkan nilai-nilai Islam, PBB Maluku Utara juga mengkritisi minimnya sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, dan kegiatan perekonomian.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Saharuddin Daming, PBB Sulawesi Selatan, 11 Februari, 2014

<sup>71</sup> Pengurus DPW PBB Kalimantan Timur

<sup>72</sup> Muhlis Radjiloen, wakil ketua DPW PBB Maluku Utara 2-2-2014

Pembangunan ekonomi di Maluku Utara berjalan tidak merata termasuk dalam hal bantuan langsung tunai dan jamkesmas. PBB Maluku Utara mengetahui bahwa pembagian anggaran untuk kabupaten/kota tidak berimbang karena itu beberapa pemerintah daerah kabupaten di propinsi ini sering mengeluhkan masalah tersebut.

### **B. Bentuk-bentuk Kebijakan dan Program Ketimpangan Ekonomi dan Non Ekonomi 12 Parpol (Nasional) Peserta Pemilu 2014**

Rata-rata narasumber dua belas parpol di daerah menunjukkan perlunya menggali potensi daerah itu sendiri terlebih dahulu. Pandangan tersebut didapat dari jawaban mereka ketika ditanyakan mengenai program dan kebijakan penanganan ketimpangan.

Namun demikian, mereka sependapat ketika menyampaikan bahwa pemerintah haruslah punya andil dalam merumuskan kebijakan penanganan ketimpangan, apalagi problem ketimpangan bukan hanya terjadi di daerah melainkan di Indonesia secara keseluruhan. Dari sisi kebijakan, narasumber mengemukakan pentingnya merujuk pada platform khususnya di bagian AD/ART ketika mengemukakan upaya perumusan kebijakan atau program mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di nasional maupun sub nasional (daerah).

Umumnya narasumber dari DPW parpol mengklaim mempunyai program penanganan ketimpangan sosial. Mereka merasakan dan mempunyai perhatian pada isu ketimpangan, tapi belum punya cukup konsep dan program. Di sisi lain, wawancara terhadap DPW parpol dan juga caleg yang kebetulan menjadi aktivis parpol menunjukkan kesadaran pada perlunya parpol berperan aktif dalam penanganan ketimpangan. Sementara itu terdapat temuan bahwa parpol juga cenderung mencampuradukkan kegiatannya sebagai legislator dengan sebagai kader partai. Program pemerintah diklaim merupakan program partai.

Jenis-jenis kebijakan dan program yang diperoleh dari informasi nara sumber menunjukkan beragamnya program parpol di daerah. Kebanyakan berkaitan langsung dengan apa yang dimaknai sebagai kebutuhan hidup sehari-hari di daerah. Hal ini juga sering ditemukan manakala narasumber (caleg) menceritakan mengenai bentuk program parpol dan relasinya

dengan konstituen. Pemberian bantuan atau secara umum, program-program yang sifatnya karikatif, *charity*, dijadikan alat untuk memelihara relasi dengan konstituen.

Terdapat perbedaan pandangan antara DPW parpol dari *ruling political party* dengan DPW parpol dari *non ruling political party*. Partai yang berkuasa cenderung lebih percaya diri manakala mengemukakan bentuk kebijakan dan program-programnya, namun kurang secara kritis menilai kondisi obyektif baik ekonomi maupun politik yang menyebabkan suatu kebijakan dapat diturunkan ke dalam program atau tidak.

Umumnya narasumber berhasil menyampaikan peta kendala-kendala dari perumusan kebijakan dan implementasi program di daerah-daerah termasuk di pusat. Sedangkan, dari sisi kendala terkait kebijakan dan program menurut nara sumber umumnya adalah masalah kurangnya pendanaan.

Kendala spesifik berkisar pada kapasitas SDM lokal sesuai dengan letak geografis parpol, termasuk kurangnya intensitas kaderisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu ketimpangan dan mencari di mana peran parpol ketika berbicara penanganannya. Masalah kaderisasi ini dianggap juga harus menjadi konsentrasi DPP. Selain itu, kendala spesifik lainnya terkait dengan kesamaan persepsi internal parpol mengenai skala prioritas kebijakan atau program untuk menangani ketimpangan.

### **C. Strategi parpol Melaksanakan Program Ketimpangan Ekonomi dan Non Ekonomi**

DPW/DPD yang diwawancarai menyatakan bahwa kerja kader merupakan elemen penting yang menopang peran partai di wilayah masing-masing. Kader justru dapat dilihat sebagai sebagai aktor utama yang menjalankan strategi-strategi yang disusun partai untuk menjalankan berbagai kebijakan yang dimilikinya.

Persoalannya, seperti yang dikemukakan partai kesulitan untuk menurunkan platform sampai tingkat kader terbawah khususnya dalam pembahasan mengenai isu ketimpangan. Sebagai contoh, dalam wawancara DPW Demokrat, PDI-P maupun Golkar di Jawa Timur mengangkat kasus banjir sebagai konteks lokal untuk mengemukakan pentingnya pemahaman isu ketimpangan. Banjir merupakan salah satu peristiwa yang membutuhkan respon cepat. Namun, dalam penanganannya partai juga

harus tetap bergerak dalam isu ketimpangan. Sebab, peristiwa bencana seperti ini membuat korban berpeluang mengalami ketimpangan yang lebih besar.

Lebih lanjut, sepuluh DPW-DPW yang diwawancarai umumnya juga menyatakan bahwa hari ini masyarakat lebih melihat sosok calon legislatif daripada partainya. Oleh karena itu, proses rekrutmen caleg menjadi sangat penting. Hal ini juga akan bermanfaat bagi sosialisasi program partai di masyarakat.

Pentingnya kualitas caleg, juga disadari oleh DPP/DPW/DPD seluruh partai. Kualitas dalam hal ini dirumuskan dalam tiga syarat, yaitu: jaringan, ketokohan, dan kesiapan dana. Kualitas caleg juga didukung dengan program partai untuk berhubungan langsung dengan rakyat. Lebih lanjut, beberapa DPW khususnya dari parpol “tradisional” menyadari pentingnya media dalam penyebarluasan kebijakan. Oleh karena itu, ada usulan untuk DPW setempat mengeluarkan *press release* setiap pekan. Kader juga diminta untuk biasa membuat opini di koran lokal.

Secara umum pengurus DPW menyadari bahwa kerja partai harus didukung oleh pengetahuan yang baik di bidangnya. Oleh karena itu, untuk isu-isu yang dianggap strategis, DPW mengundang pakar-pakar untuk berdiskusi. Salah satu contohnya, adalah isu agraria yang krusial di Sumatera Utara. Melalui diskusi tersebut, Fraksi Demokrat di Provinsi Sumatera Utara kemudian menyusun Perda soal agraria. Dalam proses sosialisasi, DPW Demokrat Sumatera Utara sangat menyadari pentingnya peran media massa. Kader khususnya yang menjabat legislatif, sangat aktif mengeluarkan sikap dan opini di publik.<sup>73</sup>

Di Jawa Barat, DPW parpol-parpol juga kerap diadakan diskusi antara pengurus dan mitra kerjanya. Secara teknis, para pengurus DPW juga umumnya mengandalkan rapat mingguan dan pembekalan untuk menyampaikan program mereka pada kader-kader.

Di Surabaya, ketokohan menjadi penting untuk mendorong sosialisasi program parpol. Namun di NTT, ketokohan di DPW PAN justru cenderung membuat DPW kurang artikulatif menyatakan pendapatnya mengenai strategi penanganan ketimpangan.

<sup>73</sup> Temuan lapangan dari Sumut pada periode Oktober 2011-April 2013 misalnya, terdapat ada 1274 pemberitaan yang terkait Demokrat di wilayah tersebut. Data didapatkan dari dokumentasi klipring berita Fraksi Demokrat Sumatera Utara Oktober 2011-April 2013.

Di Jawa Tengah, DPW parpol memahami harus ada strategi berlapis untuk merumuskan kebijakan dan menjalankan program. Di Maluku Utara, meskipun DPW parpol-parpol dapat mengidentifikasi strategi mereka menangani ketimpangan, namun menekankan pemerintah juga harus membantu agar parpol dan pemerintah bermitra lebih baik berdasarkan pemetaan kebutuhan lokal.

Semua wawancara dengan DPW parpol di sepuluh wilayah mengemukakan bahwa kader adalah elemen penting dalam merepresentasikan partai. Rekrutmen kader yang baik dan memiliki kapasitas di legislatif misalnya, diyakini sebagai kunci untuk melaksanakan kebijakan mengatasi isu ketimpangan yang dinilai mendesak. Kader yang berkualitas akan membantu parpol lebih diterima oleh rakyat.

## Metode

SECARA keseluruhan studi ini merupakan studi kebijakan yang bersifat kualitatif di level provinsi pada sepuluh lokasi terhadap dua belas parpol nasional peserta Pemilu 2014. Dalam studi ini, partai politik yang diteliti merupakan peserta Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2014 yang secara sah telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dua belas partai politik peserta Pemilu 2014 adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Unit analisisnya adalah partai secara keseluruhan, di mana data pada level lokal ditujukan untuk mendukung analisis mengenai implementasi kebijakan dan program partai. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keterwakilan wilayah Jawa dan luar Jawa. Fokus analisis di daerah luar Jawa adalah DPW/DPD yang berkedudukan di ibukota provinsi. DKI Jakarta diperlakukan sebagai lokasi di mana DPP dua belas parpol berada, sehingga sudut pandang pengurus DPP mencerminkan posisi parpol secara nasional mengenai ketimpangan yang tercermin dalam platform.

Wawancara di daerah (ibukota provinsi) dilakukan dengan pengurus DPD/DPW dari dua belas pada sepuluh daerah penelitian, yaitu di Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (Semarang).

Sumatera Utara (Medan), Lampung (Bandar Lampung), Kalimantan Timur (Samarinda), NTT (Kupang), Sulawesi Selatan (Makassar) dan Maluku Utara (Ternate).

Pengembangan instrumen penelitian studi ini didasarkan pada pengembangan konsep secara deduktif yang dibangun dari studi literatur terkait. Untuk memperoleh data, maka sebelum riset lapangan peneliti membaca platform keduabelas parpol dari dokumen resmi yang diperoleh dengan cara mengontak langsung DPP dari dua belas parpol di Jakarta, selain mengunduh platform parpol dari website mereka. Proses penelusuran dokumen cetak dari DPP parpol-parpol di DKI Jakarta dilakukan dengan cara memasukkan surat permohonan selain mendatangi langsung sekretariat masing-masing parpol.

Respon mereka beragam. Ada yang secara langsung menemui asisten tim peneliti yang ditugaskan untuk menelusuri dokumen, ada pula yang merespon dengan sangat birokratis, melempar dari satu meja ke meja lainnya untuk mendapatkan dokumen parpol yang berisi platform tersebut. Ada pula yang meminta peneliti untuk menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga mereka bersedia menjawab (via telepon) apakah dokumen bisa diakses.

Dokumen parpol umumnya beragam, mulai dari buku mengenai profil parpol yang memuat sejarah, platform, visi dan misi serta AD/ART, buku saku mengenai isu-isu parpol tertentu yang menjadi fokus kebijakan parpol, dan seterusnya. Dokumen ini penting sebab secara umum memuat paparan posisi parpol mengenai isu-isu politik, lebih khusus lagi untuk keperluan studi ini: ketimpangan ekonomi dan non ekonomi.

Secara umum, meskipun tertulis di dalam platform, parpol tidak menyebutkan secara spesifik istilah “ketimpangan”. Di antara mereka ada yang menyebut atau mengganti dengan kata “kesenjangan” atau “keadilan sosial”. Jika peneliti tidak berhasil mendapatkan data mengenai platform dari DPP, maka dilakukan penelusuran melalui situs resmi masing-masing parpol. Pemahaman mengenai platform parpol ini berguna untuk memandu para peneliti ketika proses riset lapangan berlangsung.

Penelitian lapangan untuk mengumpulkan informasi dengan narasumber dilakukan melalui wawancara mendalam. Hal ini memperkuat

dan menajamkan pengetahuan yang diperoleh melalui kajian literatur. Studi lapangan yang dilakukan selama kurang lebih sepuluh hari per peneliti di tiap lokasi membantu memperdalam “rasa” peneliti tentang konteks lokal dan pengaruhnya terhadap karakteristik serta program dua belas parpol di daerah. Disebabkan oleh waktu riset yang berdekatan dengan jadwal kampanye parpol menjelang putaran pemilu legislatif dan pemilu presiden, sebagian besar parpol di DPP, DPD/DPW mempunyai kesibukan yang luar biasa. Para narasumber yang merupakan wakil dan atau kader parpol (peserta pemilu 2014) mayoritas merupakan calon legislatif, baik di tingkat DPRD Provinsi maupun DPR RI. Oleh karena itu, para narasumber ini umumnya sedang melakukan sosialisasi maupun kampanye politik di daerah pemilihannya masing-masing.

Dengan kurun waktu turun ke bulan Februari-Maret, mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, turun ke dapil masing-masing. Akibatnya agenda wawancara seringkali harus menjadwal ulang. Di tiap lokasi riset lapangan, peneliti dibantu oleh seorang asisten peneliti lokal yang tugas khususnya adalah menyesuaikan jadwal wawancara yang direncanakan dari Jakarta dengan jadwal narasumber.

Keterbatasan studi ini terletak pada penyusunan hasil penelitian yang terkait dengan pemosisian parpol: apakah dalam menjawab pertanyaan penelitian (terlampir) berada dalam posisinya sebagai anggota legislatif (baik nasional maupun daerah/wilayah)? Ataukah dalam posisi menjalankan struktur kepengurusan parpol?

Selain itu, sebagian besar wakil parpol di DPW/DPD juga tidak terpikir atau minimal belum dapat mengaitkan konsentrasi mereka mereka mengenai ketimpangan dengan program dalam legislasi ketika ditanyakan dalam wawancara.

Sedangkan keterbatasan metodologi dari sisi tim peneliti adalah klasifikasi atau pengkategorian data yang kurang ketat di isu ketimpangan. Ada kalanya “ketimpangan” disamakan dari aspek sosial dan ekonomi, sesuai dengan batasan istilah dalam platform parpol yang seringkali tidak membedakan secara tegas cakupan ketimpangan ekonomi dan di luar ekonomi.

**Tabel 1**  
PROFIL NARASUMBER

<b>Wilayah Riset</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Hambatan</b>
DKI Jakarta	Sepuluh orang pengurus DPP (sekretaris, wakil ketua umum, kepala bidang)	Komitmen jadwal wawancara, rekomendasi jaringan dibutuhkan.
Jawa Barat	Dua belas orang pengurus DPW/ DPD	Pengurus sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) Kantor/sekretariat sering kosong
Lampung	Tujuh belas orang pengurus DPD/ DPW, caleg parpol, pengurus DPC.	Pengurus sosialisasi di dapil atau sedang kampanye Dokumen DPW/DPD terbatas.
Sumatera Utara	Dua belas orang caleg DPR, Pengurus DPD dan DPW	Pengurus tidak paham platform parpol Dokumentasi parpol terbatas.
NTT	Dua belas orang pengurus DPW/DPD.	Pengurus sosialisasi di dapil/ kampanye Dokumen DPW/DPD terbatas.
Sulawesi Selatan	Dua belas orang pengurus DPW/DPD	Pengurus sosialisasi di DAPIL/ kampanye Dokumen DPW/DPD terbatas.
Maluku Utara	Dua belas orang pengurus DPW/DPD	Persoalan geografis di mana ibukota baru, Sofifi, hanya menjadi transit.
Kalimantan Timur	Dua belas orang pengurus DPW/DPD	Jadwal wawancara berbenturan dengan masa kampanye.
Jawa Timur	Dua belas orang pengurus DPW/DPD dan caleg DPRD	Jadwal wawancara berbenturan dengan masa kampanye.
Jawa Tengah	sebelas orang pengurus DPW/DPD Parpol	Jadwal wawancara berbenturan dengan masa kampanye.

## **Analisis dan Pembahasan**

SUB bagian analisis pembahasan ini memuat penjelasan pada tingkat konseptual mengenai paradigma parpol atau “alam pikir” partai politik mengenai ketimpangan. Sumber-sumber didapat atau sesuai dengan dokumen ataupun situs resmi.

Secara normatif, sebagaimana telah dibahas dalam sub bahasan (1) ringkasan penelitian dalam laporan ini bisa kita temukan apa yang dimaknai oleh partai sebagai ketimpangan, apa bentuknya, apa penyebabnya dan bagaimana parpol melihat penanganan ketimpangan itu.

Analisis untuk masing-masing partai memuat temuan atas pertanyaan dan batasan penelitian yang telah dikemukakan di riset desain terlampir, yaitu mengenai tiga pertanyaan pokok (persepsi, kebijakan, strategi) dan jenis ketimpangan ekonomi dan ketimpangan di luar ekonomi.

### **Partai Politik dan Ketimpangan Ekonomi**

#### **1.1. Level Konseptual**

Hampir semua partai menyatakan platform mereka telah memuat isu ketimpangan, apakah itu ekonomi maupun di luar ekonomi. Semua partai mengklaim diri mereka mempunyai konsep penanggulangan ketimpangan sosial.

Partai-partai yang mempunyai kader di jajaran eksekutif (partai koalisi) cenderung mengakui program pemerintah (di mana kader-kadernya mempunyai posisi) adalah hasil perjuangan partainya. Sementara di sisi lain, partai-partai yang mengambil jalan oposisi cenderung memberi

catatan kritis pada program-program yang dilakukan pemerintah. Hal ini kemudian menjadi sedikit berbeda jika ditarik ke tingkat provinsi. Di provinsi terdapat beberapa partai oposisi yang berhasil memenangi pemilu karena sehingga bisa menempatkan kadernya sebagai Gubernur.

Menurut Partai Nasdem sebagai partai peserta pemilu 2014 dengan nomor urut satu, tingkat kemakmuran rakyat saat ini rendah, maka isu keadilan pembangunan menjadi faktor utama yang bermasalah menurut partai yang awalnya berupa ormas ini. Karena itulah, perlu segera melakukan pendistribusian ulang pusat pertumbuhan dengan mendekatkan industri ke bahan baku. Ke depan harus memiliki *grand design* pembangunan yang terpadu dan ketat, menegakkan kemandirian pangan yang berkelanjutan, serta mengubah ukuran kemiskinan sesuai dengan *Human Development Index*.

Sedangkan, parpol dengan nomor urut dua dalam Pemilu 2014 yaitu PKB memuat mengenai persoalan ketimpangan ekonomi dan sosial pada pasal 7 Anggaran Dasar partai. Secara khusus dijelaskan pada tiga poin tujuan partai. Di antara ketiga poin tersebut, yang berkaitan dengan konteks tulisan ini adalah tujuan “mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual”.<sup>74</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PKB melakukan usaha di bidang ekonomi, yaitu “menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis”.<sup>75</sup> Dengan demikian, cara pandang PKB mengenai persoalan ketimpangan ekonomi berbasis pada ekonomi kerakyatan.

PKS yang menempati nomor urut tiga sebagai peserta Pemilu 2014, dalam bidang ekonomi menyatakan dukungan terhadap program reformasi yang bertujuan mengurangi peranan rente. Selain itu, PKS juga melihat pentingnya sektor ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan platform yang dikeluarkan pada tahun 2008, PKS dengan cukup jelas menunjukkan aspek-aspek apa yang harus menjadi prioritas pembangunan. Dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, PKS mendorong reformasi agar pembangunan terhindar dari rente. Ekonomi syariah juga menjadi salah satu sektor yang perlu dikembangkan terutama dalam

<sup>74</sup> Lihat pasal 7 poin (c) Anggaran Dasar PKB.

<sup>75</sup> Lihat pasal 8 Anggaran Dasar PKB.

rangka mendorong munculnya para wirausahawan handal. Sementara itu, pandangan PKS terhadap industrialisasi dan peranan ekonomi pasar cukup positif. Pemerintah diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif.<sup>76</sup>

Partai nomor empat, PDI Perjuangan mempunyai salah satu misi memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Dasa Prasetiya. Lima dari sepuluh arah umum program partai, atau yang lebih dikenal dengan Dasa Prasetiya, berkaitan langsung dengan isu ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pertama, memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan. Kedua, menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat. Ketiga, membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat. Keempat, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah. Kelima, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.<sup>77</sup>

Di Dasa Prasetiya, Rakernas III PDI Perjuangan yang diselenggarakan tahun 2013 juga merekomendasikan beberapa hal untuk mengatasi persoalan ketimpangan.<sup>78</sup> Pertama, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional, maka kepemimpinan nasional pada periode tersebut harus memiliki kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasi perekonomian nasional yang disusun berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

Kedua, mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan tambahan total terhadap politik pangan untuk menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional. Pemerintah wajib mendorong kemampuan produksi petani melalui dukungan penelitian dan pemanfaatan penelitian yang dilakukan anak bangsa khususnya terhadap benih unggul, peningkatan infrastruktur pertanian, pasar lelang, serta akses permodalan, dan jaminan

<sup>76</sup> Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (Jakarta, MPP PKS: 2008)

<sup>77</sup> "Dasa Prasetiya", dalam <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12>

<sup>78</sup> "Ini 17 Butir Rekomendasi Hasil Rakernas III PDIP 2013", dalam <http://www.merdeka.com/politik/ini-17-butir-rekomendasi-hasil-rakernas-iii-pdip-2013/rekomendasi-butir-1-6.html>

bagi para petani untuk mendapatkan keuntungan. Kebijakan liberalisasi di sektor pertanian harus segera diakhiri.

Sekarang Partai Golkar yang menempati nomor urut lima dalam Pemilu 2014. Di bidang ekonomi, visi Partai Golkar adalah ekonomi kerakyatan sebagai potensi untuk memperkuat basis ekonomi, dan menjamin perwujudan kesejahteraan. Dalam dokumen “Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan” Golkar memberi penekanan prioritas pembangunan pada sektor: Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Pertanian, Kelautan, Infrastruktur, UMKM dan Koperasi. Golkar tidak menyetujui ekonomi konglomerasi yang justru menyebabkan krisis ekonomi.<sup>79</sup>

Oleh sebab itu Golkar mendukung dan mengembangkan UKM dan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional, sekaligus alat pemberdayaan rakyat.<sup>80</sup> Di bidang sosial budaya, cita-cita Golkar adalah penguatan budaya yang dapat menghasilkan bangsa yang beriman, bertaqwa, menguasai iptek dan ketrampilan, memiliki etos kerja tinggi, disiplin. Pluralitas, toleransi, dan kerukunan adalah basis integrasi bangsa.<sup>81</sup> Golkar mencantumkan agenda penting “terwujudnya kehidupan sosbud yang berkeadilan serta terjembatannya kesenjangan sosial antara Jawa dengan luar Jawa, antara pusat dengan daerah”.<sup>82</sup>

Partai Gerindra sebagai peserta nomor urut enam dari Pemilu 2014 melihat bahwa masih banyak kesenjangan antarwilayah di berbagai bidang. Ketimpangan antarwilayah dirasakan terutama oleh masyarakat pedesaan. Ketimpangan tersebut berwujud pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kemudian ketimpangan di bidang politik seperti pembagian kewenangan pusat dan daerah. Ketimpangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Gerindra Jakarta, bahwa kesenjangan terjadi di bidang ekonomi dan infrastruktur terutama di pedesaan.<sup>83</sup> Partai Gerindra memandang bahwa ketimpangan ekonomi makin lebar akibat arus liberalisasi yang tidak sesuai dengan tatanan nasional. Selanjutnya Partai Gerindra memberikan alternatif agar

<sup>79</sup> Paradigma Baru Partai Golkar, III. Visi Perjuangan, Hasil Munas. hlm., 90-91.

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 91. Lihat juga tentang koperasi dalam <http://partaigolkar.or.id>

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Habiburrahman SH MH, Ketua Bidang Advokasi, pada tanggal 4 Februari 2014.

perekonomian nasional berpegang kembali pada UUD 1945 Pasal 33. Selain ekonomi, ketimpangan yang cukup lebar menurut Partai Gerindra adalah di bidang infrastruktur.

Partai Demokrat yang berada di nomor urut tujuh untuk Pemilu 2014 dalam dokumen Strategi besar 2005-2010 mengemukakan soal perjuangan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat yang sama Strategi besar tersebut juga menyebutkan upaya mengikis angka pengangguran lewat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspor nonmigas. Sebagai partai pemenang pemilu 2009, Partai Demokrat memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh partai lain. Kader-kader DPW di daerah dapat mengasosiasikan dirinya kebijakan-kebijakan yang langsung dibuat oleh pemerintah pusat seperti BLT, PNPM, BLM, dan lain-lain.

PAN dengan nomor urut delapan dalam Pemilu 2014 menyatakan, “Akhlah politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.” PAN mengklaim mengedepankan keadilan dalam mengelola sumber daya untuk rakyat Indonesia. Inilah tampaknya alasan PAN mendorong Reforma Agraria (RA).

Dalam AD/ART PAN menyebutkan bahwa manusia diberi amanat oleh Allah Tuhan YMW untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran.<sup>84</sup> Namun “disebabkan oleh pandangan manusia yang hanya melihat aspek materi dalam peradaban, maka lahirlah ketimpangan moral, yang menjadikan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat diperoleh dari kesusahan yang lainnya”.<sup>85</sup>

PPP yang bernomor urut sembilan dalam Pemilu 2014 mencita-citakan demokrasi ekonomi seperti tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.<sup>86</sup> Pembangunan didorong merata dengan mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran golongan tertentu. Kader didorong untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya membiayai kepentingan umum lewat skema wakaf, zakat, infak dan sedekah.

<sup>84</sup> AD/ART PAN 1881, Mukaddimah, hlm. 1.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Butir D/Visi Partai. Alenia 7. Ibid hal 90.

Dalam konteks pemilu 2014 PBB telah merumuskan dan menurunkan visi keislaman ke dalam misi-misi pokok untuk mewujudkan masyarakat Indonesia Bersih dan Makmur. Gagasan mengenai ketimpangan sosial dari platform PBB adalah Indonesia Makmur. Ketua Umum PBB, MS Kaban, menjelaskan bahwa platform ini merupakan usaha bersama menciptakan prioritas untuk memakmurkan rakyat dan memajukan perekonomian nasional. Platform ini terdiri dari empat hal.

Pertama, mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja. Kedua, memperkuat modal pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat melalui sekuritisasi sumber daya alam, kemandirian pangan dan energi. Ketiga, membangun infrastruktur (jalan, air, listrik, bendungan) secara merata di seluruh Indonesia. Keempat melaksanakan redistribusi lahan produktif dengan menerapkan Undang-Undang Agraria khususnya *Landreform* untuk petani miskin, pembatasan *outsourcing* di kalangan buruh, menyejahterakan kaum buruh, meningkatkan jaminan sosial bagi orang lanjut usia dan tuna karya.

Dalam platform DPP Hanura dinyatakan bahwa dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, selain adanya “kemandirian yang terbebas dari intervensi asing, juga bercita-cita untuk membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat”.

Untuk mewujudkan itu, perlu adanya upaya “membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa”. Selain itu, faktor penegakan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan juga menjadi prasyarat dalam platform Hanura akan adanya kepastian dalam “kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Dalam salah satu pokok perjuangannya, poin pemulihan ekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan, PKPI merinci bahwa yang paling menderita akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang, serta penduduk di bawah garis

kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya pemulihan ekonomi haruslah pada tempat-tempat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kelompok masyarakat yang tergolong penduduk di bawah garis kemiskinan yang masih hidup tidak layak, dan terpinggirkan.

Ada tiga poin rincian yang didasari dari pokok perjuangan tersebut. Pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan memberi perhatian besar kepada pembangunan peningkatan produksi pertanian, nilai tukar hasil pertanian dan pendapatan petani, industri yang berbasis sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mempunyai semangat dan ketrampilan wirausaha, mengatasi persaingan ekonomi yang kurang sehat sehingga meningkatkan daya saing nasional, regional dan global.

Kedua, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas kerja, melalui berbagai program khusus. Seperti program pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, pemberdayaan hutan-hutan produksi dan lahan rawa untuk pertanian. Secara tersirat, mereka juga mengutarakan program-program sejenis yang bermakna keberpihakan pada rakyat di bawah garis kemiskinan harus dilaksanakan dengan benar diawasi secara sungguh-sungguh, serius dan konsisten agar tidak terancam oleh penyalahgunaannya demi kepentingan kelompok kecil tertentu.

Ketiga, pengembangan usaha besar yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan ramah lingkungan, berorientasi ekspor, barang modal, menjunjung industri pertanian dan kelautan dalam arti luas, perlu tetap diberi kesempatan, dukungan sepanjang struktur pembiayaan, produksi dan pemasarannya tidak menekan peluang dan kesempatan berkembang dari pihak koperasi usaha kecil dan menengah.

## 1.2. Level Operasional

Jika dalam sub-bab sebelumnya kita dapat melihat betapa bagusnya persepsi dan program partai di tingkat konseptual, maka pada bab ini kita akan coba melihat bagaimana level operasionalnya.

Di bagian sebelumnya, telah dikemukakan beberapa dokumen Partai Demokrat yang berkaitan dengan isu ketimpangan. Jika dicermati, konsep-

konsep yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut bersifat sangat umum. Tidak ada penjabaran lebih lanjut dari konsep-konsep yang dikemukakan. Kurang jelasnya konsep-konsep tersebut juga dapat dirujuk dari temuan yang ada di lapangan. Alih-alih memberikan penjelasan dengan kerangka konseptual partai, jawaban lebih banyak berasal dari penalaran yang bersifat individual. Sulit untuk menarik benang merah dari jawaban-jawaban tersebut apalagi melihat kerangka berpikir yang merefleksikan organisasi.

Ada beberapa hal terkait Partai Demokrat yang dapat dikemukakan. Pertama, Partai Demokrat belum memiliki platform *dan* visi yang jelas merespon isu ketimpangan. Beberapa konsep yang dikemukakan di tingkat nasional masih bersifat normatif. Artinya, belum ada penjabaran lebih lanjut yang dapat diturunkan ke tingkat program<sup>87</sup>. Kedua, masalah pertama memiliki implikasi lebih lanjut pada penerapan program atau kebijakan merespon ketimpangan di daerah.

Pada satu sisi, hal ini memungkinkan kader untuk mengajukan kebijakan yang kontekstual dengan masalah daerah. Namun, hal tersebut tetap ditentukan oleh kualitas dan pemahaman kader mengenai isu ketimpangan. Tanpa pemahaman serta konsep partai yang baik, ada kecenderungan program-program yang dibuat bersifat parsial dan jauh dari akar permasalahan. Ketiga, di tingkat daerah pemahaman mengenai signifikansi peran kader sudah mengemuka.

Sejauh yang ditemukan oleh studi ini, PKS adalah partai yang secara formal telah mempersiapkan suatu visi yang cukup memadai mengenai kemiskinan sosial. Dari mulai platform partai hingga kader-kadernya di lapangan partai ini mempunyai acuan yang cukup baku mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penanganan ketimpangan sosial. Meskipun mengklaim sebagai partai dakwah, artinya partai dengan warna agama yang dominan, PKS berupaya menyusun platform pembangunan seterbuka mungkin. Pada tataran nasional, misalnya, pengurus partai bahkan meminta sejumlah akademisi untuk mengkritisi secara langsung draf platform pembangunan mereka. Ditunjang dengan penggunaan fasilitas teknologi informasi seperti situs di internet, PKS menyediakan data tentang platform mereka sekaligus proses tentangnya pada publik. Mengenai

<sup>87</sup> Asumsi ini boleh jadi tidak tepat karena keterbatasan akses penelitian ini pada dokumen-dokumen partai. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai keterbukaan informasi partai pada publik.

isu ketimpangan sosial dapat disimpulkan bahwa para pengurus PKS berpendapat isu tersebut memang nyata terjadi di daerah mereka masing-masing. Ragamnya merentang dari ketimpangan ekonomi (pendapatan), akses terhadap pelayanan fasilitas publik (kesehatan dan pendidikan), hingga ketimpangan regional.

Cara untuk mengatasinya, PKS mencanangkan berbagai program baik yang bersifat politik maupun sosial. Program politik artinya program yang ditujukan kepada pemerintah agar lebih serius menangani persoalan ketimpangan sosial. Program sosial artinya partai dan kader-kadernya terlibat langsung dalam menangani permasalahan. Khususnya untuk program sosial, biasanya partai menggalang dana dari internal. Kadang juga partai mengadakan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain, seperti koperasi.

Kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi lapangan menunjukkan: PPP mempunyai pandangan yang komprehensif terutama mengenai ketimpangan ekonomi. Namun hal itu kenyataannya hanya tertuang dalam dokumen AD/ART partai saja. Dalam hal implementasi di level operasional, PPP mengalami kesulitan untuk menterjemahkan pandangan mengenai ketimpangan sosial tersebut. Kesulitan terletak dalam beberapa poin: masalah kualitas SDM, kegagalan kaderisasi, dan terbatasnya dana operasional partai.

Terkait PKB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai di daerah provinsi, kecenderungan yang terlihat adalah pemahaman visi-misi atau platform yang cenderung retorik. Pada wawancara dengan pengurus partai di provinsi Jawa Timur misalnya, ketika ditanyakan mengenai visi-misi dan platform partai mengenai ketimpangan menjawab, “Ya pastilah meningkatkan kesejahteraan. Dan tentu memperpendek disparitas kesenjangan sosial ekonomi.”<sup>88</sup>

Secara garis besar, terlihat tidak adanya acuan atau pijakan yang mendasari pemahaman pengurus partai di daerah sebagaimana terlihat dari ragam perspektif tiap-tiap pengurus di daerah. Hal ini yang juga kemudian berdampak pada pemahaman pengurus partai di daerah terkait visi-misi atau platform partai cenderung normatif. Kecenderungan lainnya dalam konteks kebijakan dan program partai adalah, PKB tampak tidak

<sup>88</sup> Wawancara dengan DPW PKB Jawa Timur

memiliki program mandiri yang berasal dari partai. Artinya, mereka tidak dapat merumuskan kebijakan atau program apa yang dapat dilakukan oleh partai. Jawaban dari narasumber menunjukkan bahwa PKB tidak memiliki rancangan program untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh partai di daerah adalah melalui kader partai yang berada di legislatif atau pemerintahan.

Partai Bulan Bintang (PBB). Meskipun gagasan-gagasan dan program PBB sangat menarik namun patut diingat kembali bahwa PBB adalah partai kecil. Pada pemilu 2009, partai ini gagal menempatkan wakil-wakil di parlemen pusat meski pun berhasil mempertahankan kursi DPRD di sejumlah propinsi dan kabupaten/kota. Karena itu sosialisasi dan pengenalan partai merupakan masalah pertama dan utama yang harus diatasi. PBB harus memperkuat sosialisasi kepada publik secara luas. Ini merupakan tugas berat dari PBB dalam menghadapi pemilu. Partai ini menghadapi masalah keterbatasan dana yang cukup serius.

Sebagai partai yang mengedepankan “hati nurani” rakyat, Hanura memiliki kebijakan yang diimplementasikan menjadi program kerja untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Meskipun diakui, program kerja ini sifatnya lebih insidental, bukan merupakan program kerja yang memiliki waktu jangka panjang dan terencana dengan tingkat keterukuran yang jelas.

Program tersebut merupakan turunan dari DPP Partai Hanura bukan merupakan inisiatif dari setiap DPW. Meskipun ada beberapa DPW yang melakukan inisiatif tersebut. Dana yang dikeluarkan ini dari kantong partai Hanura sendiri, kader-kadernya, dan ataupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Palang Merah Indonesia dan LSM-LSM lokal. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan kemudian dikritisi terkait dengan platform Hanura dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi serta bagaimana program-program kerja mereka dalam mengatasi tersebut direalisasikan dan bagaimana strategi pelaksanaan program tersebut itu berjalan hingga sampai kepada masyarakat, dalam hal ini adalah konstituen Hanura di daerah.

Pertama, platform Hanura. Secara normatif, platform Hanura mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini tercermin dalam visi dan misi yang mereka sosialisasikan dan menjadi komitmen bagi

kader-kader Hanura yang ada di tiap daerah. Namun, visi dan misi mereka ini, tampaknya, hanya sekedar sebagai jargon untuk melakukan kemenangan pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dengan program-program dalam mengatasi ketimpangan yang bersifat insidental dan tidak memiliki jangka waktu yang panjang. Apalagi, program-program tersebut hanya dilakukan menjelang pemilu. Pragmatisme politik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang calon legislatif, dengan demikian, menjadi tujuan utama di sini.

Beranjak ke Partai Nasdem, partai ini mempunyai konsep yang cukup baik mengenai ketimpangan social. Namun secara keseluruhan, semua strategi yang diusung dan dijalankan Partai Nasdem mengacu pada muara kemenangan partai dalam pemilu 2014. Sebab, lagi-lagi ditekankan oleh kader partai ini bahwa tidak ada gunanya sebuah parpol memiliki banyak kebijakan dan program yang bagus jika tidak bisa dijalankan dengan utuh. Agar bisa dijalankan dengan utuh, maka satu-satunya jalan adalah Partai Nasdem menang dalam kompetisi politik pemilu.

Mengenai PKPI. Visi dan misi PKPI secara nasional belum dapat diterjemahkan ke dalam tataran program riil kepartaian melalui struktur partai, mulai dari level nasional hingga daerah. Kebijakan program yang dilakukan belum secara tersistematika digerakkan lewat mekanisme partai dan cenderung berjalan di luar garis kepartaian. Penilaian seperti itu dapat dilihat dari perbedaan program, bahkan ada yang tidak dapat menjelaskan program riil partai di daerah.

Kendala yang dihadapi oleh PKPI adalah dana dan keterbatasan kewenangan. Sebab, belum tercapainya kekuasaan semestinya dijadikan sebagai tantangan bagi kader-kader PKPI yang sudah terdidik dan terorganisir. Bukan justru dijadikan hambatan dalam membuat program kebijakan untuk rakyat, meskipun belum meraih kekuasaan. Transformasi visi partai pada pengurus di daerah tampaknya belum secara sistematis terbangun, sehingga pembacaan akan visi partai secara operasional, menjadi berbeda-beda dan tidak terukur di daerah-daerah.

Saat memaparkan, pengurus PKPI kurang detail menjelaskan visi dan misi partai serta program kebijakan turunannya. Sebagai sebuah partai peserta pemilu, PKPI semestinya telah menjalankan kaderisasi yang baik sehingga transfer ide dan kekuatan struktur partai bisa digerakkan. Semua

itu dilakukan agar visi dan misi partai serta program-program turunannya sampai pada rakyat/konstituen, sehingga kehadiran PKPI tidak semata-mata memuluskan kepentingan kekuasaan semata.

Partai Gerindra telah memiliki program yang dijalankan di masyarakat, namun juga masih dalam tahap wacana. Program yang dijalankan oleh Partai Gerindra sebagian besar masih bertumpu terhadap program dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Oleh karena itu diperlukan kreativitas program di tingkat provinsi. Seyogyanya dalam melaksanakan program khususnya program satu desa satu milyar tidak harus menunggu Gerindra menguasai parlemen. Karena saat ini yang diperlukan oleh masyarakat adalah program nyata dan yang mendesak untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan nonekonomi. Di sisi lain, partai Gerindra seyogyanya terbuka terhadap program-program yang dijalankan. Karena di DPP Maluku Utara, peneliti tidak bisa mengakses dokumen program yang telah dilaksanakan. Padahal dokumen program tersebut sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dan program apa saja yang telah dilaksanakan.

Sekarang giliran partai Golkar. Rata-rata, pengurus DPW Golkar di semua wilayah mengajukan konsep negara kesejahteraan untuk landasan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Upaya ini dilakukan di tataran kebijakan oleh Fraksi Partai Golkar yang ada di DPRD. Di tingkat implementasi, program harus dijalankan eksekutif. Kendala-kendala yang menghadang diatasi dengan melobi fraksi-fraksi lain. Selain itu, mereka memperkuat visi kader-kadernya dengan duduk bersama, menyiapkan SDM. Dengan itu harus dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan Partai Golkar harus berpihak pada kepentingan masyarakat.

Umumnya, DPW Partai Golkar mencoba untuk melakukan konsistensi antara platform partai di tingkat nasional dengan kebijakan dan program yang dilakukan di daerah. Terdapat kesamaan persepsi antar-DPW Golkar bahwa mereka bukan partai. Persepsi tersebut digunakan untuk merumuskan konsep dan menjalankan kebijakan atau program yang harus diletakkan pada konteks politik obyektif. Kebijakan dan program parpol umumnya di daerah bersifat sejalan dengan kondisi obyektif masyarakat setempat.

Secara garis besar dibagi ke dalam dua jenis ketimpangan: sosial (pendidikan, kesehatan, gender) dan ekonomi (pengadaan infrastruktur, pemberian ketrampilan, pemberdayaan, pemberian modal). Ada pula bentuk program ketimpangan yang bersifat *charity*, misalnya yang berlangsung di DPW Malut. Program semacam ini problematikanya adalah cenderung memanjakan rakyat dan bukan membuatnya mandiri. Ada kecenderungan terjadi pola patron klien baru.

Sementara itu, dari penelusuran lapangan terhadap PDIP, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau program partai yang dikeluarkan oleh DPP, biasanya diadopsi oleh daerah dengan disesuaikan kebutuhan atau persoalan yang ada di tingkat lokal. Meskipun secara teknis ada perbedaan implementasi program antara satu DPD dengan DPD yang lain, tetapi dapat dilihat benang merahnya.

Sebagai partai politik, ketika mengimplementasikan program bukan berarti tidak ada kendala. Kendala seperti keterbatasan finansial juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, apalagi selama sepuluh tahun terakhir partai moncong putih ini mengklaim sebagai partai oposisi atau penyeimbang pemerintah. Namun demikian, kendala dapat diatasi dengan bergotong-royong.

Terakhir PAN. Para narasumber tingkat daerah ada wilayah dari partai yang sudah tiga kali mengikuti pemilu hampir kompak mengklaim bahwa visi partai mengenai ketimpangan cukup jelas, yakni merujuk pada AD/ART PAN. Agama sebagai fondasi moral untuk memahami masalah ketimpangan, sebagaimana dikemukakan narsum DPW PAN Jabar, bahwa visi PAN adalah membangun kemaslahatan umat berdasar moral agama. Landasan ini digunakan untuk melihat bentuk-bentuk ketimpangan di masyarakat. Kenyataannya, program-program operasional partai mengenai ketimpangan lebih banyak berupa kegiatan insidental yang berupa kegiatan caleg terkait kemenangan pemilihan legislatif.

## **2. Partai Politik dan Ketimpangan Nonekonomi**

Dari penelusuran dokumen partai politik, dua belas parpol mempunyai ragam perspektif mengenai ketimpangan atau kesenjangan nonekonomi. Dalam studi ini, yang dimaksudkan dengan aspek ketimpangan nonekonomi adalah kesehatan, pendidikan, gender, hak-

hak minoritas termasuk kaum difabel, minoritas agama atau etnis, dan lain sebagainya.

Tulisan ini dibagi menjadi dua sub bahasan yang pertama merupakan analisis terhadap data berupa dokumen maupun wawancara terkait Parpol. Data-data tertulis didapat dari buku AD/ART, sumber internet dan beberapa dokumen partai yang didapat di daerah. Bahasan kedua berdasarkan wawancara dilakukan di DPP parpol dan sepuluh provinsi dengan narasumber para pengurus DPW parpol.

### 2.1. Level Konseptual

Hampir semua parpol menyatakan dalam dokumen resmi cetak maupun *online* bahwa mereka berkonsentrasi pada aspek penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Partai NASDEM dengan slogan “Restorasi Indonesia” mengartikannya sebagai gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari pengertian ini, Partai Nasdem kemudian mengolah empat kata kerja sebagai kata kunci dari konsep “restorasi” yang diusungnya, yaitu: (a) Memperbaiki; (b) Mengembalikan; (c) Memulihkan; dan (d) Mencerahkan.

Dua kata kerja, yaitu “mengembalikan” dan “mencerahkan” masuk ke dalam isu keadilan sosial. Sementara pada kata “mencerahkan”, mengangkat tiga poin utama, fakta keutuhan berbangsa dan bernegara yang retak, tingkat kemakmuran rakyat Indonesia yang rendah, dan buruknya daya saing anak bangsa di kancah internasional (global).

Partai Nasdem merasa semangat identitas primordialisme makin lama makin meresahkan, pada akhirnya mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

PKB mempunyai landasan ideologis “Mabda’ Syiasi” yang memaparkan karakteristik partai, yaitu humanisme religius, peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis.<sup>89</sup> Posisi platform PKB dalam aspek ketimpangan sosial secara implisit termasuk dalam tiga tujuan partai pada pasal 7 Anggaran Dasar PKB, di mana salah satu tujuannya adalah

<sup>89</sup> Anonim. Mabda Syiasi. Diakses dari <http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syasi> pada tanggal 17 Maret 2014.

“mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual”.<sup>90</sup>

Untuk itu PKB melakukan usaha di bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.<sup>91</sup> Di bidang sosial dan budaya, PKB membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik, demi meningkatkan harkat dan martabat.

Namun dalam isi AD/ART, tidak ada penjelasan pandangan partai mengenai pemberdayaan perempuan. Untuk konteks pemberdayaan, yang tercantum di dalam isi AD/ART hanya badan otonom untuk kaum perempuan, yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB).

PKS yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ingin mengintegrasikan seluruh pandangannya tentang persoalan sosial ekonomi dalam kerangka pembentukan masyarakat madani yang dicita-citakan. Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) condong pada konsep negara kesejahteraan, setuju dengan program-program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan anggaran semaksimal mungkin. Dalam bidang kesehatan, PKS mendukung sistem kesehatan nasional yang terintegrasi. Sementara dalam bidang pendidikan PKS menyetujui anggaran pembangunan 20% agar pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas bisa digratiskan.<sup>92</sup>

Mengklaim diri sebagai “partainya *wong cilik*”, salah satu misi PDI Perjuangan adalah memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Dasa Prasetiya. Lima dari sepuluh arah umum program partai, berkaitan langsung dengan isu ketimpangan sosial atau nonekonomi, khususnya butir-butir ketiga hingga kelima: membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat; memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah; dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.<sup>93</sup>

<sup>90</sup> Lihat pasal 7 poin (c) Anggaran Dasar PKB.

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (Jakarta, MPP PKS: 2008)

<sup>93</sup> “Dasa Prasetiya”, dalam <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12>,

Golkar menyebut cita-cita perjuangannya adalah “tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuai dengan Ikrar Partai Golkar, yaitu Panca Bhakti butir (4): “Kami warga Partai Golkar bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat, untuk membangun masyarakat adil, tertib, makmur dan sentausa”.<sup>94</sup> Dengan paradigma ini salah satu fungsi Partai Golkar adalah “menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.<sup>95</sup>

Dalam dokumen “Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan” di bidang nonekonomi atau sosial budaya, cita-cita Partai Golkar adalah penguatan budaya yang dapat menghasilkan bangsa yang beriman, bertakwa, menguasai iptek dan ketrampilan, memiliki etos kerja tinggi, disiplin. Pluralitas, toleransi, dan kerukunan adalah basis integrasi bangsa.<sup>96</sup> Golkar mencantumkan agenda penting “terwujudnya kehidupan sosbud yang berkeadilan serta terjembatannya kesenjangan sosial antara Jawa dengan luar Jawa, antara pusat dengan daerah”.<sup>97</sup> Di aspek gender, Golkar cukup progresif dengan angka posisi perempuan di legislatif hasil Pemilu 2004 dan 2009 sekitar 14-18%.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang dideklarasikan 6 Februari 2008 menyatakan visinya dengan kalimat yang cukup panjang, yaitu mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>98</sup>

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengajukan misi yang terkait langsung dengan ketimpangan nonekonomi, antara lain dengan membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat serta menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak.

<sup>94</sup> Ibid., hlm. X.

<sup>95</sup> Bab IV, tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Bagian Ketiga, Fungsi, Psl.(9). Hasil Munas..., hlm. 11.

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. <http://partaiGerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-Gerindra>. Diakses pada 30 Januari 2014.

Partai Demokrat dalam Anggaran Dasar menyebutkan “memperjuangkan usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat”. Mereka juga bertekad memperjuangkan tiga nilai, yaitu nasionalisme, humanisme, dan pluralisme. Tiga konsep ini disampaikan dalam paparan umum sekaligus sebagai tiga wawasan partai yang tercantum dalam “Doktrin Demokrat”, yakni “Tri Pakca Gatra Praja”.

Humanisme yang dimaksud adalah yang menjunjung tinggi nilai martabat kemanusiaan hakiki dan universal. Pluralisme dimaknai sebagai pengakuan terhadap perbedaan terutama soal ciri khas daerah. Partai Demokrat juga menolak diskriminasi baik untuk anggota partai atau masyarakat, tercantum dalam “standar minimal prinsip anti-diskriminasi”. Misalnya, partai ini menekankan soal kesetaraan gender, penempatan posisi, pemberian bantuan, penerapan *reward and punishment*, dan akses sumber daya.

Visi Partai Demokrat adalah agar Indonesia mencapai kedaulatan yang adil dan makmur. misi partai upaya perwujudan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan. Misi partai membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam situs resminya, PAN menyebut diri sebagai partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara, yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.<sup>99</sup>

PAN mempunyai misi sama dengan partai-partai politik reformis di mana dalam hal ekonomi dan sosial mencantumkan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. PAN mendeklarasikan dirinya sebagai partai terbuka bagi warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dengan beragam latar belakang pemikitan, etnis, agama dan mandiri. Partai ini mendasarkan perjuangannya pada partai dan kemenangan pemilu, pengkaderan, dicintai rakyat serta membangun organisasi partai modern.

<sup>99</sup> www.pan.or.id

PPP secara tersurat menyampaikan problem ketimpangan dalam dokumen AD-ART, dengan menyatakan mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan budaya.<sup>100</sup> Program pembangunan kesejahteraan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan merata.<sup>101</sup>

Di bidang penegakan HAM PPP menegaskan bahwa partainya pro terhadap keragaman dan mesti menumbuhkan sikap toleran dalam prinsip egalitarian sehingga tidak terjadi diskriminasi sosial.

Ada satu catatan, dalam teks PPP terdapat pandangan kontradiktif: partai ini menyatakan memperjuangkan hak-hak asasi manusia (HAM), namun di sisi lain, PPP berusaha mencegah berkembangnya paham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme serta sekularisme. Meskipun tentunya ini berangkat dari asas partai yang berdasarkan agama.

Di ranah kesetaraan gender, di tingkat DPP secara struktural PPP mempunyai bidang pemberdayaan perempuan dan anak.<sup>102</sup> Sementara di tingkat DPW, diberikan ketentuan bahwa kepengurusan harus memberikan kuota minimal 30% kepada kaum perempuan.<sup>103</sup>

Partai HANURA mempunyai misi sebagai berikut: (1) menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

PKPI mempunyai misi yang berkaitan dengan ketimpangan nonekonomi adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang berkeadilan, bersatu, berkesejahteraan sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum, berwibawa di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> AD-ART PPP (2013), Bab III Tujuan dan Usaha, Pasal 6 (e).

<sup>101</sup> Butir D/Visi Partai. Alenia 7. Ibid hal 90.

<sup>102</sup> Pasal 15 (3) poin n. AD/ART PPP. Ibid hal 9.

<sup>103</sup> Pasal 24 (4), AD/ART PPP.. Ibid hal 13.

<sup>104</sup> Dewan Pimpinan Nasional, Buku Saku Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2010-2015.

Selain itu, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan platform mengenai ketimpangan nonekonomi, PKPI mencantumkan dalam misinya hendak mewujudkan masyarakat kewargaan yang kuat, sehat, cerdas, professional, beradab (*civilized society*) dan bersih (*clean society*) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal ini diperkuat dalam pokok-pokok perjuangan PKP Indonesia antara lain pengembangan kualitas manusia Indonesia; penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran; pelayanan umum yang layak dan adil.

PBB merupakan partai Islam dan berbasis pada Agama Islam serta berusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. PBB merupakan partai politik yang mengusung reformasi konstitusi atau amandemen UUD 1945 dengan slogan tidak ada reformasi tanpa reformasi konstitusi.

Dalam konteks pemilu 2014, PBB merumuskan dan menurunkan visi keislaman ke dalam misi-misi pokok untuk mewujudkan program empat belas “Indonesia Bersih dan Makmur”. Kebijakan dan program PBB dalam usaha mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi secara normatif mencerminkan pandangan *welfare state* atau negara kesejahteraan. Meskipun tidak menitik secara spesifik ke dalam isu ketimpangan sosial. Dalam empat belas program “Indonesia Bersih dan Makmur” terdapat beberapa isu yang “dekat” dengan aspek ketimpangan sosial, yaitu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif, produktif, dan bersih dari korupsi; menciptakan sistem pemilu yang demokratis dan menghindari politik biaya tinggi dengan mengembalikan pemilu kepala daerah kabupaten/kota kepada DPRD; merealisasikan dan mengefisienkan penggunaan anggaran 20% pendidikan dalam APBN/APBD untuk menciptakan biaya pendidikan murah dan prioritas peningkatan kesejahteraan guru; meningkatkan investasi Sumber Daya Manusia dengan memperbanyak program beasiswa S2 dan S3 ke perguruan tinggi unggul di dunia dan penugasan dan penempatan SDM pemuda yang handal guna pengembangan pembangunan di daerah.

## 2.2. Level Operasional

Jika dicermati, konsep-konsep yang ada dalam dokumen-dokumen parpol bervariasi antara bersifat sangat umum hingga detail. Pemahaman atau interpretasi DPW terhadap parpol juga ditentukan oleh faktor, apakah dia masuk dalam partai berkuasa ataukah bukan?

Dari sisi cakupan masalah, isu ketimpangan sosial atau nonekonomi diterjemahkan oleh DPW Parpol di daerah mencakup masalah-masalah demografi, kesehatan, pendidikan isu gender, hak-hak minoritas termasuk kaum difabel dan lain sebagainya. Kerja kader, secara umum dianggap oleh DPW Parpol menopang peran partai dalam isu ketimpangan nonekonomi wilayah masing-masing. Asumsi ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberlangsungan partai bertumpu pada kualitas kader.

Persoalannya, seperti yang dikemukakan di atas, partai kesulitan untuk menurunkan platform sampai tingkat kader terbawah khususnya dalam pembahasan mengenai isu ketimpangan. Masalah perspektif memaknai isu ketimpangan nonekonomi juga sering jadi problem. Sebagian DPW mampu memaparkan kerangka konseptual dan data yang kuat ketika berbicara ketimpangan nonekonomi.

Namun, ada pula DPW yang kurang dapat merujuk pada konsep partai ketika bicara isu ini. Perbedaan pemaparan masih sangat ditentukan oleh kualitas individu yang jadi DPW di tiap daerah. Tidak ada misalnya, paradigma yang menonjol terkait isu gender atau hak-hak minoritas, kecuali secara garis besar menyatakan mendukung pluralisme, toleransi, dan kebijakan afirmatif 30%.

Restorasi Indonesia yang diusung dan akan terus dilakukan Partai Nasdem mencakup empat kata kerja, sekaligus menjadi “kata kunci” perjuangan Partai Nasdem, yaitu “Memperbaiki, Mengembalikan, Memulihkan, Mencerahkan”. Dengan membaca masalah tersebut, kemudian dikeluarkanlah beberapa kebijakan maupun program parpol untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi dan nonekonomi. Hasil temuan penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa Partai Nasdem belum dapat menurunkan konsep penanganan ketimpangan nonekonomi ke dalam program yang bersifat integratif melainkan masih bersifat “*charity*”.

Salah satu yang menonjol adalah di Lampung, Partai Nasdem Provinsi Lampung mengklaim telah melakukan analisis sosial untuk memetakan permasalahan masyarakat termasuk ketimpangan sosial dengan menggandeng akademisi UNILA. Ansos itu menghasilkan program kesehatan bekerja sama dengan Kemendagri dan Pemda Bandar Lampung.

Di bidang pemberdayaan perempuan, Nasdem mengadakan beberapa kegiatan melalui bekerja sama dengan beberapa LSM dan Majalah Kartini yang diikuti 2.000 kader wanita Nasdem.

Secara umum DPW PKB dapat menggambarkan terdapat keseragaman permasalahan ketimpangan yang ada di daerah, seperti pada konteks ketimpangan sosial masalah biaya pendidikan dan kesehatan, terutama biaya obat yang mahal dan infrastruktur. Meskipun demikian, dalam isi AD/ART tidak ada penjelasan lebih lanjut yang merincikan bentuk usaha PKB di bidang pendidikan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, tidak ada rincian mengenai bentuk usaha yang dilakukan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai PKB di provinsi, kecenderungan yang terlihat adalah pemahaman visi dan misi atau platform yang cenderung retorik. Secara keseluruhan dalam penanganan ketimpangan nonekonomi masih normatif, dan sebagian besar bersandar pada kinerja pengurus atau anggota legislatif di provinsi untuk program. Namun ada pula DPW PKB yang dapat memetakan persoalan ketimpangan di daerah misalnya di DPW Jawa Timur. Sebagai rekomendasi, PKB dapat menjadikan buku "*Seminar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Legislatif-Eksekutif Kader Partai Kebangkitan Bangsa*" sebagai acuan resmi bagi pengurus partai di daerah dalam menjalankan program dan kebijakan.

Pandangan PKS tentang isu ketimpangan sosial terbentur oleh kenyataan di lapangan. Kehidupan politik riil membuat pandangan mereka bisa atau tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, dinamika internal di dalam tubuh partai sendiri tidak jarang menyandera berbagai program yang telah direncanakan. Kasus korupsi proyek sapi yang mendera pemimpin puncak PKS akhir-akhir ini adalah salah satu dari sekian banyak hal yang membuat langkah PKS, termasuk dalam implementasi visi dan program untuk mengatasi ketimpangan nonekonomi terhadang. Meski demikian,

keberhasilan PKS menempatkan kadernya sebagai pejabat publik, seperti di Jawa Barat, adalah peluang dan kesempatan yang juga ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan visi dan program mereka.

Para kader PKS di daerah-daerah mempunyai pandangan yang hampir seragam, meski dengan ekspresi beragam, mengenai isu ketimpangan sosial. Umumnya mereka menilai bahwa ketimpangan sosial adalah fakta di lingkungan mereka. Ragamnya merentang dari mulai ketimpangan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan antarwilayah di daerah bersangkutan.

Di aspek pendidikan, PKS termasuk gencar memberdayakan sekitar 60% kader perempuan PKS Jateng. Program ditujukan oleh dan untuk perempuan di sektor kesehatan, pendidikan, pemberian modal UKM, pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Namun bukan berarti dengan ini persoalan gender tidak ada di partai ini. Salah satu aspek yang kerap dikritisi dari PKS adalah persoalan poligami para elite politiknya.

Dari PDI-P, Dasa Prasetya merupakan tuntutan bagi program penanganan ketimpangan nonekonomi oleh partai ini.<sup>105</sup> Intinya, program-program itu dititikberatkan pada aspek yang sifatnya sangat memengaruhi kehidupan keseharian rakyat kecil: kesehatan dan pendidikan. Ambil contoh di bidang kesehatan. Pemegang kartu jamkesda dan jamkesmas di rumah sakit maupun di puskesmas, masih belum memperoleh pelayanan maksimal. Selain itu kebijakan pemerintah pusat tentang kartu BPJS yang dianggap masih memberatkan rakyat miskin. PDI-P juga memperhatikan bagaimana masyarakat dapat akses penuh pada program jaminan persalinan (jampersal) yang diberikan kepada ibu melahirkan dengan subsidi sebesar Rp 500.000, baik melahirkan di puskesmas maupun di bidan.

Sementara itu, ketimpangan yang menjadi konsentrasi PDI-P adalah di bidang pendidikan. Di bidang tersebut, terjadi ketimpangan antara perkotaan dengan pedesaan. Sebut saja, fasilitas pendidikan di desa yang tidak memadai serta kualitas guru, dan bantuan siswa berprestasi.

Pada tataran implementasi, PDI Perjuangan melakukan gerakan melalui dua jalan, yakni jalan langsung ke masyarakat dan jalan politik kebijakan melalui parlemen, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Di dalam AD-ART hasil kongres 2009 Bali, PDI Perjuangan

<sup>105</sup> Dasa Prasetya, dalam <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12>,

membentuk Departemen Kesehatan Perempuan, Ibu dan Anak. Selain itu, PDI Perjuangan juga membentuk Departemen Perekonomian Rakyat. Strategi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait persoalan ketimpangan nonekonomi antara lain memberikan penyuluhan, pelatihan, pendampingan.

Golkar dengan *blueprint* negara kesejahteraan 2045 mempunyai banyak agenda yang tengah dan akan dilakukan berkaitan dengan aspek ketimpangan nonekonomi. Aspek nonekonomi menyangkut pendidikan, kesehatan, gender, media massa. Dengan keuntungan merupakan parpol tradisional yang sudah berurat dan berakar di birokrasi, maka tak pelak lagi publik lebih mengenalnya. Meskipun citra sebagai partai pendukung kebijakan Orde baru masih lekat, tetapi basis tradisional partai ini yang mempunyai akses atas sumber-sumber ekonomi. Struktur yang kuat menghasilkan kesamaan persepsi terkait isu ketimpangan. Paradigma pembangunan yang “mendekati” negara kesejahteraan (sesuai namanya) kontradiktif dengan orientasi ekonomi yang ditempuhya. Meskipun mengklaim mendukung koperasi dan anti monopoli, misalnya sudah dikenal tokoh-tokoh Golkar adalah aktor ekonomi monopolistik yang ulung.

Golkar juga bertanggungjawab pada berbagai jenis kerusakan lingkungan akibat investasi di sektor sumber daya alam ketika masih berkuasa maupun tidak. Selain itu, meskipun mengklaim diri sebagai parpol pendukung toleransi dan pluralisme masih banyak kasus-kasus diskriminasi terhadap minoritas agama atau gender yang belum berhasil ditangani oleh partai ini melalui posisinya di DPRD atau DPR RI. Bukan berarti angkanya rendah, dalam konteks kebijakan afirmatif untuk perempuan di parpol, perolehan kursi perempuan Golkar di Pemilu 2004-2009 cukup tinggi. Bahkan di Kaltim partai ini berhasil mencetak kader-kader perempuan di birokrasi, juga kader perempuan berkualitas dalam komisi-komisi di DPR RI.

DPW Golkar di daerah menyebutkan beberapa strategi implementasi program antara lain dengan memberikan informasi dan sosialisasi dengan konstituen. Harapannya, masyarakat lebih pro aktif dalam mendukung dan mengakses program-program pemerintah. Umumnya masa reses di legislatif dipakai untuk “turba”. Golkar menyebarluaskan kebijakan

mengatasi ketimpangan pada publik dengan menggunakan media-media publik (surat kabar) dengan melaksanakan konferensi pers terkait apa yang dikerjakan Golkar.

Partai Gerindra telah menjalankan strategi yang berlapis untuk menarik simpati publik terkait isu ketimpangan nonekonomi, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan, khususnya dengan strategi eksternal, yaitu menjalankan program dengan mengunjungi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh DPD Gerindra Jawa Tengah, dengan sosialisasi ke kepala desa, berdiskusi dan membicarakan tentang ketahanan dan kedaulatan pangan.<sup>106</sup> Di bidang pemberdayaan perempuan selain aktif merekrut kader muda dari eks PRD yang memberi warna pada konsep kerakyatan partai ini, di bidang keperempuanan dan keluarga gerindra memfasilitasi program pemberdayaan perempuan dan KB gratis. Lebih lanjut kader-kader Gerindra ketika berkampanye menawarkan konsep baru yang bertajuk pro rakyat dan anti modal asing yang akan diberlakukan kalau Gerindra berkuasa.

Namun sebagian besar programnya masih bertajuk wacana untuk memenangkan “hati” berbasiskan kebutuhan sehari-hari, jadi tak ubahnya lembaga *charity* belaka. Antara platform ekonomi dan nonekonomi belum tersambung secara baik.

Kader-kader yang berada dalam kepengurusan DPW Partai Demokrat di sepuluh daerah secara normatif menyampaikan cakupan sektoral ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, yang berpijak pada Strategi Besar 2005-2010. Kunci menjawab masalah ketimpangan nonekonomi adalah pemerataan.<sup>107</sup> Selain itu, DPW Partai Demokrat menerjemahkan ketimpangan nonekonomi dalam variasi spektrum isu program parpol nasional: lingkungan hidup, peran *civil society*.

DPW Demokrat Jawa Timur sejauh ini memiliki pemahaman paling baik atas isu ketimpangan sosial. DPW Maluku bahkan tidak punya program ketimpangan nonekonomi lokal. Sementara DPW Partai Demokrat Sulsel merefleksikan isu-isu ketimpangan sosial melalui sinergi dengan *stakeholders*. Bentuk refleksinya adalah seminar yang mengangkat persoalan-persoalan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Namun di sisi isu

<sup>106</sup> Ibid 15

<sup>107</sup> Penggunaan konsep pemerataan juga dapat ditemukan dalam Grand Strategi 2005-2010 yang telah disampaikan di bagian awal tulisan ini.

gender tidak ada yang secara eksplisit mengemukakan programnya dari seluruh DPW Demokrat.

Narsum DPW PAN umumnya menyebutkan bahwa agama adalah basis untuk memahami ketimpangan nonekonomi. Mereka mengaitkan orientasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu faktor di balik ketimpangan ekonomi dan nonekonomi.

Di wilayah-wilayah yang disebut kaya sumber daya, seperti Jatim, Kaltim, Malut, persoalan utama adalah bagaimana menggali potensi daerah diletakkan dalam konteks maksimalkan pemenuhan kebutuhan pasar di satu sisi. Sementara di sisi lain ada ketidaksetaraan kondisi kualitas SDM. Ketimpangan, menurut mereka, terjadi pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Mereka mengemukakan metode dalam menangani ketimpangan. Namun sayangnya masih terlalu umum. Mereka hanya mengatakan harus ada keterkaitan antara paradigma penanganan masalah ketimpangan dengan kebijakan yang ditempuh. Problem lain, seringkali terdapat persoalan di tingkat kebijakan untuk menangani ketimpangan di mana pemerintah tidak bekerja maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan atau residu kebijakan, masih maraknya premanisme politik serta oportuniste masyarakat.<sup>108</sup>

Terkait dengan perumusan kebijakan, persoalan ketimpangan di tingkat lokal sebaiknya harus dilihat secara global sebelum masuk pada tataran legislatif. Selain itu diperlukan pula pendidikan masyarakat yang baik, untuk menghasilkan generasi masyarakat yang berkualitas.

PPP sebagai partai Islam di tingkat praktis belum sepenuhnya bisa mentransformasikan nilai-nilai seperti yang tercantum dalam program perjuangan. Beragam pemaknaan muncul dari sepuluh wilayah yang dijadikan penelitian.

Di Lampung misalnya, narasumber menyebutkan bahwa partainya tidak mempunyai pandangan khusus mengenai ketimpangan sosial. Di Jawa Timur memperlihatkan bahwa partai lebih banyak mengklaim bahwa usaha-usaha partai mereka dalam menanggulangi ketimpangan sosial itu dilakukan kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan strategis (legislator). Mereka mengklaim memiliki fokus memperjuangkan Perda

<sup>108</sup> Wawancara dengan DPW PAN Jabar.

atau Anggaran yang pro kesetaraan. Pandangan ini mirip dengan yang disebutkan oleh pengurus partai di Makassar.

Sebaliknya, narasumber Jateng justru menyebutkan bahwa PPP tidak siap berbicara mengenai isu ketimpangan sosial. Seringkali dalam praktiknya di lapangan, pandangan kader PPP terkait isu ketimpangan masih bersifat normatif, termasuk “kembali ke akhlak” sebagai cara mengatasi kendala ketimpangan sosial.

Di aspek gender, PPP di Jateng membangggakan perolehan 39% pengurus adalah perempuan. Apa yang menjadi hambatan dalam menterjemahkan visi dan misi PPP mengenai ketimpangan sosial menjadi tindak programatik di tingkat operasionalnya?

Dari temuan-temuan di lapangan setidaknya ada beberapa poin yang menjadi benang merah dari adanya *gap* tersebut, antara lain faktor kualitas SDM dan kaderisasi, serta kendala pendanaan. Walhasil PPP hanya bagus di tingkat platform nasional (dokumen AD/ART), namun masih minim di implementasi.

Hanura memiliki kebijakan yang diimplementasikan menjadi program kerja insidental untuk mengatasi ketimpangan nonekonomi. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari DPP Partai Hanura, bukan merupakan inisiatif dari setiap DPW.

DPW Hanura di beberapa daerah menganggap bahwa masih terjadi ketimpangan di pelbagai aspek nonekonomi: pelayanan kesehatan, tingginya angka masyarakat terkena HIV dan kematian ibu; tingginya biaya pendidikan, kerusakan lingkungan pasca tambang serta masih terbatasnya pemahaman mengenai gender.

PKPI yang menjadi salah satu partai peserta pemilu sayangnya belum menjalankan program-programnya mengatasi ketimpangan sosial. Sangat disayangkan, karena sebagian besar pengurus DPP PKPI dapat menjelaskan visi dan misi partai yang beririsan dengan persoalan ketimpangan. Secara nasional hingga daerah dapat dinilai bahwa PKPI memiliki kepekaan terhadap persoalan ketimpangan, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang sebagian besar berisi rute jalan mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan yang dijabarkan dengan visi dan misi partai.

Bentuk ketimpangan menurut pengurus PKPI berbeda-beda. DPN PKPI menilai para petani, peternak, dan nelayan masih miskin dan belum

sejahtera. Pemerintah membiarkan dan tidak membantu petani, peternak, dan nelayan serta adanya rakyat miskin yang mengalami kesulitan ketika sakit dan berobat ke rumah sakit. Terdapat satu program yang menonjol dilakukan di tingkat local, yaitu mengadvokasi KDRT.

Jika platform nasional dekat dengan visi negara kesejahteraan, DPW PBB di daerah-daerah agak lebih bisa mengkontekstualkan masalah-masalah ketimpangan nonekonomi bukan semata-mata pada platform yang dibuat oleh elit partai di tingkat pusat. Tampaknya ketokohan Yusril Ihza Mahendra yang ahli hukum tata negara engilhami sejumlah DPW PBB untuk memfokuskan visi dan kebijakan dalam isu penegakan huku (gakkum) sebagai upaya mengatasi ketimpangan nonekonomi.

Di Lampung dan Sumut misalnya, DPW PBB menghubungkan masalah ketimpangan ekonomi dengan wawasan keagamaan termasuk penegakan syariat Islam. Umumnya DPW PBB di daerah konsentrasi dengan ketimpangan pendidikan, kesehatan, dan gakkum. Di Sulawesi Selatan, DPW PBB Sulawesi Selatan cukup progresif dengan memperjuangkan keadilan, mengawal hak-hak, dan melakukan pembelaan hukum kaum difabel, sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tidak mampu, mendirikan BMT, pelatihan kader dan pesantren politik, pengobatan gratis, dan program orang tua asuh bagi anak putus sekolah, pemberian bantuan pada korban bencana, pengajaran sukarela di daerah terpencil.

Divisi perempuan PBB Lampung, Organisasi Wanita Bulan Bintang, rutin mengadakan pengajian dan diskusi politik masa kini. Kebanyakan dana program sifatnya sukarela. Gagasan *welfare state* PBB ini terkendala pada *mindset* pemerintah dalam politik anggaran yang sebagian besar digunakan untuk belanja rutin. Ketua Umum PBB, MS Kaban, pun sadar bahwa UUD Republik Indonesia memiliki mindset negara kesejahteraan namun dalam tataran praktek negara malah menerapkan ekonomi pasar.

## Kesimpulan

DARI pemaparan di atas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan. Pertama, umumnya Parpol telah memiliki platform atau visi yang jelas merespon isu ketimpangan. Namun beberapa konsep yang dikemukakan di tingkat nasional (platform resmi dalam dokumen parpol maupun website) masih bersifat normatif. Artinya, belum ada penjabaran lebih lanjut yang dapat diturunkan ke tingkat program.<sup>109</sup>

Kedua, masalah pertama memiliki implikasi lebih lanjut pada penerapan program atau kebijakan merespon ketimpangan di daerah. Pada satu sisi, hal ini memungkinkan kader untuk mengajukan kebijakan yang kontekstual dengan masalah daerah. Namun di sisi lain, hal tersebut tetap ditentukan oleh kualitas dan pemahaman kader mengenai isu ketimpangan. Tanpa pemahaman serta konsep partai yang baik, ada kecenderungan program-program yang dibuat bersifat parsial dan jauh dari akar permasalahan.

Ketiga, di tingkat daerah pemahaman mengenai signifikansi peran kader sudah mengemuka.

Dari persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, partai perlu merespon isu-isu ketimpangan dengan menurunkan platform/visi menjadi acuan program yang bersifat nasional.

<sup>109</sup> Asumsi ini boleh jadi tidak tepat karena keterbatasan akses penelitian ini pada dokumen-dokumen partai. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai keterbukaan informasi partai pada publik.

Kedua, platform atau visi yang telah diturunkan tersebut perlu dikemukakan melalui proses pendidikan kader partai yang berlaku di seluruh Indonesia, setidaknya di tingkat DPW. Hal ini akan memudahkan kader partai untuk membuat program untuk merespon isu ketimpangan di masing-masing wilayahnya. Sebaliknya, pemahaman kader yang baik di daerah dapat memberikan masukan pada program partai pusat agar tetap kontekstual dengan masalah riil yang dihadapi rakyat.

Ketiga, partai juga perlu membuat sistem rekrutmen dan jenjang yang mengedepankan kualitas kader sehingga dapat melakukan regenerasi dengan baik. Pada akhirnya, parpol harus menjalankan tiga hal tersebut jika hendak mempertahankan kesinambungannya sebagai partai politik modern yang tidak tergantung pada sosok individual saja.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Kristiansen S. dan P. Santoso “*Surviving Decentralisation? Impacts of Regional Autonomy on Health Service Provision in Indonesia*” dalam *Health Policy*, 77, 2006.
- Investing in Indonesia’s Health: Challenges and Opportunities for Future Public Spending*, Jakarta, World Bank, 2008.
- Local Budget Analysis in Indonesia: A Review of Local Budgets in 41 Districts/Municipalities*, Seknas-FITRA and The Asia Foundation, Jakarta, 2010.
- Health Financing in Indonesia: A Reform Road Map*. Washington DC, World Bank, 2008.
- William Darity, Jr., Ed., *International Encyclopedia of The Social Sciences* 2<sup>nd</sup> edition, Vol. 4, Macmillan, USA, 2008. Hlm. 1-3.

### DOKUMEN

- Dokumentasi kliping berita Fraksi Demokrat Sumatera Utara, Oktober 2011-April 2013.
- Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (MPP PKS, Jakarta, 2008).
- Paradigma Baru Partai Golkar, III. Visi Perjuangan, Hasil Munas. AD/ART PAN 1881.
- Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (MPP PKS, Jakarta, 2008).

AD-ART PPP (2013).

Dewan Pimpinan Nasional, Buku Saku Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2010-2015.

### **SUMBER INTERNET**

<http://www.politik.lipi.go.id>

[www.berdikarionline.com](http://www.berdikarionline.com)

<http://partaigerindra.or.id/>

<http://www.pks.or.id/>

<http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/>

<http://www.demokrat.or.id/>

<http://partaigolkar.or.id>

[http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.](http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12)

[php?mod=viewpage&id=12,](http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12)

[http://www.merdeka.com/politik/ini-17-butir-rekomendasi-hasil-rakernas-iii-pdip-2013/rekomendasi-butir-1-6.html,](http://www.merdeka.com/politik/ini-17-butir-rekomendasi-hasil-rakernas-iii-pdip-2013/rekomendasi-butir-1-6.html)

[http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syasi pada tanggal 17 Maret 2014.](http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syasi_pada_tanggal_17_Maret_2014)

[http://partaiGerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-Gerindra.](http://partaiGerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-Gerindra)

<http://www.slideshare.net/MediaCenterGolkar>

# **Lampiran-Lampiran**

## **LAMPIRAN 1**

Profil Partai Politik Berdasarkan Dokumen dan Website

### **1. PARTAI DEMOKRAT**

#### **A. VISI**

PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

#### **B. MISI**

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misinya, Partai Demokrat mengembangkan sejumlah program unggulan pro rakyat. Dalam sembojannya, Partai Demokrat menyebutkan bahwa demi meningkatkan kesejahteraan rakyat maka Partai Demokrat mengembangkan program unggulan yaitu :

1. Raskin
2. BOS (Bantuan Operasionalisasi Sekolah)
3. Sekolah gratis SD sampai SMP
4. Bantuan Lansia Terlantar
5. Bantuan Penyandang Cacat
6. Program Keluarga Harapan (PKH)
7. PNPM Mandiri
8. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
9. Partai Demokrat juga mempunyai kode etik partai.

## **2. PARTAI GOLKAR<sup>110</sup>**

### **A. VISI**

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian

<sup>110</sup> Lihat [www.golkar.or.id](http://www.golkar.or.id) dan <http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Visi-Indonesia-2045-Negara-Kesejahteraan.pdf>

dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini, maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

## **B. MISI**

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit sistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

### 3. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah salah satu partai politik peserta pemilu 2014 yang sebagai partai baru. Walaupun secara identitas formal merupakan partai baru, tetapi jajaran pengurus dan para calon legislatifnya adalah elit-elit politik lama yang berpindah dari parpol lama ke parpol baru ini.<sup>111</sup>

Jika melihat dari visi yang ditekankan oleh partai ini, maka sebenarnya isu keadilan sosial secara tersirat memang telah ada. Visi partai ini secara tegas menyatakan “mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan visi tersebut, maka misi partai ini menegaskan langkahnya dalam menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui, dan sekaligus menjadi jargon pergerakan, “Restorasi Indonesia”.

Bagi Partai Nasdem, Restorasi Indonesia diartikan sebagai gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari pengertian ini, Partai Nasdem kemudian mengolah empat kata kerja sebagai kata kata kunci dari konsep “restorasi” yang diusungnya, yaitu: (a) Memperbaiki; (b) Mengembalikan; (c) Memulihkan; dan (d) Mencerahkan.

Dari empat kata kerja di atas, dua kata kerja, yaitu “mengembalikan” dan “mencerahkan”, dapat dimasukkan ke dalam isu keadilan sosial karena ada beberapa program restorasi di kedua kata kerja ini yang relevan. Namun pada akhirnya, jargon restorasi ini bukanlah jalan pintas. Bagi Partai Nasdem, syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh,

<sup>111</sup> Lihat websitenya: [www.nasdem.or.id](http://www.nasdem.or.id)

dan terpadu, melibatkan populasi besar dengan pengeralahan energi berpikir yang kuat dan terarah dalam jangka waktu panjang.

### **“Mengembalikan”**

Salah satu fakta yang diangkat oleh Partai Nasdem dalam konteks kata kerja ini adalah kekecewaannya akan eksploitasi sumber daya alam tanpa mengindahkan kepentingan nasional. Menurut Partai Nasdem, program restorasi yang dapat “mengembalikan” kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah dengan melakukan koreksi secara total terhadap berbagai kontrak tambang sehingga hasil koreksian tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Selain itu, juga menegakkan kedaulatan laut yang difokuskan pada perlindungan seluruh kekayaan laut dari pencurian (*illegal fishing*).

### **“Mencerahkan”**

Tiga poin utama yang diangkat dari kata kerja ini adalah fakta keutuhan berbangsa dan bernegara yang retak, tingkat kemakmuran rakyat Indonesia yang rendah, dan buruknya daya saing anak bangsa di kancah internasional (global).

Partai Nasdem merasa semangat identitas primordialisme semakin lama semakin meresahkan, dan pada akhirnya mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu program restorasi yang diangkat di poin adalah mencoba menanamkan (kembali) nilai-nilai toleransi dengan memasukkan pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan.

Penghargaan terhadap kemajemukan tampaknya menjadi sorotan penting dalam isu keadilan sosial ini. Sebagai partai yang sangat menghargai kemajemukan, Partai Nasdem bertekad merangkul semua komponen anak bangsa agar secara maksimal mampu melakukan restorasi dan perubahan demi Indonesia yang maju dan bermartabat. Hal tersebut ditunjukkan pada keterbukaan partai dengan terlibatnya para aktivis Tionghoa. Contohnya: Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Nasdem berasal dari keturunan Tionghoa (Yan Darmadi).

Pada aspek tingkat kemakmuran rakyat yang rendah, maka isu keadilan pembangunan menjadi faktor utama yang bermasalah menurut partai ini. Karena itulah, perlu segera melakukan re-distribusi pusat pertumbuhan dengan mendekatkan industri ke bahan baku, memiliki *grand*

*design* pembangunan yang terpadu dan ketat, menegakkan kemandirian pangan yang berkelanjutan, serta mengubah ukuran kemiskinan sesuai dengan *Human Development Index*.

Isu “keadilan pembangunan” tampaknya menjadi isu yang cukup strategis bagi partai ini. Bahkan isu ini dibawa secara terbuka oleh beberapa caleg Partai Nasdem, yang salah satunya adalah Fitriati Rangkuti. Caleg daerah pemilihan Sumatera Utara dua dengan nomor urut enam ini secara tegas menyatakan, diskriminasi pembangunan sudah sangat vulgar dan diperlihatkan begitu arogan oleh pemerintah sekarang. Padahal di sisi lain, komitmen pemerintah idealnya adalah pemerataan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>112</sup> Pada konteks dapilnya, caleh ini menyatakan isu keadilan pembangunan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan *power plan* untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera.

Pada aspek buruknya daya saing, maka Partai Nasdem secara tegas menyatakan dalam program restorasinya untuk memberikan sekolah gratis sampai sekolah lanjutan atas.

### **Manifesto Politik**

Partai Nasdem juga memiliki manifesto politik sebagai bentuk dari sasaran akan visi dan misinya. Banyak sekali pernyataan dari manifesto-manifesto ini, tetapi setidaknya beberapa poin manifesto di bawah ini kurang lebih menjelaskan bagaimana isu keadilan sosial diangkat oleh partai Nasdem. Poin-poin ini, sebenarnya masih belum bisa dinilai bahwa Partai Nasdem punya sikap tegas terkait isu keadilan sosial. Akan tetapi, secara interpretatif dari peneliti, poin-poin tersebut dapat (saja) dimasukkan ke dalam isu “keadilan social”. Beberapa poin tersebut adalah:

“Kami menolak demokrasi yang sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum.” Poin ini memperlihatkan bahwa Partai Nasdem mencoba menata demokrasi Indonesia dengan tata pemerintahan yang jelas demi pemenuhan kesejahteraan umum. Perwujudan kesejahteraan umum secara logis akan berkorelasi secara positif pada pemenuhan hak-hak warga negara secara adil.

<sup>112</sup> Lihat artikel terkait di website Partai Nasdem, dengan judul “Fitriati: Diskriminasi Pembangunan Sangat Vulgar” (publikasi pada tanggal 19 Desember 2013).

“Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan.” Pada poin ini, isu “keadilan sosial” terangkat, walau di sisi lain masih belum jelas sasaran dalam bentuk program kerja.

“Kami berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.” Poin ini memperlihatkan isu keadilan sosial (telah) terhubung dalam bentuk pluralisme dan sangat didukung kuat oleh Partai Nasdem.

#### **4. PARTAI HANURA**

Pendirian Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting. Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai Hanura.

Pendeklarasian partai Hanura diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta. Delapan kesepakatan tersebut adalah:

1. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
5. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan,

sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.

6. Kita kembangkan semangat perjuangan, "Semua untuk satu, satu untuk semua". Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.
8. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.

## **Visi & Misi Partai HANURA**

### **A. VISI**

1. Kemandirian Bangsa

Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

2. Kesejahteraan Rakyat

Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat "kesejahteraan rakyat Indonesia", sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

### **B. MISI**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.

3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
5. Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
7. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **NILAI DASAR PERJUANGAN**

Nilai dasar perjuangan Partai adalah ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

1. Ketakwaan: Dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemandirian: pribadi yang bermartabat, mengutamakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing.
3. Kebersamaan: selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa dan adat istiadat.
4. Kerakyatan: peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat dan konsisten dalam memperjuangkannya.
5. Kesederhanaan: selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja.

Ikrar Partai Hanura yang selalu wajib dibacakan pada setiap pertemuan partai dan upacara partai di setiap tingkatan:

1. Kami warga Partai Hanura adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kami warga Partai Hanura adalah kader bangsa, mengutamakan kemandirian dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila UUD 1945, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
3. Kami warga Partai Hanura adalah pengembang amanat penderitaan rakyat, mengutamakan kebersamaan dalam melaksanakan reformasi menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.
4. Kami warga Partai Hanura adalah patriot pembangunan semesta, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam berjuang mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
5. Kami warga Partai Hanura adalah pelopor pembaharuan, mengutamakan kesederhanaan dalam sikap dan perilaku kehidupan, profesional, serta bertanggung jawab dalam bekerja untuk keunggulan bangsa

## **5. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

### **A. BIDANG PEREKONOMIAN**

PK Sejahtera meyakini, pertama, kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan. Mengingat penduduk miskin terutama adalah para petani dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Kurangnya perhatian dan lemahnya kebijakan pada sektor pertanian merupakan paradoks, mengingat potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sangat besar. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian.

*Kedua*, ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta tertutupnya antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan terhadap gejolak sosial. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan hal ini mengakibatkan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan parsialitas pembangunan sektoral. PKS berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi, apabila koordinasi lintas sektoral dikelola secara baik dengan membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain dalam kerangka kerja integratif. Keterkaitan, baik ke depan maupun ke belakang

dalam setiap sektor, terjadi dalam sebuah harmoni yang terintegrasi akan memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, dan menghasilkan pemerataan pendapatan.

Ketiga, tekanan global dan rendahnya daya saing produk industri nasional tidak akan dapat diselesaikan sebelum kita menyadari, bahwa hakikat persaingan di era global ini sarat dengan informasi yang asimetrik. Berbagai upaya harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku industri dalam mengelola informasi, bukan hanya informasi berkaitan dengan produksi, tetapi juga perilaku pasar di tingkat global.

Mereka berkeyakinan bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui penelitian dan pengembangan adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi turut menentukan buruknya iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar kebijakan ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan rente (*rent seeking*) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera meyakini bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakkan sektor riil.

Kelima, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA yang berlebihan selama ini telah menuai bencana bagi rakyat. Karenanya, PKS meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upaya untuk mereduksi kerusakan alam hanya bisa direalisasikan apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input SDA. Proses teknologi yang bersih dan hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita.

Keenam, PKS memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. PKS berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah (*backtracking*) untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PKS berpendapat, bahwa stabilitas makro ekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan bergeraknya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PK Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

## **B. BIDANG SOSIAL BUDAYA**

Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dan multijalur. Tak cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi atau didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka. Proses pembangunan dalam wujud apapun, harus berpusat pada manusia dan warga masyarakat sebagai subyek utama.

Karenanya misi yang diemban PKS dalam bidang sosial-budaya adalah “Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dan kemajuan budaya demi mengangkat Martabat Bangsa”. Dalam bahasa yang lebih gamblang dapat diterjemahkan sebagai “Menghapus kebodohan,

kekerasan sosial, dan keterbelakangan budaya”. Sebab, kita memandang kebodohan, kekerasan, serta keterbelakangan sebagai musuh sosial seluruh bangsa. Demi mendekatkan realitas dengan visi yang dicitakan itu, maka langkah utama PK Sejahtera adalah:

Pertama memastikan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga acap terbongkar adanya mafia dan spekulasi barang yang mengontrol harga di pasar. PKS menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulasi yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulasi.

Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PKS mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, bahkan diupayakan gratis untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9-12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas. Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja.

Ketiga, Terwujudnya status kesehatan paripurna bagi semua, sehingga dapat membangun bangsa dan negara dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt. Kesehatan paripurna dengan visi sehat badan, mental spiritual dan sosial yang dimulai dengan sehat individu, sehat keluarga, sehat masyarakat, dan sehat bangsa dan negara. Dengan demikian kesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi. Sehingga atas dasar itu, maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan bersama seluruh elemen bangsa menuju derajat kesehatan yang lebih baik. Secara umum pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada upaya mengimplementasikan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan mengembangkan sistem pendukungnya secara berkualitas, antara lain: peningkatan kuota anggaran kesehatan, perbaikan sistem

pembiayaan kesehatan, peningkatan peranserta masyarakat, peningkatan sumberdaya kesehatan profesional yang berakhlakulkarimah, perbaikan sistem manajemen kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta kefarmasian kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses bagi masyarakat, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebijakan kesehatan yang berkeadilan.

Keempat, penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (*character building*) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (*mental model*) tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu, perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditanam. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yang harusterus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan.

Kelima, gerakan kebudayaan yang progresif. PKS menilai, kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik sudah saatnya untuk dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif dalam hal: pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan buday lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern.

## **6. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**

### **A. Visi**

PKP INDONESIA memandang bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu senantiasa dikembangkan dengan mengacu pada dua hal pokok:

1. Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 serta Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang dirinci sebagai berikut :
  - Wawasan Kebangsaan yang senantiasa harus dipupuk dan ditumbuh-kembangkan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat bangsa yang besar dan kokoh, nasional, bersatu-padu, beradab, berbudaya, dan tidak diskriminatif.
  - Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga kedaulatan dan dikembangkan eksistensinya melalui pemerintahan yang bersih, jujur, adil, berkualitas, demokratis, berwibawa, kuat, taat pada konstitusi, hukum, serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  - Peri kehidupan rakyat yang bersatu dan bekerjasama, berkeadilan dan demokratis, berkesejahteraan sosial, berkarakter, beretika – bermoral – berakhlak mulia, memiliki etos kerja keras yang tinggi serta profesional.
2. Keadaan nyata masyarakat serta kecerdasan yang dicapai setelah tahun 1945, yang pada gilirannya juga menghasilkan tuntutan terhadap sesama bangsa dan negara.
  - Kehidupan bangsa dan negara pada saat ini dan ke masa depan menyaratkan diperlukannya penegakan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial sebagai suatu kesatuan makna dan nafas perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
  - Persatuan bangsa hanya dapat terpelihara dan semakin kokoh bila ada keadilan. Keadilan yang diperjuangkan terwujudannya haruslah memperkuat dan memperdalam makna persatuan.
  - Dengan demikian, maka visi PKP INDONESIA adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

## **B. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, PKP INDONESIA mengemban misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945 sepanjang masa. Untuk itu PKP INDONESIA akan bekerjasama dengan segenap komponen bangsa dan lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, termasuk TNI dan POLRI.

2. Mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat untuk mewujudkan peri-kehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
3. Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk melalui peri kehidupan yang adil, setara, merata dan tidak diskriminatif.
4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih, tidak menyalahgunakan wewenang, berwibawa, kuat dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar mampu menyelenggarakan urusan negara dan kepentingan negara untuk melayani kepentingan masyarakat.
5. Mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang kuat, sehat, cerdas, professional, beradab (*civilized society*) dan bersih (*clean society*) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat, sehingga dapat berperan dalam pergaulan dunia, dan dihormati, serta mampu bersaing dan berkembang dalam kompetisi ekonomi dan politik secara global.

Dengan demikian maka misi PKP INDONESIA adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang berkeadilan, bersatu, berkesejahteraan sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum, berwibawa di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu bersaing serta dihormati dalam pergaulan dunia.

### C. Pokok-Pokok Perjuangan

1. Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Nyata Atas Negara.  
Kedaulatan rakyat yang nyata atas negara, mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemerintah harus mendapat mandat dari rakyat melalui Pemilihan Umum langsung yang demokratis, jujur dan adil.

- b. Penyelenggaraan negara harus sejalan dengan kepentingan umum dan kepentingan rakyat melalui kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga perwakilan disemua tingkat pemerintahan dan administrasi.
  - c. Penyelenggaraan negara diawasi atau dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui lembaga perwakilan dan pendapat umum.
  - d. Penyelenggaraan negara harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat.
2. Pancasila Dan UUD 1945 Sebagai Kenyataan Yang Hidup.  
PKP INDONESIA memperjuangkan agar Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi acuan dasar/acuan utama dalam:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan negara dalam arti luas (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan sebagainya).
  - b. Perilaku penyelenggara negara /pemerintahan yang baik guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengabdikan dan melayani masyarakat.
  - c. Pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berpemerintahan yang adil dan bermartabat.
3. Pemerintahan yang Mampu Menghadapi Tantangan Berat ke Masa Depan.  
Pemerintahan yang harus mempunyai visi ke depan, mempunyai fokus dan prioritas kebijakan, menghormati mewujudkan HAM dan meralisasikan aspirasi rakyat. Pilihan keputusan rakyat dihargai dan dihormati, mendapat dukungan politik dan keabsahan demokratis, adil dan bermoral, bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan dapat mencegah terulangnya "*money politics*" dan pemusatan (sentralisasi) kekuasaan melalui hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemerintah supaya mempunyai fokus dan priotitas kebijakan seperti "*option for the people*" yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. PKP INDONESIA berpandangan bahwa fokus dan prioritas pemerintah yang terbentuk melalui pemilihan umum adalah yang memiliki legitimasi hukum, moral, intelektual dan spiritual dapat melakukan :
    - Pencegahan disintegrasi bangsa atau pemulihan integrasi bangsa.
    - Pemulihan ekonomi yang lebih merata dengan *option for the people*.

- Pemulihan keamanan dan ketenteraman masyarakat.
- Penanganan sistematis terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Penjagaan, pengawasan dan pengendalian batas-batas negara di matra darat, laut dan udara.
- Semua lembaga negara dan institusi pemerintahan perlu mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan membatasinya, termasuk Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan, yang mengatur secara rinci tugas, wewenang, dan wilayah tanggungjawab Presiden, hubungan fungsional dengan lembaga tinggi negara lainnya dan sebagainya.
- *Checks and balances* atau kedudukan yang berimbang dan saling mengawasi diantara lembaga-lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, MA, BPK). Untuk itu diperlukan perubahan dalam hal kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga tinggi negara.
- Mulai tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden telah dipilih langsung, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam satu paket melalui Pemilu Capres dan Cawapres.
- Optimalisasi fungsi lembaga perwakilan rakyat, disemua tingkat kewenangan dan administrasi negara tidak hanya dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah, akan tetapi juga melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi budget yang benar-benar mengacu pada aspirasi dan kepentingan utama rakyat banyak (BAB VIII Pasal 23 dan pasal 23 a s/d 23 UUD1945 amendemen).
- Perubahan yang signifikan pada lembaga yudikatif dan kinerja aparat penegak hukum pada umumnya, (pasal 24 dan pasal 24 a s/d 24 c UUD 1945 ter amandemen) dengan perubahan peradilan komisi yudisial yakni Mahkamah Konstitusi disamping Mahkamah Agung.
- Mulai tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam satu paket melalui Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Karena itu PKP INDONESIA harus dapat bekerjasama dengan partai-partai politik dan komponen bangsa untuk menempatkan kader/kandidat sebagai calon kepala daerah.

- Reformasi di bidang hukum, hankam dan politik harus segera diikuti oleh reformasi birokrasi agar kebijakan politik pemerintah benar-benar dapat terlaksana pada tingkat managerial dan operasional.
- Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah berlangsung lebih demokratis, jujur dan adil dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada partai-partai politik untuk menawarkan konsepsi dan program secara rasional dan bermutu kepada rakyat. Dalam kaitan itu maka sistem Pemilu dan PILKADA dan penyelenggaraan Pemilu secara menyeluruh perlu diperbaiki.

#### **D. Mencegah Disintegrasi Bangsa.**

Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa sebagai langkah mendesak sudah diawali. Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa dilakukan melalui respon yang arif, jelas dan tegas terhadap tuntutan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pemulihan wibawa dan efektivitas pemerintah, pemisahan TNI dan POLRI, serta perwujudan otonomi daerah secara nyata yang telah dimulai pada tahun 2001.

#### **E. Perwujudan Otonomi Daerah Secara Nyata.**

Otonomi daerah yang nyata dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian kewenangan kepada daerah sesuai UUD Otonomi Daerah.
2. Perimbangan keuangan antara pusat-daerah secara adil, termasuk pengelolaan hasil sumber daya alam/kekayaan alam secara efisien dan hati-hati.
3. DPRD adalah lembaga legislatif di daerah yang terpisah dari pemerintah daerah/eksekutif.
4. Kepala daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPRD. Mulai tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
5. Struktur dan kedudukan administrasi bertumpu di tingkat Desa, harus memperhatikan pranata sosial dan kearifan lokal tradisional

6. Keleluasaan pengembangan budaya daerah dilakukan berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga keunggulan-keunggulan budaya merupakan sumbangan bagi perwujudan budaya nasional yang mampu menyerap keutamaan dari berbagai budaya daerah maupun budaya bangsa-bangsa lain di dunia.
7. Meniadakan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah dan membebani rakyat secara tidak wajar dan tidak adil di daerah serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang di atasnya
8. Dukungan dan bantuan pusat kepada daerah lebih banyak berbentuk “*block grant*” yang lebih leluasa digunakan daerah sesuai kebutuhan rakyat di daerah bersangkutan, seperti bantuan penghapusan biaya sekolah dalam program wajib belajar 9 tahun.
9. Kewenangan di bidang pertahanan keamanan, peradilan/hukum, moneter, fiskal dan luar negeri tetap berada di pusat.

#### **F. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pemberdayaan masyarakat, perempuan, pekerja, petani, nelayan, konsumen, lembaga swadaya, pemuda dan sebagainya agar dapat mengembangkan diri demi pencapaian kemandirian optimal kemampuan menjadi penyeimbang kekuasaan negara. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan kultural termasuk mutu pendidikan yang harus sejalan dengan pemberdayaan di bidang politik, agar demokrasi berkembang menjadi demokrasi yang produktif, mensejahterakan rakyat serta mencerdaskan bangsa.
2. Kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan, merupakan hak asasi dan hak politik rakyat dalam berdemokrasi, yang mencakup :
  - a. Kemerdekaan pers dan media massa yang bertanggung jawab.
  - b. Kemerdekaan warga untuk mengemukakan pikiran dan pendapat
  - c. Hak warga negara untuk memperoleh informasi.Kesemuanya adalah dalam rangka perwujudan masyarakat madani (kewargaan).

### **G. Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.**

Yang paling menderita akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang, serta penduduk di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya pemulihan ekonomi haruslah pada tempat-tempat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kelompok masyarakat yang tergolong penduduk dibawah garis kemiskinan yang masih hidup tidak layak, dan terpinggirkan.

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan memberi perhatian besar kepada pembangunan peningkatan produksi pertanian, nilai tukar hasil pertanian dan pendapatan petani, industri yang berbasis sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mempunyai semangat dan ketrampilan wirausaha, mengatasi persaingan ekonomi yang kurang sehat sehingga meningkatkan daya saing nasional, regional dan global.
2. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas kerja, melalui berbagai program khusus. Seperti program Pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, pemberdayaan hutan-hutan produksi dan lahan rawa untuk pertanian, serta program-program sejenis yang bermakna keberpihakan kepada rakyat dibawah garis kemiskinan harus dilaksanakan dengan benar diawasi secara sungguh-sungguh, serius dan konsisten agar tidak terancam oleh penyalahgunaannya demi kepentingan kelompok kecil tertentu.
3. Pengembangan usaha besar yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan ramah lingkungan, berorientasi ekspor, barang modal, menjunjung industri pertanian dan kelautan dalam arti luas, perlu tetap diberi kesempatan, dukungan sepanjang struktur pembiayaan, produksi dan pemasarannya tidak menekan peluang dan kesempatan berkembang dari pihak koperasi usaha kecil dan menengah.

### **H. Kualitas Manusia Indonesia.**

1. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan secara nyata, untuk mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

2. Pengembangan sumberdaya manusia yang berpengetahuan, berkeadilan, trampil, berkarakter, berbudi pekerti luhur, melalui pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan guru dan mutu guru sebagai faktor kunci.
3. Reaktualisasi dan pemutahiran pembangunan bangsa secara kontekstual harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan di tingkat nasional dan internasional di semua aspek kehidupan. Untuk itu, dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman, penghayatan dan kemampuan analitis kritis secara koprehensif integral, maka metoda belajar mengajar pada sistem pendidikan nasional harus diubah dari metoda “membaca-menulis-menghapal” dengan metoda “berfikir-memahami-mencipta”.
4. Mutu pendidikan formal dan informal diperbaiki terlebih dahulu yaitu dilakukan dengan perbaikan mutu guru dan dosen. Seleksi penerimaan guru dan dosen harus diperketat, terutama dari aspek kognitif, psikomotorik dan melalui sistem pemagangan yang terencana dengan baik. Tingkat pendapatan guru dan dosen di Indonesia sudah harus dinaikan secara memadai. Guru dan dosen sesungguhnya harus merupakan profesi seperti halnya dokter, *lawyer*, akuntan, notaris dan konsultan.

### **I. Penegakan Hukum yang Berintikan Keadilan dan Kebenaran.**

Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak dasar rakyat, seperti:

1. Kemerdekaan dan kemandirian hakim pengadilan harus memiliki standar moral, yang tinggi, terpuji dan tetap mempunyai akuntabilitas pada rakyat.
2. Ketentuan hukum yang disusun secara demokratis dan berintikan keadilan, dan kebenaran bukan sekedar peraturan harfiah yang disusun berdasarkan kepentingan kekuasaan, kepentingan politik dan atau golongan tertentu.
3. Mengembangkan budaya hukum (*legal culture and legal behavior*) melalui keteladanan dari para penyelenggara negara dan lapisan kepemimpinan masyarakat.

### **J. Pelayanan Umum yang Layak dan Adil.**

Standar pelayanan umum yang layak dan adil yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Warga negara dan penduduk mempunyai kewajiban membayar pajak dan pungutan lain yang legal, dan berhak menerima pelayanan yang layak dari negara.
2. Negara mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umum dan berhak memungut pajak dan pungutan lainnya yang legal dari warga negara dan penduduk.
3. Warga negara dan penduduk yang tidak memenuhi kewajibannya mendapat sanksi yang adil dan aparaturnya/pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya melayani kepentingan umum juga mendapat sanksi yang setimpal dan adil.
4. Perlu segera dihapus oleh pemerintah pungutan-pungutan yang tidak legal dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Hal-hal tersebut erat kaitannya dengan UU Pelayanan Umum dan UU Anti Diskriminasi beserta pelaksanaannya secara konsekuen dan konsisten.

### **L. Pemulihan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat.**

1. Mengembalikan jati diri TNI dan POLRI sebagai pejuang profesional milik rakyat yang melindungi rakyat yang berdaulat, dan sebagai alat negara yang melindungi keselamatan segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai pendukung dan pengawal Pancasila dan UUD 1945. TNI dan POLRI dikembalikan sebagai milik bangsa yang utuh, bukan milik golongan, bukan untuk berkepentingan diluar hukum ataupun alat penguasa tertentu.
2. Speksifikasi peran TNI di bidang pertahanan keamanan sedangkan POLRI di bidang perlindungan masyarakat dan penegakkan hukum adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketajaman pelaksanaan tugas pokoknya, Perihal pertahanan dan perihal keamanan adalah dua hal yang tidak mungkin saling dipisahkan secara mutlak.
3. Reposisi TNI dan POLRI perlu diikuti upaya terencana dan sistematis yang menyangkut perwujudan dan fungsi produk hukum yang baru, yang disertai oleh peningkatan kesiapan operasional, sumber daya

manusia dan kesejahteraan prajurit dan keluarga prajurit. Bukan perubahan perangkat hukumnya saja, akan tetapi perubahan nyata dilapangan dan pada tingkat managerial dan operasional, sehingga perubahan tersebut dapat dirasakan rakyat secara nyata dan bermanfaat.

4. Reposisi TNI maupun POLRI sebagai pendukung dan pengawal Pancasila dan UUD 1945 secara tepat serta arif sangat membantu keberhasilan pemulihan wibawa dan efektivitas pelaksanaan tugas. sehingga diharapkan dapat merupakan daya tangkal terhadap berbagai potensi ancaman, kecenderungan, realitas gangguan keamanan yang merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pulihnya wibawa dan efektivitas TNI dan POLRI berkaitan erat dengan berhasilnya upaya pemulihan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pada gilirannya, pulihnya keamanan dan ketentraman masyarakat akan memberi sumbangan signifikan bagi pemulihan ekonomi dan stabilitas pada umumnya.
5. Institusi TNI sebagai garda NKRI harus dikembangkan menjadi kekuatan utama, terutama menghadapi musuh negara baik dari dalam maupun dari luar. Juga harus difungsikan untuk menjaga daerah-daerah perbatasan, baik di laut maupun di darat dan pulau-pulau kecil di territorial Indonesia. TNI harus dikembangkan menjadi organisasi pertahanan dan keamanan, POLRI harus dikembangkan menjadi organisasi yang menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegak hukum yang professional, sehingga dapat diandalkan, dibanggakan untuk kejayaan bangsa, kemanusiaan dan diperhitungkan oleh negara-negara lain.

#### **M. Beban Hutang yang Ditanggung Negara dan Rakyat.**

1. Perlu dikembangkan kebijakan dan upaya yang jelas dan sistematis untuk menyelesaikan masalah hutang luar negeri segera melalui pengurangan hutang luar negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap hutang luar negeri tersebut secara bertahap tetapi jelas terukur dan harus dihindari kebiasaan membuat hutang luar negeri baru.
2. Kebijakan dan upaya yang jelas dan sistematis untuk mengurangi beban negara dan rakyat atas biaya rekapitulasi dan restrukturisasi perbankan dan usaha swasta besar.

3. Satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penangkapan dan proses peradilan yang cepat dan tegas terhadap koruptor-koruptor yang merugikan negara, kemudian asset yang dimiliki harus disita pemerintah untuk mengembalikan uang negara dan membayar hutang pinjaman negara.

#### **N. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).**

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan prioritas dalam memelihara kepercayaan rakyat kepada pemerintah, penyelamatan ekonomi maupun efektivitas jalannya pemerintahan. Penanganan korupsi menyangkut tiga aspek pokok yakni : *preventif, represif, dan edukatif*.

1. Aspek *Preventif* adalah melakukan review pada manajemen publik dan administrasi keuangan negara termasuk penetapan standar satuan biaya lokal untuk mencegah praktek *mark up* harga dan proyek fiktif. Selain itu dilakukan perubahan pada manajemen publik dan administrasi negara termasuk sistim kerja terukur dan kesejahteraan PNS. Hal ini untuk menutup peluang melakukan korupsi.
2. Aspek *Represif* berupa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Hal ini akan memakan waktu panjang dan rumit, mengingat skala dan mata rantai korupsi yang makin panjang telah demikian luas dimasa lampau. Yang terpenting adalah dua hal yakni:
  3. makin menjunjung tanda kesungguhan pemerintah dalam menangani perkara-perkara korupsi masa lalu yang berskala besar dan sangat menyangkut keadilan masyarakat (*landmark cases*);
  4. penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi baru yang muncul setelah terbentuknya pemerintahan baru dan pengusutan serta pengungkapan sistematis terhadap kasus-kasus korupsi lama.
5. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintah dalam menangani korupsi dapat tumbuh dan terpelihara.
6. Aspek *Edukatif* berupa budaya anti korupsi yang diawali dengan pendidikan moral, keteladanan dari para penyelenggara dan pimpinan masyarakat, upaya sistematis melalui pendidikan masyarakat serta penghargaan terhadap kerja keras dan prestasi yang akan meningkatkan daya tahan terhadap godaan korupsi.

## 7. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Seiring reformasi, partai bermunculan dengan berbagai platform perjuangan dan tujuan. Salah satu partai yang lahir dalam masa reformasi tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra). Partai Gerindra dideklarasikan pada 6 februari 2008 (Manifesto Perjuangan Gerindra, 2008). Dalam deklarasi tersebut Partai Gerindra menyatakan visi dan misi serta manifesto perjuangan partai adalah terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia merdeka, berdaulat, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sesuai dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Kemudian lebih lanjut mengenai visi dan misi serta program partai akan dipaparkan dalam tulisan dibawah ini.

Partai Gerindra memiliki visi' partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan visi tersebut maka dalam operasionalnya Partai Gerindra merumuskan misi partai yang terdiri dari 5 point. Kelima point tersebut adalah

1. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tegaknya negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat.

Dari misi Partai Gerindra tersebut dapat dijelaskan bahwa arah perjuangan partai lebih ke ekonomi kerakyatan dan berpegang kepada kemandirian bangsa. Platform Ekonomi kerakyatan diharapkan mampu mengikis ketimpangan ekonomi yang terjadi antar wilayah. Karena hingga saat ini menurut Partai Gerindra ketimpangan ekonomi makin

lebar akibat arus liberalisasi yang tidak sesuai dengan tatanan nasional. Ekonomi kerakyatan yang akan dibangun oleh Partai Gerindra dengan mengembangkan koperasi sebagai bangunan ekonomi yang ideal pada dataran makro dan mikro. Selanjutnya Gerindra memberikan alternatif agar perekonomian nasional berpegang kembali kepada UUD 1945 Pasal 33. Lebih lanjut dalam buku manifesto perjuangan Partai Gerindra bahwa kehadirannya untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang liberalis seperti munculnya kebijakan undang-undang penanaman modal asing. Di samping bidang ekonomi, Gerindra juga memiliki pokok perjuangan dalam bidang-bidang lainnya seperti politik, kesejahteraan rakyat, bidang pertanian lain-lain. Kebijakan dalam berbagai bidang tersebut untuk menciptakan kesejahteraan, dan penguatan masyarakat serta kedaulatan negara.

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan Partai Gerindra pada tahun 2014 telah memiliki program yang disebut dengan 6 program aksi transformasi bangsa partai Gerindra 2014-2019 yang terdiri dari:

1. Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmu
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan
3. Membangun kedaulatan pangan dan energy serta pengamanan sumberdaya air
4. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta olahraga
5. Membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup
6. Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif

## **8. PPP**

Didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai fusi dari tiga Partai Islam yaitu, PNU, Parmusi, PSII dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Dalam mukadimah AD/ ART PPP disebutkan bahwa, “PPP merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan

masyarakat yang bertakwa pada Allah Subhanahu wata'ala dan mengkokohkan kedaulatan NKRI yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan social berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila". (hlm.2)

Pada BAB II, Asas, sifat dan Prinsip Perjuangan, Ps 4 (e):

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah prinsip **persamaan**, kebersamaan dan persatuan (hlm 3)

Pada BAB III Tujuan dan Usaha, Ps. 6 (e):

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan, pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebagai strategi untuk mewujudkan visi dan misi mengenai masyarakat yang makmur dalam AD nya PPP pada BAB VII Struktur dan Pembentukan Organisasi Kepemimpinan, bag. Ketiga DPP Paragraf Kedua: (3) Setiap Ketua dan Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain: (e) Bidang Advokasi Hukum dan HAM; (g) Bidang TI; (j) bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan; (l) bidang Dikbud)

Pada BUTIR D/ VISI PPP:

alinea 4 (hlm.89):

"Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit Usaha keluarga/ individual, usaha swasta, badan usaha Negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia".

Alinea 7 (hlm.90):

"PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai **pengetahuan dan ketrampilan yang memadai** serta **kualitas kesehatan yang baik**. Program pembangunan

kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan social yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi”.

### “Jati Diri PPP: I. Cita-cita dan Visi Partai”<sup>113</sup>

Cita-cita Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”

Untuk itu, maka PPP merumuskan visi tentang kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, PPP memperjuangkan terjaminnya “kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam *lakum diinukum waliyadain* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab dan dilandasi dengan nilai-nilai *akhlaq al karimah* (akhlak mulia). PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain.

Dalam kehidupan berpolitik, PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika politik perlu ditegakkan, hak-hak politik rakyat yang dijamin UUD 1945 perlu dihargai dan dilindungi, termasuk penyaluran aspirasi politiknya. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwa demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan atas dasar negara hukum (*rechstaat*) dan bukan atas

<sup>113</sup> <http://ppp.or.id/page/jati-diri-ppp/index/> diakses pada 17 Februari 2014.

dasar negara kekuasaan (*machstaat*). Kekuasaan harus dibatasi dengan penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan

Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita-citakan tegaknya asas “demokrasi ekonomi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi haruslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Dalam kaitan itu, tatanan ekonomi yang berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian. Harus dicegah timbulnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat monopoli dan konglomerasi yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional harus dihindarkan sehingga kesejahteraan yang lebih merata dapat diwujudkan. Harta kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga ekonomi, keuangan, dan perbankan serta pranata-pranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorong pengembangannya.

Usaha-usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum dari kalangan yang berhasil secara ekonomis perlu dilakukan secara terus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah. Karena, dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan harkat dan martabatnya. Upaya tersebut harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuhkembangkannya budaya saling harga menghargai dan saling sayang menyayangi yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (*ukhuwwah*), dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan pendapat di kalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai rahmat. Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan sejalan dengan *sunnatullah*, PPP mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang

antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ini. PPP berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas tinggi, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.<sup>114</sup>

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan

<sup>114</sup> <http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/> diakses 17 Februari 2014.

usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

Misi PPP (Khidmat Perjuangan) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman

dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

**LAMPIRAN 2**

## NARA SUMBER PENELITIAN LAPANGAN

**TABEL 1**  
WILAYAH PENELITIAN: DKI JAKARTA

No	Partai	Alamat	Nama Informan
1	Partai Demokrat	Jln. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat	
2	Partai Golkar	Jln. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480	
3	PDI-Perjuangan	Jln. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610	Ario Bimo/Pengurus DPP
4	PKS	Jln. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520	
5	PPP	Jln. Diponegoro No. 60, Jakarta	Dr. Reni Marlinawati/ Wakil Ketua Umum Romahurmuzzy MT/ Sekjen Aunur Rafiq/ Ketua
6	PKB	Jln. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430	Faisol Reza/Pengurus Pusat
7	PAN	Jln. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan	
8	Partai Gerindra	Jln. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550	Habiburrahman SH MH/ Ketua Bidang Advokasi
9	Partai Hanura	Jln. Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 100330	Kristiawanto, SHI, MH/ Wakil Sekjen
10	Partai Nasdem	Jl.. RP. Soeroso No. 44, ondangdia Lama, Jakarta 10350	Dedy Ramanta/Wakil Sekjen
11	Partai Bulan Bintang	Jln. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan	Dr. MS. Kaaban/Ketua Umum
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.	Jln. Diponegoro No.63 Jakarta Pusat	Jimmy Jambek/Pengurus DPP

**TABEL 2**  
WILAYAH PENELITIAN JAWA BARAT

Peneliti: Amin Mudzakkir, S.S.

No.	Partai	Alamat	Nama Informan
1	Partai Nasdem	Jln. Cipaganti No 158	Carlo Lorenzo
2	PKB	Jln. Banteng No. 1 A Bandung (Jln. KH Ahmad Dahlan)	H. Syaifuhuda/H.Adang R
3	PKS	Jl. Soekarno Hatta No. 538A	H Otang Suparlan/ Triska Hendriawan
4	PDI-Perjuangan	Jln. Pelajar Pejuang 45 No. 1	Dwi Putro
5	Partai Golkar	Jln. Maskumambang No. 2 Bandung	Deni Komaransyah
6	Partai Gerindra	Jln. Cimanuk No. 42 Bandung	Cecep Permanadi
7	Partai Demokrat	Jln. Maskumambang 23A	H. Iwan R Sulanjana/ HMS Mahaputra
8	PAN	Jl. Soekarno Hatta no. 53 Bandung	Sukmawa/Enjang Tedi
9	PPP	Jl. Pelajar Pejuang 45 No.120	H Yusuf Fuad/ H Adang
10	Partai Hanura	Jl. PHH Mustofa(suci) no. 190 Bandung	Badru Tamam / R Fitro F
11	Partai Bulan Bintang	Jl. Peta No. 48 Bandung	Gunawan Manshur
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.	Jl. Cijagra No. 20 Bandung	Roza Irawan

**TABEL 3**  
WILAYAH JAWA TIMUR

Peneliti: Luky Sandra, S.Ip.

No	Partai	Alamat DPW di Jatim	Nama Informan
1	Partai Demokrat	Jln. Kertajaya Indah Surabaya	Soekarwo
2	Partai Golkar	Jln. A. Yani Surabaya	Zainuddin Amali dan Freddy Purnomo
3	PDI-Perjuangan	Jln. Kendangsari Surabaya	Kusnadi
4	PKS	Jln. Gayungsari Barat X/33 Surabaya	Hamy Wahjunianto dan Imam Budi Utomo
5	PPP	Jln. Kendangsari Surabaya	KH. Mujahid Anshori
6	PKB	Jln. Ketintang Madya 153-155 Surabaya	Halim Iskandar
7	PAN	Jln. Darmokali Surabaya	Kuswiyanto
8	Partai Gerindra	Jln. Kupang Baru II No.7 Surabaya	Faf Adisiswo
9	Partai Hanura	JL. Embong Kenongo Surabaya	Wulansari Perbawati
10	Partai Nasdem	Jln Raya Darmo No.8 Surabaya	Laksamana (Purn.) Tedjo Edhy Purdjianto
11	Partai Bulan Bintang		
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.	Jln. Darmo Satelit Surabaya	M. Husni

**TABEL 4.**  
WILAYAH LAMPUNG

Peneliti: Pandu Yuhsina Adaba, S.Ip.

No	Partai	Alamat	Nama Informan
1	PPP	Bandar Lampung	Munzir Ahmad
2	Partai Demokrat	Bandar Lampung	Fajrun Fajar Rahmah
3	Gerindra	Bandar Lampung	Faruk Danial /Pattimura
4	Hanura	Bandar Lampung	Albertus Hartono
5	PKS	Bandar Lampung	Gufnan Aziz
6	PDIP	Bandar Lampung	Wattoni Nurdin
7	PKB	Bandar Lampung	Ahmad Sibli
8	Nasdem	Bandar Lampung	Dharma Wijaya
9	Golkar	Bandar Lampung	Ismed Roni
10	PKPI	Bandar Lampung	Dewi Widyaningsih/ Faisal
11	PBB	Bandar Lampung	Thomas Monada/ Amruzi Setiagama
12	PAN	Bandar Lampung	Ian Bastari

**TABEL 5**  
WILAYAH SUMATERA UTARA

Peneliti: Ibnu Nadzir, S. Sos.

No.	Partai	Alamat DPW Sumatera Utara	Nama Informan
1.	Partai Demokrat	Jln. Multatuli (Komp. Multatuli Indah Blok FF No. 39-40)	Tahan Manahan P. (Sekjen DPD Partai)
2.	Partai Golkar	Jln. KH. Wahid Hasyim No. 12	Ajib Syah (Ketua DPD Partai)
3.	Partai PDI-P	Jln. Hayam Wuruk No. 11	Sofyan Tan (Struktur Partai & Caleg DPR-RI)
4.	PKS	Jln. Kenangan Raya No. 51	Satrya Yudha Wibowo (Struktur Partai)
5.	PPP	Jln. Raden Saleh No. 11	Fadli Nurzal (Ketua DPW Partai & Caleg DPR-RI)
6.	PKB	Jln. Menteng VII No. 142	Jansen Harahap (Sekretaris DPW Partai)
7.	PAN	Jln. Krakatau No. 156	Syah Afandin (Ketua DPW Partai)
8.	Partai Gerindra	Jln.Pattimura No. 239	John Robert (Sekretaris DPD Partai)
9.	Partai Hanura	Jln. Sei Besitang No. 4	Hamdi Muluk (Wakil Ketua DPD Partai)
10.	Partai Nasdem	Jln. Jend. Sudirman No. 24/36	Hakimil Nasution (Caleg DPR-RI)
11.	Partai Bulan Bintang	Jln. Karantina No. 31	Masri Sitanggang (Struktur Partai & Caleg DPR-RI)
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Jln. Krakatau No. 199	Adla Hasibuan (Struktur Partai & Caleg DPR-RI)

**TABEL 6**  
WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Peneliti: Galih Andreanto

No	Partai	Alamat DPW di NTT	Nama Informan
1	Partai Demokrat	Jln. Amabi No.71A Tofa - Kupang	Johanes Kaunang
2	Partai Golkar	Jln. Frans Seda, Walikota -Kupang	Hugo Rohi Kalembu
3	PDI-Perjuangan	Jln. Piet. A. Tallo No. 18 Kel. Oesapa Selatan – Kupang	Nelson Matara
4	PKS	Jln. Gedung Keuangan Negara, Walikota-Kupang.	Muhamad Guhir
5	PPP	Jln. GOR Flobamora No. 5, Oebufu-Kupang	Yahidin Umar
6	PKB	Jln. Ranamese II Blok III No. 117 B Perumnas – Kota Kupang.	Yucundus Lepa
7	PAN	Jln. Piet A. Tallo No. 13 Kel. Oesapa Selatan – Kupang	Eurico Guteris
8	Partai Gerindra	Jln. Frans Seda II, Walikota-Kupang	Esthon Foenay
9	Partai Hanura	Jln. Samratulangi Raya- Kupang	Jimmy Sianto
10	Partai Nasdem	Jln Frans Seda Fatululi-Kupang	Thomas Ola
11	Partai Bulan Bintang	Jln. Nusa Bunga, Oebobo	Ahmad Syarif
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.	Jln. Venus No. 7, Penfui	Yan Mboik

**TABEL 7.**

## WILAYAH MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

Peneliti: Wahyudi Akmaliah Muhammad

No	Partai	Alamat DPW Maluku Utara	Nama Informan
1	Partai Demokrat	Jl Boulevard, Panakukang Mas, Makassar	Ni'matullah
2	Partai Golkar	Jl. Ammana Gappa, No. 2 Makassar	Mohammad Roem
3	PDI-Perjuangan	Jl. Nikel No. 46	Rudy Pieter Goni
4	PKS	MAKASSAR	
5	PPP	Jl. Perintis Kemerdekaan Kompleks Puri Kencana Sari, Makassar 90245	Devi Santi Herawati
6	PKB	Jl. Sungai Saddang No 19, Makassar	Amir Sukara
7	PAN	Jl Masjid Raya 184 A, Makassar	Azhar Arsyad
8	Partai Gerindra	JL. A.P. Pettarani 11B, Makassar	Ashabul Kahfi
9	Partai Hanura	Jln. Boulevard Ruko Jasper I no. 7 Panakukang Mas Makassar	La Tinro Latunrung
10	Partai Nasdem	Kompleks Ruko Jasper, Jl. Pengayoman No. 13-15, Kel. Masale, Sulawesi Selatan	Sanusi Ramadhan
11	Partai Bulan Bintang	Sekretariat: Jl Gunung Batu Putih Bundar No.11-13 Makassar	Abbas Hadi
12	Partai	Jl. Masjid Raya No.176, Makassar	Saharuddin Daming
	Keadilan dan Persatuan Indonesia.	Jl. Pengayoman	Samsul Bahri

**TABEL 8:**  
WILAYAH MALUKU UTARA

Peneliti: Triyono, S.Sos

No	Partai	Alamat DPW Maluku Utara	Nama Informan
1	Partai Demokrat	Jln. Ahmad Yani No. 3 Kelurahan Tanah Raja, TERNATE	Mahdi Jasin, S.Sos
2	Partai Golkar	Jln. Trans Halmahera, Lingk. Gosale – Kel. Guraping SOFIFI	Farida Jama Atau Rustam Conoras
3	PDI-Perjuangan	Jln. Teratai No.156 RT 07/RW02 Kel. Tanah Tinggi Ternate	Jasman Abubakar
4	PKS	Jln. Juma Puasa No.20, Kel. Santiong RT 01/RW02, TERNATE	Syaiful Ahmad
5	PPP	Jln. Kel. Kota Baru, TERNATE	Ir. Isa Anshari Hanafi (Sekretaris)
6	PKB	Jln. Raya Bastiong No. 106 Telp. 081388020049, 081245022688	Jasri Usman (Ketua)
7	PAN	Jln. Bougenville No. 32 Kelurahan Toboko, Ternate	Ikbal Mahmud (Sekretaris)
8	DPP Partai Gerindra	Jln. Bunga Sedap Malam Kompleks. Pohon Pala, Ternate	M. Maizon Lengkong, SE (Ketua Badan Komunikasi)
9	Partai Hanura	Jln. Makugawene, Kel. Tabona, Ternate	Gamaria Iskandar Alam
10	Partai Nasdem	Jln. Sultan Khairun, Kel. Kampung Makassar Timur, Ternate	Diganti dengan Bapak ISHAK NASER
11	DPW PBB	Jln. Trans Halmahera – Kelurahan Guraping - SOFIFI	Muhlis Radjiloen
12	DPP PKPI	Jln.Bandara Babullah, Lingk. Akehuda Kel. Tafure, Ternate	Masrul Hi. Ibrahim (Ketua)

**TABEL 9**  
NARSUM KALIMANTAN TIMUR

Peneliti: Luky Sandra Amalia, S.Ip.

Tabel 1. Kontak Dan Jadwal Wawancara Wilayah Kalimantan Timur

No	Partai	Alamat DPW di Kaltim	Nama Informan
1	Partai Demokrat		Nicolas Pangeran
2	Partai Golkar	Jln. Mulawarman Samarinda	Ahmad Albert
3	PDI-Perjuangan	Jln. Kartini 108 Samarinda	Sudarno
4	PKS	Jln. M. Yamin Samarinda	Masykur Sarmian
5	PPP	Jln. Juanda Samarinda	Rusman Yakub
6	PKB	Jln. Ir. Juanda No. 11 Kel. Air Putih Samarinda	Syafrudin
7	PAN	Jln. Teuku Umar No.9, Karang Paci, Samarinda	Zain Taufik Nurrahman
8	Partai Gerindra	Villa Mutiara, Samarinda	Suyatni Priharmoro
9	Partai Hanura	Jln. Cempedak No.4 Voorfo, Samarinda	Herwan Susanto
10	Partai Nasdem	Jln. Teuku Umar Samarinda	Achmad Amins
11	Partai Bulan Bintang	Jln. Merdeka , Ruko Pasar Inpres, Samarinda	Sugianto
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.		Eddi Wellianto

**TABEL 10:**  
NARA SUMBER JAWA TENGAH

Peneliti: Sarah Nuraini Siregar, M.Si.

<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nama Informan</b>
1	Partai Demokrat	Semarang – Jawa Tengah	Bapak Ferry
2	Partai Golkar	Semarang – Jawa Tengah	
3	PDI-Perjuangan	Semarang – Jawa Tengah	Ibu Agustin
4	PKS	Semarang – Jawa Tengah	Hadi Susanto Calon Legislatif DPRD Provinsi Jateng Dapil 4
5	PPP	Semarang – Jawa Tengah	Masruhan Samsuri
6	PKB	Semarang – Jawa Tengah	Bapak JAMAL
7	PAN	Semarang – Jawa Tengah	Bapak Frangky Calon Legislatif DPRD Provinsi No. Urut 2 Bapak Khafid Siratudin
8	Partai Gerindra	Semarang – Jawa Tengah	Dwi Yasmanto Calon Legislatif DPRD Provinsi Jateng Dapil Kebumen
9	Partai Hanura	Semarang – Jawa Tengah	
10	Partai Nasdem	Semarang – Jawa Tengah	R. Ayub
11	Partai Bulan Bintang	Semarang – Jawa Tengah	Agus Suharto
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.	Semarang – Jawa Tengah	

### LAMPIRAN 3

#### DESAIN RISET PENELITIAN

Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial  
dan Ekonomi (Keadilan Sosial) di Indonesia  
Kerjasama Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) dan INFID  
2014

#### A. Latar Belakang

Apakah ketimpangan benar-benar perlu ditangani? Kekuatan kembar globalisasi dan inovasi teknis sebenarnya telah memperbesar ketimpangan global, negara-negara miskin mengejar ketinggalan dengan yang kaya. Tetapi di banyak Negara, kesenjangan pendapatan telah melebar. Lebih dari dua pertiga dari penduduk dunia hidup di negara-negara di mana kesenjangan pendapatan telah meningkat sejak tahun 1980, bahkan sering kali ke tingkat yang mengejutkan.

Sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan substansial kemiskinan selama tiga dekade terakhir, terutama sebelum krisis keuangan Asia 1997-1998. Setelah krisis, Indonesia memasuki fase perkembangan baru yang dari pemerintahan Soeharto ke pemerintahan baru yang lebih terdesentralisasi. Dalam konteks desentralisasi dari tahun 2001 sampai 2010 lingkungan politik dan ekonomi Indonesia telah berubah secara signifikan serta memiliki implikasi untuk kesejahteraan individu, kemakmuran ekonomi regional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasca reformasi, Indonesia sering disebut-sebut sebagai kisah sukses berikutnya di Asia. Kebijakan ekonomi makro yang baik, ketahanan terhadap krisis keuangan global, dan pasar konsumen yang kuat, yang menarik perhatian meningkat investor asing di seluruh dunia. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang kuat, dikombinasikan dengan profil demografis muda dan demokrasi yang stabil, Indonesia disebut sebagai macan Asia berikutnya. Namun kemajuan ekonomi telah 'menetes' sangat tidak merata di seluruh kelompok dan daerah-daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,23 persen sepanjang tahun 2012. Dengan pertumbuhan

yang tinggi, dianggap Indonesia adalah pemain terbaik kedua di Asia setelah China. Tingginya pertumbuhan namun tidak disertai dengan peningkatan kesetaraan. Menurut data BPS, kegiatan ekonomi terpusat terutama di Jawa (57,63 persen) dan Sumatera (23,77%). Kesenjangan wilayah antara Jawa dengan luar Jawa: tahun 1985 sebesar 54,4%-45,6%, sementara data tahun 2012 sebesar 57,6%-42,4%, tidak ada perubahan yang berarti dari dua wilayah tersebut. Demikian juga jika kita melihat pada pembagian kawasan barat Indonesia dan timur Indonesia, hampir tidak mengalami perubahan dalam dua belas tahun terakhir, yaitu sekitar 83%-17%.

Menyusul gelombang reformasi dan agenda neoliberal, Indonesia dinyatakan telah menganut pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi. Namun kenyataannya praktik politik lokal masih diwarnai oleh oligarki. Bahkan desentralisasi justru memfasilitasi kecenderungan kesenjangan atau ketimpangan antara kelompok sosial ekonomi dan wilayah termasuk di level sub-nasional. Ketimpangan masih menjadi salah satu permasalahan utama dan belum dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu dan bergantinya kepemimpinan dan negara, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/1998 disebutkan cenderung stabil dan membaik.

Di atas kertas, prestasi ekonomi Indonesia memang menakjubkan. Dalam dua tahun terakhir, yakni 2011 dan 2012, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan di atas 6%. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan itu tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan *Gini Ratio*, meningkat pesat dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011) artinya jurang pendapatan tertinggi dan terendah semakin lebar.)

Ketika membicarakan ketimpangan yang berlangsung sebagai konsekuensi dari iklim ekonomi neoliberal maka kita meletakkan konteksnya pada skema desentralisasi sebagai hasil desain politik reformasi, yang ditandai oleh terbitnya UU No. 99/1999 dan revisinya yaitu UU No. 32/2004. Dengan desentralisasi ini Indonesia memang menjalankan kebijakan paling ambisius sebab menggeser wewenang dan banyak dari proses tawar-menawar politik dari pusat ke tingkat lokal. Wujudnya antara lain dalam devolusi kewenangan pengelolaan belanja publik dengan dengan proporsi alokasi ditentukan oleh tingkat lokal naik dari sekitar 15 % dari total anggaran negara pada tahun 2000 menjadi sekitar 30 % dalam beberapa tahun terakhir.

Pendukung desentralisasi umumnya melihat bahwa desentralisasi membawa serta harapan tinggi bagi masyarakat di daerah khususnya bagi perempuan dan masyarakat miskin. Agenda yang diperhatikan dalam konteks desentralisasi terkait dengan fokus pada mengatasi ketimpangan non ekonomi antara lain adalah mengamankan akses universal untuk pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.<sup>115</sup> Mengapa dua hal ini menjadi barometer penting? Kedua akses ini adalah hak dasar warga negara, wilayah mana yang justru ketimpangan masih banyak ditemukan. Hingga saat ini, biaya masih menjadi alasan utama untuk sekolah dan putus sekolah dan rendahnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin .

Di saat yang sama, instrumen hukum nasional memandatkan bahwa “Program jaminan sosial bagi masyarakat miskin harus dibayar oleh pemerintah. “ Undang-undang ini belum sepenuhnya dioperasionalkan meskipun sejak tahun 2005 sejumlah skema telah memperkenalkan cukup besar dana untuk memperluas cakupan kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, kebijakan ini terhambat dalam alokasi dan mekanisme pembayaran di level kabupaten. Salah satu contohnya adalah pencegahan penyalahgunaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS ), yang menyediakan dana untuk murid sekolah-sekolah dasar untuk menutupi biaya operasi dan program asuransi kesehatan nasional; (Jamkesmas) dengan penggantian langsung ke rumah sakit umum dan puskesmas kecamatan ( Puskesmas ) untuk layanan klinis yang diberikan kepada orang miskin. Kedua program ini secara dramatis memperluas pengeluaran di tingkat pusat untuk layanan sosial. Pada tahun 2008, BOS menyumbang 23% dari belanja pemerintah pusat untuk pendidikan dan pada tahun 2010 Jamkesmas menyumbang 20 % dari semua pusat pengeluaran untuk kesehatan.<sup>116</sup> Namun peningkatan tingkat pendanaan ini pun masih tidak cukup untuk menutupi biaya jasa untuk di Indonesia 76 juta orang miskin.<sup>117</sup>

Apakah ada jalan keluar bagi pemenuhan hak dasar warga Negara dengan kondisi seperti di atas? Di atas kertas Indonesia mengenal konsep

<sup>115</sup> Lihat, Kristiansen S. dan P. Santoso “Surviving Decentralisation? Impacts of Regional Autonomy on Health Service Provision in Indonesia” dalam *Health Policy*, 77, 2006, hlm.247-259.

<sup>116</sup> Lihat, *Investing in Indonesia's Health: Challenges and Opportunities for Future Public Spending* (Jakarta: World Bank,2008); *Local Budget Analysis in Indonesia: A Review of Local Budgets in 41 Districts/Municipalities* (Seknas-FITRA and The Asia Foundation: Jakarta, 2010).

<sup>117</sup> Lihat, *Health Financing in Indonesia: A Reform Road Map.* (World Bank: Washington DC, 2008).

keadilan sosial yang pada prinsipnya didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep ini, memahami kompleksitas yang dijabarkan di atas idealnya dijabarkan ke dalam kebijakan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat seperti kebijakan pajak progresif, reforma agraria, redistribusi pendapatan maupun penciptaan akses lapangan kerja, kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. Kebijakan-kebijakan di atas dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan *outcome* yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural.<sup>118</sup>

Selain itu, konsep keadilan sosial juga meniscayakan setiap individu harus diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang lebih luas. Selain aspek sosial, partisipasi politik juga diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan di atas. Partisipasi politik tersebut bisa diartikan partisipasi individu maupun partisipasi yang disalurkan melalui partai politik.

Studi ini melihat bagaimana parpol mengelola isu ketimpangan. Dengan latar pasca reformasi 1998, mewujudkan agenda menangani ketimpangan sosial dalam konteks demokrasi di Indonesia, di mana pelembagaannya ditentukan oleh keikutsertaan parpol dalam pemilu, artinya melihat pada bagaimana isu ketimpangan direpresentasikan melalui program-program parpol.

Paska 15 tahun reformasi, partai politik memiliki kekuatan lebih besar dari media massa, universitas serta CSO. Partai politik merupakan salah satu *power holder* utama bersama pemerintah. Partai politik dan wakilnya di DPR berwenang dalam hal (a) UU APBN yang mengesahkan rencana belanja dan alokasi anggaran; (b) menilai jalan tidaknya kebijakan dan program pemerintah; (c) mengusulkan cara baru atau ukuran baru dalam menilai berhasil tidaknya pembangunan; (d) wakil-wakil partai politik menjadi kepala daerah dan dengan demikian berkesempatan untuk merubah/memperbaiki praktik pelayanan publik di pemerintah.

<sup>118</sup> Beberapa aspek dalam dimensi keadilan sosial yang penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan non ekonomi antara lain, pencegahan kemiskinan, akses pendidikan, inklusi pasar tenaga kerja, kohesi sosial dan non diskriminasi, kesehatan dan keadilan pembangunan antar generasi. Tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antara lain lihat "On Inequality, Income Marxism, Black" dalam William Darity, Jr., Ed., International Encyclopedia of The Social Sciences 2nd edition, Vol. 4, Macmillan: USA, 2008. Hlm. 1-3.

Studi yang dilakukan oleh P2P dan INFID memandang partai politik memiliki dua sisi wajah, sebagai bagian dari persoalan dan juga bagian dari solusi. Dalam hal solusi, bersamaan dengan konteks pemilu multipartai di asumsikan bahwa partai politik, selain menjadi sumber rekrutmen posisi dalam birokrasi, dapat menjadi mitra kerja pemerintah dan pengawas pemerintah ketika mereka duduk di DPR, DPRD dan juga di berbagai lembaga Yudikatif, termasuk dalam mendorong rencana pembangunan yang lebih inklusif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

## B. Perumusan Masalah

Ketimpangan yang disebutkan di bagian latar belakang berlangsung dalam konteks ekonomi nasional di mana liberalisasi ekonomi pasca 1998 menyebabkan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kapital asing. Hal ini mendorong lajunya arus sumber daya yang mengalir keluar. Dengan penguasaan sumber daya yang terletak di aktor-aktor termasuk korporat nasional dan internasional, maka perspektif untuk mengedepankan keuntungan lebih diutamakan daripada untuk agenda memakmurkan rakyat. Salah satu dampak lain dari liberalisasi juga dapat dilihat di sektor pertanian, sebab tata kelola agraria yang pro-liberalisasi menjadikan petani semakin terasing dari aksesnya pada tanah yang merupakan alat produksi. Selain itu skema liberalisasi impor telah menurunkan hasil produksi petani.

Di sisi lain, realitas politik ekonomi di atas dihadapkan pada agenda besar pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan ada 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal sebagai peserta pemilu 2014 itu. Idealnya parpol kontestan pemilu 2014 tidak bisa tidak harus berkontribusi pada berbagai persoalan ekonomi di atas. Oleh sebab itu selain berkuat dengan kesibukan mengurus persiapan teknis, seperti penyiapan calon legislatif, kampanye, alat peraga, dan basis konstituen, parpol juga harus menyiapkan dan mensosialisasikan program-program keadilan sosial dan ekonominya untuk Indonesia pasca pemilu legislative dan presiden 2014.

Penelusuran awal terhadap beberapa *website* parpol menunjukkan bahwa hanya sedikit parpol yang menguraikan secara jelas agenda ekonomi atau keadilan sosialnya. PKS dan Gerindra memberi gambaran penjelasan yang cukup detil.<sup>119</sup>

<sup>119</sup> <http://partaigerindra.or.id/> dan <http://www.pks.or.id/>

Beberapa parpol menyinggung isu ekonomi kerakyatan, termasuk Demokrat, Golkar, PPP, PDIP, dan lain-lain, namun tanpa disertai dengan penjelasan detail.<sup>120</sup> Partai Demokrat, misalnya, mengklaim semua program seperti BLT, PNPM, KUR, BOS, Jamkesmas, dan lain-lain, sebagai program pro-rakyat. Sementara jika kita pahami, program-program itu dalam konteks ekonomi saat ini hanyalah bersifat kuratif untuk mengurangi dampak skema neoliberal, tetapi tidak bisa diharapkan bisa memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partai Golkar dalam narasi website mereka cenderung tidak memisahkan populisme dan ekonomi kerakyatan.<sup>121</sup> Metode membagi uang ketika kampanye dianggap sebagai ekonomi kerakyatan sementara idealnya parpol benar-benar mengetahui persoalan rakyat keseluruhan dan merumuskan kebijakan integratif untuk menyelesaikannya.

Umumnya hampir semua parpol belum mempunyai suara dan posisi politik yang terkait pengelolaan ekonomi nasional, seperti apa pengelolaan SDA, peran negara terhadap aset ekonomi strategis, sikapnya terhadap layanan publik, dan lain-lain. Problem yang umum ditemui adalah tiadanya konsistensi antara program parpol dengan tindakan politiknya. Banyak parpol yang mengklaim berpihak kepada kemandirian ekonomi, tetapi masuk ke dalam koalisi partai berkuasa yang pro-neoliberal. Banyak partai politik mengabdikan diri pada ekonomi konstitusi, tetapi praktek politiknya menyetujui liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, privatisasi, dan lain-lain. Ke depan selain punya agenda ekonomi yang jelas, setiap parpol juga dituntut konsisten berpijak pada agenda ekonominya.

Pemilu 2014 akan menjadi satu atau dua tingkat lebih baik jika partai politik dan kadernya dapat menawarkan usulan kebijakan dan program yang lebih bersifat problem solving, lebih spesifik dan lebih bertumpu pada kebutuhan warga (*development/sosially oriented political parties*). Salah satu kinerja partai politik sebagaimana disebut dalam standard partai modern oleh IDEA Internasional adalah juga diukur dari sejauh mana Partai politik menyiapkan diri dan kadernya untuk menjadi *policy makers* yang siap dengan usulan kebijakan termasuk kebijakan mengatasi ketimpangan untuk mendorong dan memajukan kebijakan.

<sup>120</sup> <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/> ; lihat juga <http://www.demokrat.or.id/>

<sup>121</sup> <http://partaigolkar.or.id/> secara khusus lihat <http://www.slideshare.net/MediaCenterGolkar>

Karenanya penting untuk melihat bagaimana usaha-usaha untuk menegakkan keadilan sosial tersebut dilakukan oleh partai politik serta menilai usaha dan dampak yang ditimbulkan dari upaya-upaya tersebut. Upaya melihat bagaimana partai politik berbicara tentang ketimpangan menemukan konteks waktunya karena tahun 2014 merupakan tahun politik yang akan menentukan arah masa depan visi misi Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan utama studi ini adalah “Sejauh mana dalam konteks demokrasi Indonesia partai politik dapat berkontribusi pada penanganan ketimpangan melalui program-program partai yang berdimensi keadilan sosial-ekonomi? “. Secara operasional, penilaian tersebut dilakukan dengan mencermati program-program sosial dan politik dari partai politik peserta pemilu, relasi partai politik dengan pemerintah, masyarakat sipil dan stakeholders yang lain yang terkait dalam upaya programatik dalam cakupan isu keadilan sosial di Indonesia.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Beberapa pertanyaan penelitian yang dielaborasi dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dua belas partai politik peserta pemilihan umum 2014 tentang isu ketimpangan?
2. Apa bentuk kebijakan atau program-program terkait dengan ketimpangan yang diusung oleh dua belas parpol peserta pemilu 2014?
3. Apa strategi parpol terkait dengan advokasi kebijakan atau program tentang ketimpangan?

### **D. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tentang isu ketimpangan (politik sosial dan ekonomi) di Indonesia.
2. Memetakan bentuk-bentuk kebijakan dan/ atau program ketimpangan (politik sosial dan ekonomi) yang dimiliki oleh 12 partai politik peserta Pemilu 2014.
3. Mengidentifikasi strategi untuk melaksanakan program/ kebijakan ketimpangan yang dinilai mendesak untuk dilakukan oleh 12 partai politik peserta Pemilu 2014 dan konstituennya.

### **E. Keluaran /Output**

1. Peta persepsi dari 12 Partai Politik peserta Pemilu 2014 tentang isu

- ketimpangan (baik ekonomi dan non ekonomi) di Indonesia.
2. Peta kebijakan dan/ atau program ketimpangan yang dimiliki oleh 12 Partai Politik peserta Pemilu 2014.
  3. Gambaran strategi pelaksanaan kebijakan /program tentang ketimpangan yang dinilai mendesak untuk dilakukan oleh 12 Partai Politik peserta Pemilu 2014 dan konstituennya.

## **F. Outcome**

Secara umum riset ini ditujukan untuk memperoleh konsep pendekatan yang tepat untuk mendorong keluarnya kebijakan parpol mengenai program-program berdimensi keadilan sosial dan penanganan ketimpangan.

## **G. Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bersifat kualitatif di level provinsi pada sepuluh lokasi dan dua belas parpol. Pengembangan instrumen penelitian ini didasarkan pada pengembangan konsep yang dikembangkan secara deduktif berdasarkan tipologi yang dibangun dari studi literatur. Penelitian lapangan dan wawancara dengan narasumber terpilih akan membantu menajamkan tipologi dan konteks yang dibangun di lapangan. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan FGD (*focus group discussion*) yang berguna menyerap data dari sejumlah narasumber terpilih secara simultan.

### **1. KERANGKA KONSEPTUAL**

Masalah ketimpangan ekonomi telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan pendapatan internasional adalah perhatian utama Laporan Brandt yang disebut Dialog Utara-Selatan.

Dalam studi ini dua definisi operasional yang digunakan yaitu:

#### ***Ketimpangan***

Ketimpangan adalah suatu keadaan dimana terjadi perbedaan kondisi yang terjadi pada waktu tertentu. Ketimpangan dalam studi ini dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan ekonomi dan nonekonomi. Ketimpangan ekonomi meliputi ketimpangan distribusi pendapatan dan konsumsi, ketimpangan wilayah (desa dan kota, Jawa dan luar Jawa), ketimpangan sektoral (formal atau informal) dan ketimpangan nonekonomi.

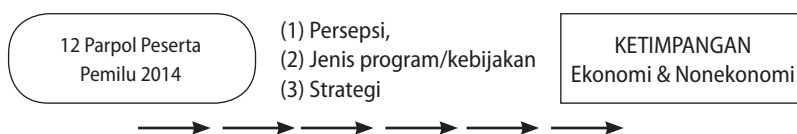
Sementara, ketimpangan nonekonomi atau *nonincome* meliputi ketimpangan kesehatan (angka harapan hidup) ketimpangan pendidikan

(akses dan kualitas), ketimpangan gender (partisipasi, control dan kepemilikan) serta ketimpangan dalam hal kapabilitas sosial seperti penyampaian aspirasi, sosial bonding (komunitas, organisasi sosial dan kekerabatan) serta ketimpangan dalam hal mobilitas sosial (migrasi, status sosial) .

Dalam studi ini, indikator ketimpangan yang dilihat adalah (1) Ketimpangan Ekonomi yang terdiri dari ketimpangan pendapatan serta (2) ketimpangan non ekonomi yang terdiri dari ketimpangan akses pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan ketimpangan Gender—AKI dan angka penyerapan kerja perempuan (provinsi).

Partai Politik dalam studi ini adalah organisasi politik peserta pemilihan umum Republik Indonesia tahun 2014 yang secara sah telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dua belas partai politik peserta Pemilu 2014 adalah; Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Adakah kebijakan partai (dua belas partai peserta Pemilu 2014) yang menyangkut hal ini di sepuluh Provinsi sasaran riset? Untuk melihat hal ini maka akan dilakukan wawancara kepada pengurus atau tokoh dua belas parpol di tingkat provinsi tersebut (DPD/DPW).

## 2. ALUR PIKIR



## 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- Studi literatur;
- Observasi lapangan dan wawancara mendalam;
- *Focus group discussion/peer review*;

## 4. NARASUMBER:

Dua belas partai politik peserta Pemilu 2014; Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia.

#### 5. LOKASI:

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada perimbangan keterwakilan wilayah Jawa dan luar Jawa. Fokus analisis di daerah luar Jawa adalah DPW yang berkedudukan di ibukota provinsi. Di Jawa penelitian dilakukan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus sebagai lokasi dari DPP dua belas partai politik. Di tingkat provinsi penelitian dilakukan di Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (Semarang), Sumatra Utara (Medan), Lampung (Bandar Lampung), Kalimantan Timur (Samarinda), NTT (Kupang), Sulawesi Selatan (Makassar) dan Maluku Utara.

### **H. Tahapan Penelitian dan Output Laporan Penelitian**

Rencana Kerja Penelitian	Januari-Februari 2014
Review hasil Riset lapangan	12 Maret 2014
Peer Review atas draf 1	25 Maret 2014
Laporan Penelitian tahap akhir/Final Report	27 Maret 2014

### **Pelaksana**

Riset ini akan dilakukan oleh INFID bekerja sama dengan bidang Politik Nasional P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan susunan anggota tim sebagai berikut:

Penanggungjawab:

1. Prof. Dr. Syamsuddin Haris (P2P LIPI)
2. Tim Peneliti:
3. Pandu Yuhsina Adaba (Peneliti/ P2P LIPI)
4. Sarah Nuraini Siregar (Peneliti/P2PLIPI)
5. Luky Sandra Amalia (Peneliti/P2P LIPI)
6. Irine H Gayatri (Peneliti/P2P LIPI)
7. Ibnu Nadzir (Peneliti/ PMB LIPI)
8. Triyono (Peneliti/P2K LIPI)
9. Wahyudi Akmaliah (PMB LIPI)
10. Galih Andreanto (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA)
11. Amin Mudzakkir (PSDR LIPI)
12. Saiful Hakam (PSDR LIPI)

*Reviewer:*

1. Syamsuddin Haris (P2P LIPI)
2. Wawan Ichwanuddin ( P2P LIPI)
3. Sri Nuryanti, M.A.
4. Firman Noor. Ph.D.
5. Asisten Peneliti : Rizal Assalam (FISIP UI)
6. Administrasi:
7. Dini Rahmiati (P2P LIPI)
8. Jamalullail (P2P LIPI)

**LAMPIRAN 4**

## INSTRUMEN PENELITIAN

**Tabel 1**  
Instrumen Penelitian

Daerah : ...  
Peneliti : ...  
Parpol : (1) ....

No	PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM	
1	Bagaimana visi/platform dari 12 Partai Politik peserta Pemilu 2014 tentang isu ketimpangan (ekonomi dan non ekonomi) di Indonesia?	
1.1.	Apakah visi/platform parpol anda mengenai ketimpangan?	
1.2.	Apakah DPW Parpol menganggap bahwa di provinsi ini ada ketimpangan?	
1.3.	Jika ya, apa saja? bentuknya?	
1.4	Apakah ketimpangan tersebut ada di wilayah anda?	
1.5.	Bagaimana metode untuk mengatasinya?	
1.6.	Kendalanya (jika ada)?	
1.7.	Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?	
2.	Apa bentuk-bentuk kebijakan dan/ atau program ketimpangan (politik sosial dan ekonomi) yang dimiliki oleh 12 partai politik peserta Pemilu 2014?	
2.1.	Apakah parpol anda punya kebijakan mengatasi ketimpangan?	
2.2.	Apakah kebijakan itu diturunkan menjadi program?	
2.3.	Apa jenis program tersebut?	
2.4.	Apakah program dilakukan oleh parpol atau bekerjasama dengan pihak lain?	
2.5.	Jika bekerjasama, bisakah dijelaskan kemitraan dengan siapa? pendanaannya?	
2.6.	Apakah pendanaan program ketimpangan berasal dari parpol atau mitra?	

2.7.	Apa faktor yang menjadi kendala pembuatan kebijakan/program tersebut? Bagaimana mengatasi kendala tersebut? (internal/eksternal?)	
3	Bagaimana strategi parpol melaksanakan program / kebijakan ketimpangan?	
3.1.	Bagaimana strategi parpol dan konstituennya untuk melaksanakan program/ kebijakan ketimpangan yang dinilai mendesak ?	
3.2.	Apakah parpol menyebarluaskan kebijakan mengatasi ketimpangan pada publik?	
	Jika ya bagaimana metodenya?	
3.3.	Apakah anda pernah mendengar/ membaca/terlibat dalam program/ kebijakan parpol tentang ketimpangan?	
3.4.	Menurut anda bagaimana bentuk keterlibatan parpol dalam isu tersebut?	

**Tabel 2:**  
RAGAM PERSEPSI PARPOL TENTANG KETIMPANGAN

Daerah : ...  
 Peneliti : ...  
 Parpol : (1) ....

Parpol	Bentuk Ketimpangan	Penting/ tidak untuk diatasi	Usulan program/kebijakan (oleh partai dan dianjurkan dilaksanakan oleh pemerintah)
	Ketimpangan pendapatan		
	Ketimpangan akses pelayanan kesehatan		
	Ketimpangan akses pendidikan dasar		
	Ketimpangan ....		

**Tabel 2**  
RAGAM KEBIJAKAN PARPOL TENTANG KETIMPANGAN

Daerah : ...  
Peneliti : ...  
Parpol : (1) ....

Parpol	Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan non-pendapatan (ketimpangan Kesempatan)

**Tabel 3.**  
KONTAK DAN JADWAL WAWANCARA WILAYAH ....

No	Partai	Alamat DPW di....	Nama Informan	No. Kontak	Jadwal Wawancara
1	Partai Demokrat				
2	Partai Golkar				
3	PDI-Perjuangan				
4	PKS				
5	PPP				
6	PKB				
7	PAN				
8	Partai Gerindra				
9	Partai Hanura				
10	Partai Nasdem				
11	Partai Bulan Bintang				
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.				

Informan : 1 Partai/1 Orang

**Tabel 4.**  
DATA YANG DIPERLUKAN

Partai	Dokumen Kebijakan, Visi Dan Misi Dan Aksi	Pemberitaan Media Massa	Hasil Evaluasi-Monitoring,	Hasil Penelitian, Hasil Audit Dan Lain-Lain
Partai Demokrat				
Partai Golkar				
PDI-Perjuangan				
PKS				
PPP				
PKB				
PAN				
Partai Gerindra				
Partai Hanura				
Partai Nasdem				
Partai Bulan Bintang				
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.				